



KEMENPKP

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III

**BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN
PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
SULAWESI I**

TA. 2025



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan rahmat-Nya Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Tahun Anggaran 2025 dapat diselesaikan. Laporan Monitoring dan Evaluasi Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I ini disusun berdasarkan penjabaran target kinerja secara periodik pada tahun 2025 sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja (PK). Laporan ini disusun dengan melakukan pengumpulan data kinerja dan pengukuran atas capaian terhadap sasaran dan target kinerja untuk kemudian dituangkan ke dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi triwulanan. Selain itu, Laporan ini berisi realisasi kinerja pada bulan yang bersangkutan kemudian dibandingkan dengan target bulanannya.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I yang sebelumnya adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman, saat ini merupakan unit organisasi dibawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tiga wilayah cakupan kerja yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Gorontalo yang dalam pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memiliki tugas Melaksanakan penyediaan perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan Kawasan permukiman, penetaan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitas seah terima asset.

Pelaksanaan paket pekerjaan di Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I akan dilakukan pemantauan secara berkala perbulan dengan dokumen rencana aksi sebagai dasarnya. Laporan Kinerja Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I Triwulan III Tahun 2025 ini merupakan alat pemantauan dan evaluasi pencapaian target dalam bentuk laporan pengukuran kinerja. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Triwulanan ini diharapkan permasalahan dan kendala yang dapat menyebabkan tidak tercapainya target dapat diantisipasi pada bulan berikutnya.

Manado, Oktober 2025

Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan
Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I,



Ir. H. Hujurat, S.T., M.T
NIP. 19681125 199903 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	7
BAB II	8
CAPAIAN KINERJA	8
A. TARGET KINERJA TRIWULAN III BEDASARKAN DOKUMEN RENCANA AKSI KINERJA	8
B. CAPAIAN TARGET TRIWULAN III	11
C. PERMASALAHAN/ POTENSI CAPAIAN TRIWULAN.....	14
BAB III	15
PENUTUP.....	15
A. RENCANA TINDAK LANJUT	15
LAMPIRAN	16

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Sekretariat Jenderal	4
Tabel 1.2 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	4
Tabel 1.3 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	5
Tabel 1.4 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	5
Tabel 1.5 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	5
Tabel 1.6 : Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I 2025 - 2029.....	6
Tabel 2.1 : Amanat DIPA Berdasarkan DIPA Awal Tahun Anggaran 2025.....	8
Tabel 2.2 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kerja (PK) awal 2025 Sekretariat Jenderal.....	9
Tabel 2.3 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025 Direktorat jendral Kawasan Permukiman.....	9
Tabel 2.4 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasar kan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025 Direktorat Jenderal Kawasan Perdesaan.....	10
Tabel 2.5 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025 Direktorat Jenderal Kawasan Perkotaan.....	10
Tabel 2.6 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025 Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	11
Tabel 2.7 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan III Sekretariat Jenderal	11
Tabel 2.8 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan III Dirjen Kawasan Permukiman	12
Tabel 2.9 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	12
Tabel 2.10 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	13
Tabel 2.11 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	14

The background features abstract geometric shapes in dark blue and gold, primarily located in the top-left and bottom-right corners. The central area is a solid light beige color where the title is placed.

BAB I

PENDAHULUAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I yang sebelumnya adalah Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I yang berada dibawah Direktorat Jenderal Perumahan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Kawasan Permukiman, saat ini merupakan unit organisasi dibawah Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman yang terbentuk berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman No. 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman mempunyai tiga wilayah cakupan kerja yaitu Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Maluku Utara, dan Provinsi Gorontalo yang dalam pelaksanaan kegiatannya dibantu oleh Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Maluku Utara, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Gorontalo.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I berada dibawah 5 (lima) unit organisasi dalam kementrian perumahan dan kawasan permukiman. 5 unit organisasi tersebut berdasarkan peraturan menteri perumahan dan kawasan permukiman nomor 1 Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Jenderal
2. Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman
3. Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan
4. Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan
5. Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I bertanggung jawab atas amanat DIPA yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja (PK) antara Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I dengan masing - masing unit organisasi. Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, maka Tugas Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I adalah sebagai berikut: "Melaksanakan penyediaan

perumahan, peningkatan kualitas perumahan, pengembangan Kawasan permukiman, penataan kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial dan fasilitas serah terima aset”.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- Penyusunan program dan anggaran pelaksanaan pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Penyusunan rencana teknis pengembangan kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana dan utilitas umum serta Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan; Pelaksanaan pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan pengendalian teknis pengembangan Kawasan permukiman, pemberian bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum, serta Pembangunan dan peningkatan kualitas perumahan;
- Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pembangunan perumahan dan kawasan permukiman;
- Pengelolaan data dan informasi perumahan dan kawasan permukiman;
- Pelaksanaan koordinasi dan dukungan penataan Kawasan permukiman pasca bencana dan kerusakan sosial;
- Pelaksanaan koordinasi penyediaan lahan dan pengembangan hunian;
- Pelaksanaan koordinasi pemanfaatan dan penghunian perumahan;
- Pelaksanaan fasilitasi bina usaha dan perlindungan konsumen perumahan;
- Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi forum perumahan dan Kawasan permukiman;
- Pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan koordinasi fasilitasi pembiayaan perumahan;
- Pelaksanaan fasilitasi serah terima aset;

- Pelaksanaan dan koordinasi reformasi birokrasi, Pembangunan zona integritas, sistem pengendalian intern, sistem manajemen risiko serta sistem pengendalian anti korupsi dan penyuapan; dan
- Pelaksanaan urusan tata usaha, umum dan rumah tangga, komunikasi publik serta layanan hukum balai.

Sesuai dengan Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, PERMEN PAN dan RB No. 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, maka Kementerian PKP diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta pengukuran kinerja per triwulan dan tahunan. Adapun Sistem Kinerja dibangun dan dikembangkan bagi penyelenggara manajemen kinerja melalui Upaya merencanakan, melaksanakan, mengukur dan mengevaluasi kinerja. Hal ini bertujuan untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mencapai tujuan dalam kerangka pemenuhan visi dan misi organisasi Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Sulawesi I berupaya secara terus – menerus menerapkan prinsip – prinsip perencanaan sebagaimana diatur dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik berdasarkan ketentuan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional maupun berdasarkan ketentuan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Dokumen Penetapan Kinerja (PK) merupakan Perjanjian Kerja yang berisikan perjanjian antara Pihak yang diberikan tanggung jawab (dalam hal ini Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I) dengan Pihak Pimpinan yang memberikan tanggung jawab dalam hal ini 5 unit organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Kawasan permukiman, Direktorat Perdesaan, Direktorat Perkotaan, dan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Dokumen ini secara otomatis menjadi kontrak kinerja yang harus dipenuhi oleh Kepala Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I selama satu tahun kepada Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal Kawasan Permukiman, Direktur Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktur Jenderal Perumahan

Perkotaan, dan Direktur Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Dokumen Penetapan Kinerja disusun setelah terbitnya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA). Hal ini dimaksudkan agar Dokumen Penetapan Kinerja (PK) yang dibuat lebih realistis dengan kegiatan dan ketersediaan dana. Dokumen Penetapan (PK) ini juga akan menjadi bahan acuan dalam Pengukuran Kinerja suatu unit organisasi. Terdapat 2 program dalam Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I yaitu: 1) Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan 2) Program Dukungan Manajemen.

Tabel 1.1 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Sekretariat Jenderal

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Layanan Dukungan Manajemen	1	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	4 Layanan

Tabel 1.2 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Dan Akuntabilitas Kinerja	1 Laporan
		2	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan Dan Kawasan Permukiman	1 Rekomendasi Kebijakan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kawasan Permukiman	1	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Rusu, Peningkatan Kualitas Dan Penanganan Kumuh	4 Laporan
		2	Jumlah rumah Swadaya di kawasan Permukiman	1.088 Unit
3	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitas Penyiapan Lahan Dan Pemenuhan Rumah Yang Terlayani PSU Kawasan Permukiman	1	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan	430 Unit
4	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	1	Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	18,81 Hektar

Tabel 1.3 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2	Jumlah Laporan Pematuan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	2 Laporan
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Perdesaan	1	Jumlah Unit Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	336 Unit

Tabel 1. 4 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	1.	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi dan program, prioritas, penyelenggaraan perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2.	Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan	4 Laporan
2.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
3.	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	1.	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	1 Rekomendasi Kebijakan
		2.	Jumlah Rumah Swadaya perkotaan	334 Unit

Tabel 1.5 : Perjanjian Kinerja Balai P3KP Sulawesi I dengan Direktorat Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA		TARGET
1.	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	1 Rekomendasi Kebijakan
2.	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	1.	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	1 Rekomendasi Kebijakan

Kegiatan adalah tindakan nyata dalam jangka waktu tertentu yang dilakukan oleh instansi pemerintah sesuai dengan kebijakan dan program yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada untuk mencapai sasaran dan tujuan tertentu. Kegiatan pada

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman Sulawesi I 2025-2029 pada 5 (lima) Direktorat adalah sebagai berikut :

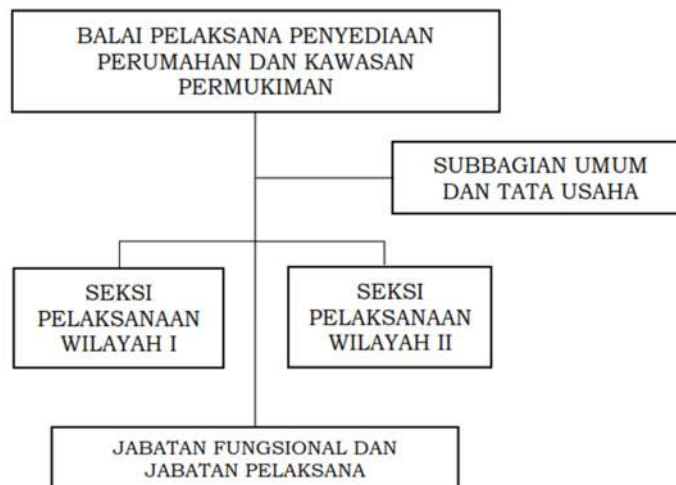
Tabel 1. 6 : Program Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I 2025 - 2029

Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
Sasaran Strategis (SS) 1	Meningkatnya Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang efisien, layak, Terjangkau dan Berkelanjutan
IKSS-1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses hunian Layak dan Terjangkau
IKSS-2	Persentase Luas Permukiman kumuh yang ditangani secara terpadu
IKSS-3	Persentase terwujudnya Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang Mendukung tersedianya hunian Layak, terjangkau dan berkelanjutan
IKSS-4	Persentase desa yang memiliki 100% rumah layak huni
Sasaran Program (SP) 1 DJKP : meningkatkan Hunian Layak di Kawasan Permukiman	IKP 1 : Persentase Peningkatan Hunian Layak di Kawasan Permukiman (%)
Sasaran Program (SP) 2 DJKP : Meningkatkan Penanganan Permukiman Kumuh	IKP : Persentase Peningkatan Penanganan Permukiman Kumuh
Sasaran Program (SP) 3 DJKP : Meningkatkan Ekosistem Perumahan dan permukiman yang Mendukung Tersedianya Hunian Layak	IKP : Persentase Peningkatan Ekosistem Perumahan dan Permukiman yang Mendukung Hunian Layak (%)
Sasaran Program (SP) 4 DJPDesa: Meningkatkan Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perdesaan	IKP : Persentase Hunian Layak, Aman dan Terjangkau di wilayah Perdesaan
Sasaran Program (SP) 5 DJPKota: Meningkatkan Hunian Layak dan Terjangkau di Wilayah Perkotaan	IKP : Persentase Hunian Layak, Aman dan Terjangkau di wilayah Perkotaan
Sasaran Program (SS) 6 DJTKPR: Meningkatkan Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman	IKP 1 : Persentase Capaian Penerapan Rekomendasi Kebijakan dan NSPK Tata Kelola dan Pengendalian Risiko Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (%)
	IKP 2 : Persentase Tingkat Efisiensi dan Pencegahan Korupsi dalam Pelaksanaan Pembangunan Perumahan (%)
Program Dukungan Manajemen	
Sasaran Strategis (SS) 2 :	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola dan Pengawasan Intern Kementerian PKP
IKSS-1 :	Tingkat Kualitas Tata Kelola Kementerian PKP
IKSS-2 :	Indeks Integritas Kementerian PKP
IKSS-3 :	Tingkat Kualitas Pengawasan Intern
Sasaran Program (SP) 1 Sekjen: Meningkatkan Dukungan Manajemen Kementerian PKP	IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Kementerian PKP (%)

Program Perumahan dan Kawasan Pemukiman	
Sasaran Program (SP) 3 DJKP : Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Dsirektorat Jenderal Kawasan Permukiman (%)
Sasaran Program (SP) 4 : Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat jenderal Perumahan Perdesaan (%)
Sasaran Program (SP) 5: Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	IKP : Tingkat Kualitas Dukungan Manajemen Direktorat jenderal Perumahan Perdesaan (%)
Sasaran Program (SS) 6 : Meningkatnya Dukungan Manajemen Direktorat Jendral Tata Kelola dan Pengendalian Resiko	IKP : Tingkat Kualitas Dukungan manajemen Direktorat Jendral Tata Kelola dan Pengendalian Resiko (%)

C. STRUKTUR ORGANISASI

Pengelolaan sumber daya manusia, menjadi fondasi penting dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I, sumber daya manusia yang terkelola dengan profesional dan responsif akan melahirkan aparatur sipil negara yang berintegritas tinggi dan sigap dalam menghadapi dinamika tugas dan tantangan ke depan.



Gambar 3.1 Struktur Organisasi Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Sulawesi I

Sumber : Permen PKP Nomor 1 Tahun 2025

The background features an abstract geometric design with various blue and gold shapes, including triangles and polygons, arranged in a dynamic, overlapping pattern. The text is centered in a bold, dark blue font.

BAB II

CAPAIAN KINERJA



BAB II CAPAIAN KINERJA

A. TARGET KINERJA TRIWULAN III BEDASARKAN DOKUMEN RENCANA AKSI KINERJA

Berdasarkan Peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I mempunyai tugas yaitu mendukung Pencapaian Rencana Strategis Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, untuk itu Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I mendukung 2 (dua) program yang melekat yaitu Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen Penyelenggaraan Perumahan melalui 4 Satker yaitu:

1. Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I;
2. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara;
3. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara;
4. Satker Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo;

Berdasarkan DIPA Awal TA. 2025 Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I memiliki amanat menjalankan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Program Dukungan Manajemen dengan detail pagu anggaran tiap unit organisasi sebagai berikut:

Tabel 2.1 : Amanat DIPA Berdasarkan DIPA Awal Tahun Anggaran 2025

No	Unit Organisasi	DIPA Awal				Jumlah
		Satker Balai	Satker PKP Provinsi Sulawesi Utara	Satker PKP Provinsi Maluku Utara	Satker PKP Provinsi Gorontalo	
1	Sekretariat Jenderal	775.170.000	1.029.771.000	561.036.000	596.153.000	2.942.130.000
2	Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman	610.426.000	15.448.099.000	16.994.002.000	14.434.535.000	47.529.062.000
3	Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan	314.556.000	140.114.138.000	16.069.470.000	117.432.000	156.615.596.000
4	Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan	1.181.222.000	1.841.886.000	8.361.148.000	508.065.000	11.892.321.000
5	Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko	303.466.000	-	-	-	303.466.000

Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I bertanggung jawab terhadap Perjanjian Kinerja (PK) pada 5 (lima) unit Organisasi diantaranya Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan dan Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko. Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan permukiman Sulawesi I, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sulawesi Utara, Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara, dan Satuan Kerja Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Gorontalo menunjukkan bahwa Balai Pelaksana Penyediaan bersama dengan Satuan Kerja memiliki tanggungjawab yang terus menerus (*in line*) dalam mencapai target Kementerian PKP.

Tabel 2.2 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kerja (PK) awal 2025
Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen Balai P3KP Sulawesi I	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	1	1	1	1

Tabel 2.3 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025
Direktorat jendral Kawasan Permukiman.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	-	-	-
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaraan Klinik Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Rusu, Peningkatan Kualitas Dan Penanganan Kumuh	Laporan	1	1	1	1

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
		Jumlah rumah Swadaya di kawasan Permukiman	Unit	-	758	330	-
3	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitas Penyiapan Lahan Dan Pemenuhan Rumah Yang Terlayani PSU Kawasan Permukiman	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan	Unit	-	-	-	430
4	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	-	-	-	18,81

Tabel 2. 4 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025
Direktorat Jenderal Kawasan Perdesaan.

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
		Jumlah Laporan Pematuan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	1	1	-	-
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Perdesaan	Jumlah Unit Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	-	287	49	-

Tabel 2. 5 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025
Direktorat Jenderal Kawasan Perkotaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
1	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi dan program, prioritas, penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
		Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan	Laporan	1	1	1	1
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
	Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	peningkatan kualitas perumahan perkotaan					
		Jumlah Rumah Swadaya perkotaan	Unit	-	52	290	-

Tabel 2. 6 : Target Pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) awal TA. 2025
Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2025			
				Balai	Sulut	Malut	Gorontalo
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomendasi Kebijakan	1	-	-	-

B. CAPAIAN TARGET TRIWULAN III

Target kinerja triwulan III mengacu pada target Perjanjian Kinerja (PK) Awal Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan dan Kawasan Permukiman Sulawesi I tahun Anggaran 2025 dan tercantum dalam Dokumen Rencana Aksi. Hal ini merupakan penjabaran dari target kinerja beberapa unit organisasi yaitu Sekretariat Jenderal, Direktorat Jenderal Kawasan Permukiman, Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan, Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan, Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

Tabel 2. 7 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan III Sekretariat Jenderal

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target Capaian TW III	Capaian TW III	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya Dukungan Manajemen	Tingkat Layanan Dukungan Manajemen	Layanan	4	0	0	0

Tabel 2. 8 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan III Dirjen Kawasan Permukiman

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target Capaian TW III	Capaian TW III	Persentase Capaian (%)
1	Terselenggaranya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Mendukung Penyediaan Rumah Layak Huni	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Kegiatan Tematik Penyelenggaraan Kawasan Permukiman Dan Akuntabilitas Kinerja	Laporan	1	0	0	0
		Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis Penyelenggaran Klinik Perumahan Dan Kawasan Permukiman	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Layak Huni Di Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Pemantauan, Evaluasi Dan Pelaporan Pembangunan Rusu, Peningkatan Kualitas Dan Penanganan Kumuh	Laporan	4	0	0	0
		Jumlah rumah Swadaya di kawasan Permukiman	Unit	1.088	0	0	0
3	Meningkatnya Perencanaan, Fasilitas Penyiapan Lahan Dan Pemenuhan Rumah Yang Terlayani PSU Kawasan Permukiman	Jumlah Pembangunan PSU Perumahan dan Kawasan	Unit	430	0	0	0
4	Meningkatnya Luasan Permukiman Kumuh Yang Ditangani Secara Terpadu	Luasan Penanganan Permukiman Kumuh	Hektar	18,81	0	0	0

Tabel 2.9 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perdesaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target Capaian TW III	Capaian TW III	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya Kinerja Keterpaduan, Kemitraan, Pemrograman, Penganggaran, Pemantauan Dan Evaluasi Dalam Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan, Strategi Dan Program Prioritas Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target Capaian TW III	Capaian TW III	Persentase Capaian (%)
		Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Laporan	2	0	0	0
2	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni Di Perdesaan	Jumlah Unit Rumah Khusus Perumahan Perdesaan	Unit	336	0	0	0

Tabel 2. 10 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan III Direktorat Jenderal Perumahan Perkotaan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target Capaian TW III	Capaian TW III	Persentase Capaian (%)
1.	Meningkatnya kinerja keterpaduan, kemitraan, pemrograman, penganggaran, pemantauan dan evaluasi dalam penyelenggaraan perumahan perkotaan	Jumlah rekomendasi kebijakan, strategi dan program, prioritas, penyelenggaraan perumahan perkotaan	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0
		Jumlah Laporan Pemantauan Dan Evaluasi Penyelenggaraan	Laporan	4	0	0	0
2.	Meningkatnya Ketersediaan Rumah Baru Layak Huni di Perkotaan	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Penyelenggaraan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0
3	Meningkatnya Penyediaan Rumah Layak Huni melalui Peningkatan Kualitas Pembangunan Perumahan di Wilayah Perkotaan	Jumlah rekomendasi kebijakan penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan perkotaan	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0
		Jumlah Rumah Swadaya perkotaan	Unit	334	0	0	0

Tabel 2. 11 : Target Dan Capaian Kinerja Fisik Triwulan III Direktorat Jenderal Tata Kelola dan Pengendalian Risiko

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Satuan	Target PK Awal	Target Capaian TW III	Capaian TW III	Persentase Capaian (%)
1	Meningkatnya dukungan kebijakan keterbukaan publik penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang efektif dan akuntabel	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Keterbukaan Publik, Transparansi dan Akuntabilitas	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0
2	Meningkatnya dukungan kebijakan pengendalian risiko dan pencegahan korupsi penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman	Jumlah Rekomendasi Kebijakan Pengendalian Risiko dan Pencegahan Korupsi	Rekomen dari Kebijakan	1	0	0	0

C. PERMASALAHAN/ POTENSI CAPAIAN TRIWULAN

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan pasti ada terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang terjadi dan hal tersebut perlu untuk segera ditindaklanjuti supaya kinerja pelaksanaan program dan kegiatan tersebut dapat berjalan dengan baik dan lancar. Untuk pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I sampai dengan berakhirnya Triwulan III. Untuk menjelaskan kendala dan permasalahan apa saja yang terjadi, maka selanjutnya akan dijelaskan mengenai kendala yang terjadi pada Triwulan III tahun anggaran 2025 yang telah dilaksanakan kegiatannya.

The background features abstract geometric shapes in dark blue and gold, primarily located in the top-left and bottom-right corners. The central area is a solid light beige color where the text is placed.

BAB III

PENUTUP



BAB III

PENUTUP

A. RENCANA TINDAK LANJUT

Laporan Triwulan III pada Balai Pelaksana Penyediaan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Sulawesi I tahun anggaran 2025 ini disusun sebagai salah satu wujud pertanggungjawaban untuk melihat sejauh mana perkembangan terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang telah dilaksanakan. Laporan Triwulan III ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana realisasi capaian yang telah direncanakan dapat berjalan sesuai rencana dan kendala/permasalahan apa saja yang menyebabkan penyerapan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan tidak berjalan sesuai dengan target yang direncanakan. Dari Laporan Triwulan III ini dapat dilihat dengan jelas secara keseluruhan hasil dari realisasi yang telah dicapai dan kegiatan apa saja yang dalam pelaksanaannya berjalan sesuai target rencana dan yang belum sesuai dengan target yang direncanakan, sehingga nantinya akan diketahui kendala atau permasalahan apa saja yang dihadapi dan akan dicari Solusi permasalahannya. Pada triwulan berikutnya, diharapkan semua kegiatan yang terkendala tersebut dapat diatasi dalam pelaksanaan kegiatannya dan dapat terealisasi sesuai target yang direncanakan, sehingga anggaran dapat terserap dengan baik dan kemudian hasil dari pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilaporkan sebagai bahan untuk evaluasi pada triwulan berikutnya.

LAMPIRAN

Tabel Permasalahan Dan Tindak Lanjut Triwulan III

Triwulan Sebelumnya (TW-1)				Triwulan III		
No	Permasalahan	Rencana Tindak lanjut	Bukti Tindak lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW + 1)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pada awal bulan Mei 2025 masih dalam tahap proses penyesuaian anggaran. Jadi, pada bulan Mei 2025 masih belum ada serapan anggaran, tetapi untuk pelaksanaan kegiatan, terutama kegiatan rutin kantor dan pelayanan keprotokolan serta komunikasi berjalan seperti biasa sambil menunggu proses penyesuaian anggaran selesai.	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua pihak yang terkait, dengan harapan kegiatan rutin kantor dan pelayanan keprotokolan serta komunikasi berjalan sesuai dengan rencana.		1	Proses Penghunian Huntap.	Balai BP3KP akan melakukan berkoordinasi dengan Pemda Provinsi Sulawesi Utara, Pemda Kab.Bolsel dan Kab. Kepl. Sitaro dalam Rangka Percepatan Penghunian dan Relokasi Korban Tedampak Bencana Erupsi Gunung Ruang dari Huntara yang berada di Kota Bitung Ke Hunta Kab. Bolaang Mongondow Selatan.
2	Kendala Administrasi. Selain proses penyesuaian anggaran, kendala lainnya adalah pada proses administrasi, terutama administrasi keuangan, khususnya pada bulan Januari 2025, administrasi keuangan	Untuk triwulan berikutnya, akan lebih difokuskan untuk meningkatkan kinerja supaya kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar, dan adanya komitmen dan kerjasama baik dan kuat dari semua pihak yang terkait, dengan harapan agar		2	Proses Serah Terima Aset ke pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara, Pemerintah Daerah Kab. Kepl. Sitaro, Pemerintah Daerah Kab. Bolaang Mongondow Selatan.	Balai Melakukan Kordinasi dengan Pemerintah Provinsi terkait Serah Terima Aset dan Pembentukan Kelembagaan Unit Pengelola Huntap.

Triwulan Sebelumnya (TW-1)				Triwulan III		
No	Permasalahan	Rencana Tindak lanjut	Bukti Tindak lanjut	No	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut (TW + 1)
(1)			(2)	(3)	(4)	(5)
	juga terkendala, karena kegiatan atau pekerjaan belum bisa optimal dilaksanakan, terutama penyerapan anggaran keuangan. memasuki bulan Februari dan Maret 2025, penyerapan anggaran mulai bisa terlaksana dan kegiatan atau pekerjaan yang dilaksanakan bisa direncanakan per Triwulannya dengan menyesuaikan pada anggaran yang telah disahkan/ditetapkan.	tujuan penyerapan anggaran dapat terealisasi sesuai dengan rencana yang sudah di susun.				

PROFIL KEGIATAN BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I

Status Update: 30 September 2025



OUTLINE

1 PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA

2 PROGRES SATKER BP3PKP SULAWESI I

3 PENDAMPINGAN CSR

4 PENDAMPINGAN RKP3KP DAN RP2KPKPK

5 LAPORAN PROGRES SATKER PKP SULUT

6 LAPORAN PROGRES SATKER PKP GORONTALO

7 LAPORAN PROGRES SATKER PKP MALUT



PROFIL SUMBER DAYA MANUSIA BP3KP SULAWESI I



TAHUN ANGGARAN 2025

SEBARAN SDM BP3KP SULAWESI I

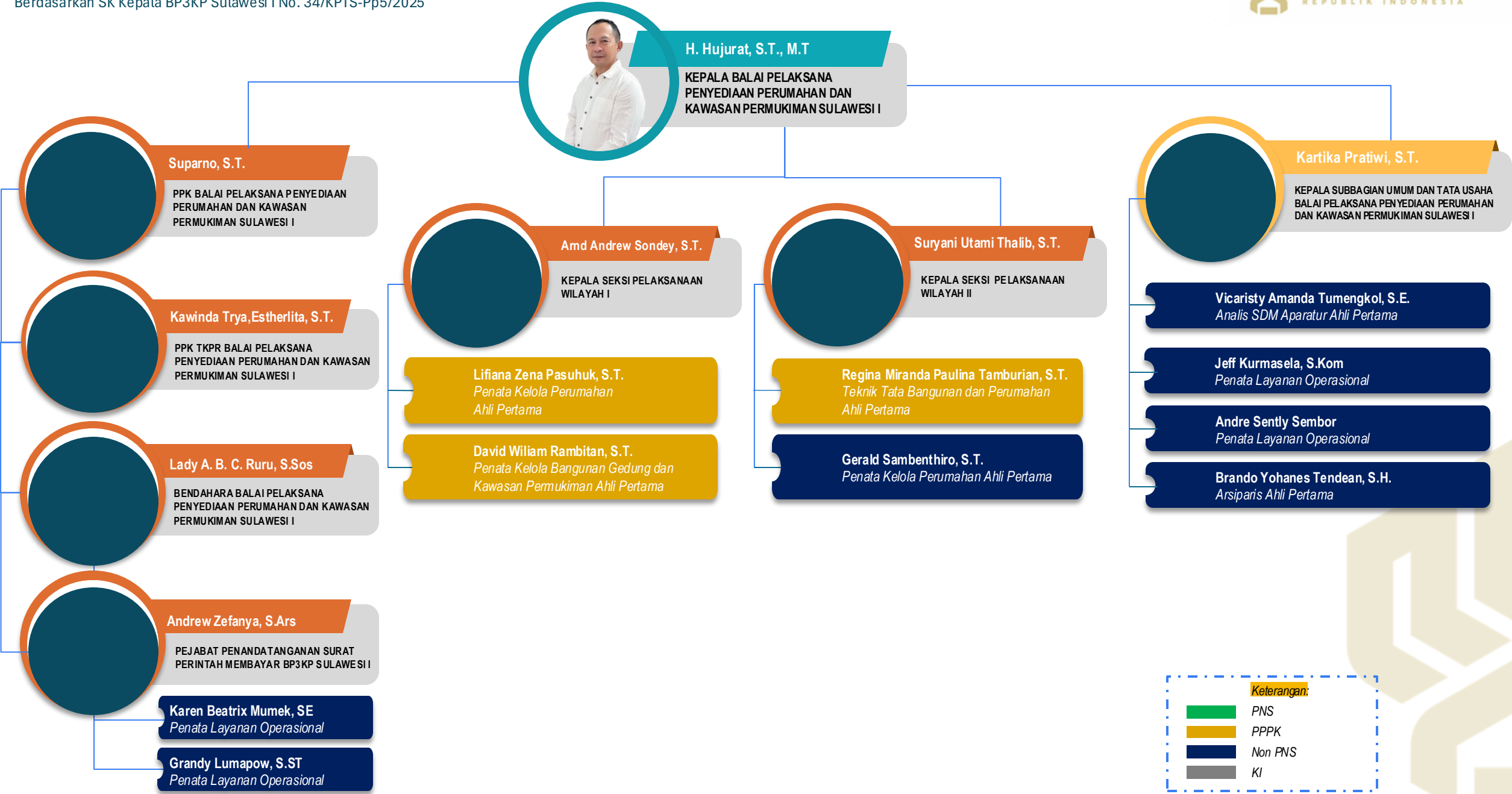
KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BP3KP SULAWESI I	SATKER SULUT	SATKER GORONTALO	SATKER MALUT
8 PNS	6 PNS	5 PNS	6 PNS
3 PPPK	4 PPPK	2 PPPK	1 PPPK
7 NRP	4 NRP	8 NRP	11 NRP
8 CPNS	7 CPNS	7 CPNS	7 CPNS
total 26 pegawai	total 21 pegawai	total 22 pegawai	total 25 pegawai

jumlah pegawai = 94 org

STRUKTUR ORGANISASI BP3KP SULAWESI I

Berdasarkan SK Kepala BP3KP Sulawesi I No. 34/KPTS-Pp5/2025

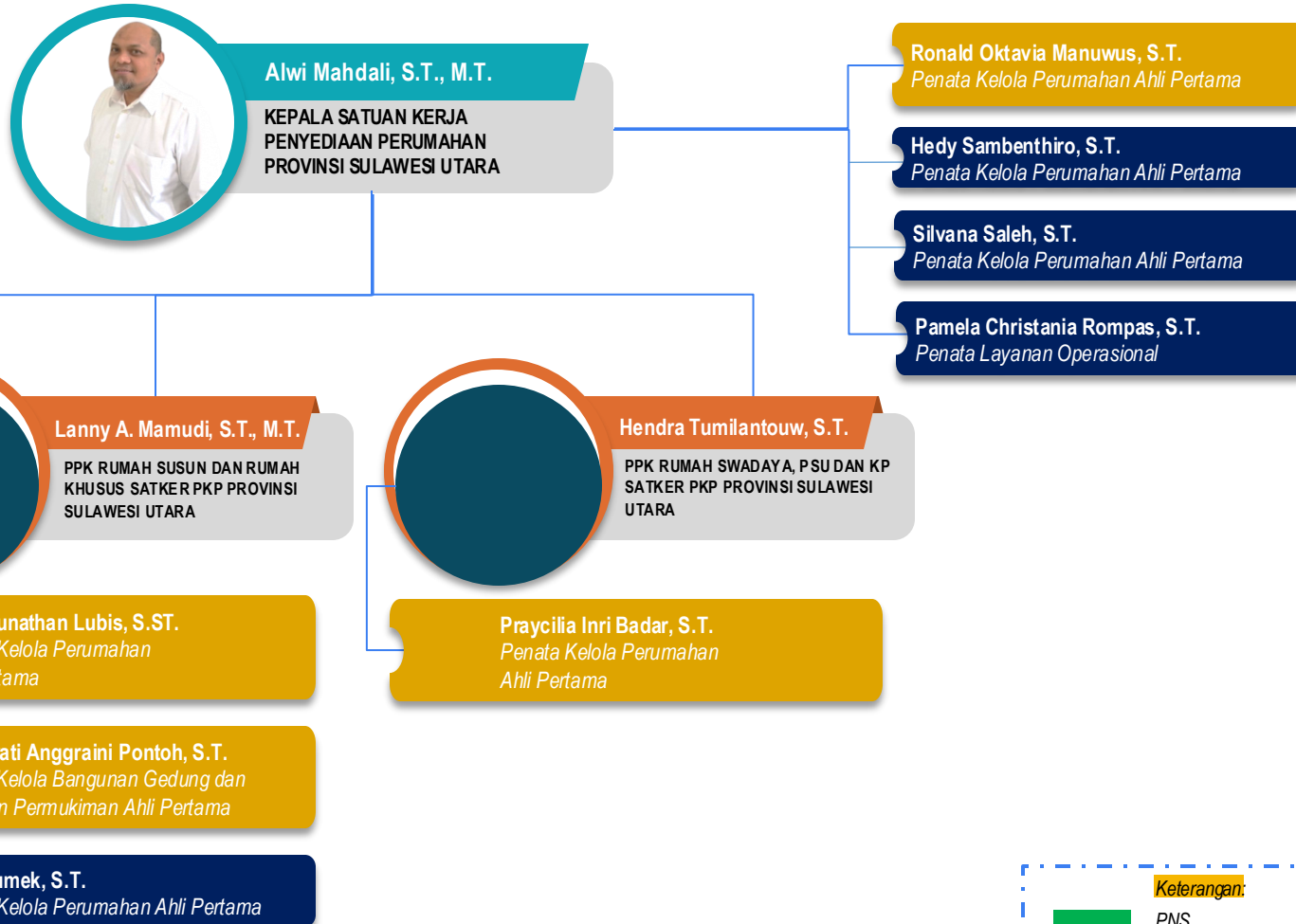


STRUKTUR ORGANISASI BP3KP SULAWESI I

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN

SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI SULAWESI UTARA

Berdasarkan SK Kepala BP3KP Sulawesi I No. 34/KPTS-Pp5/2025



Keterangan:

-  PNS
-  PPPK
-  Non PNS
-  KI

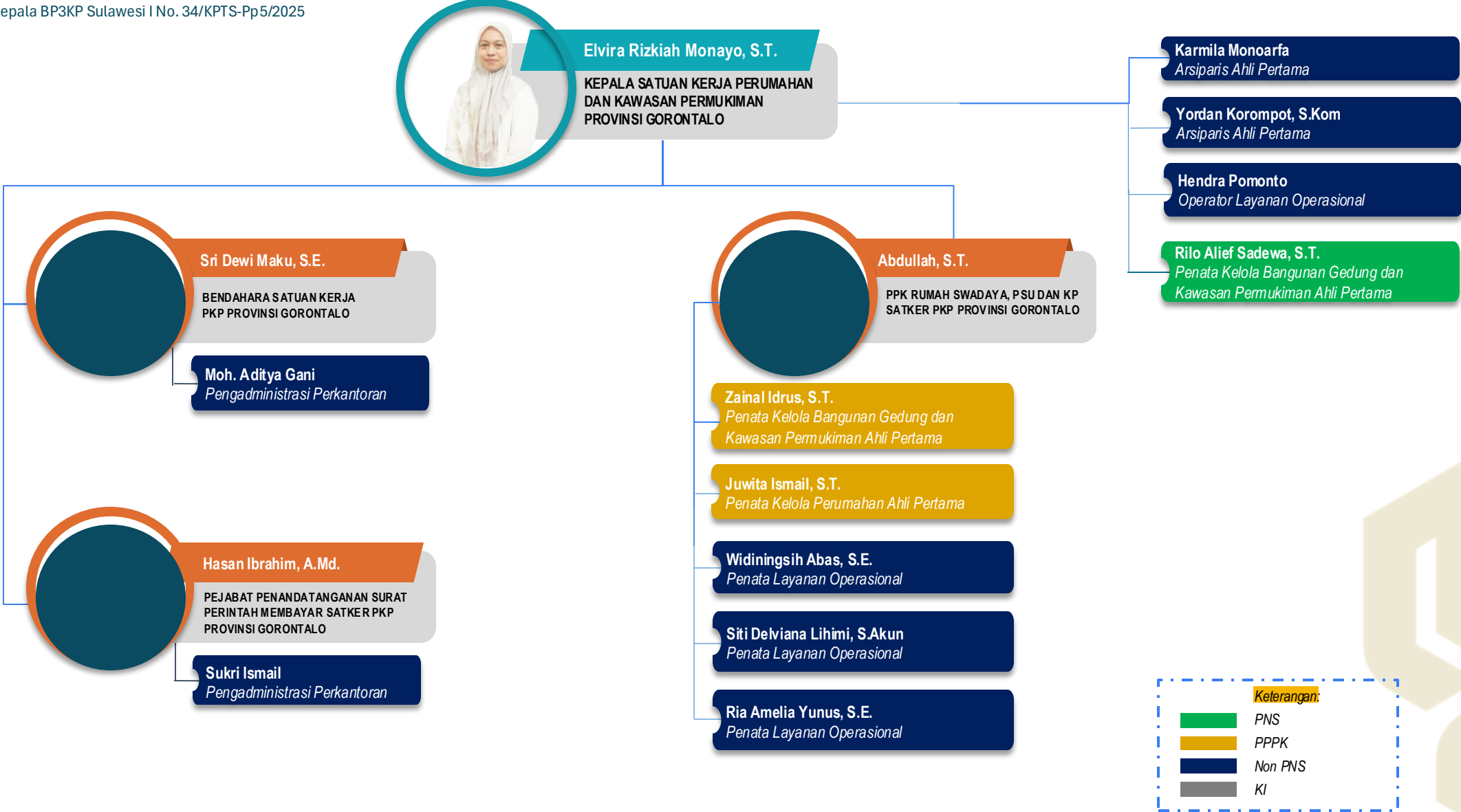
STRUKTUR ORGANISASI BP3KP SULAWESI I

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI GORONTALO

Berdasarkan SK Kepala BP3KP Sulawesi I No. 34/KPTS-Pp5/2025



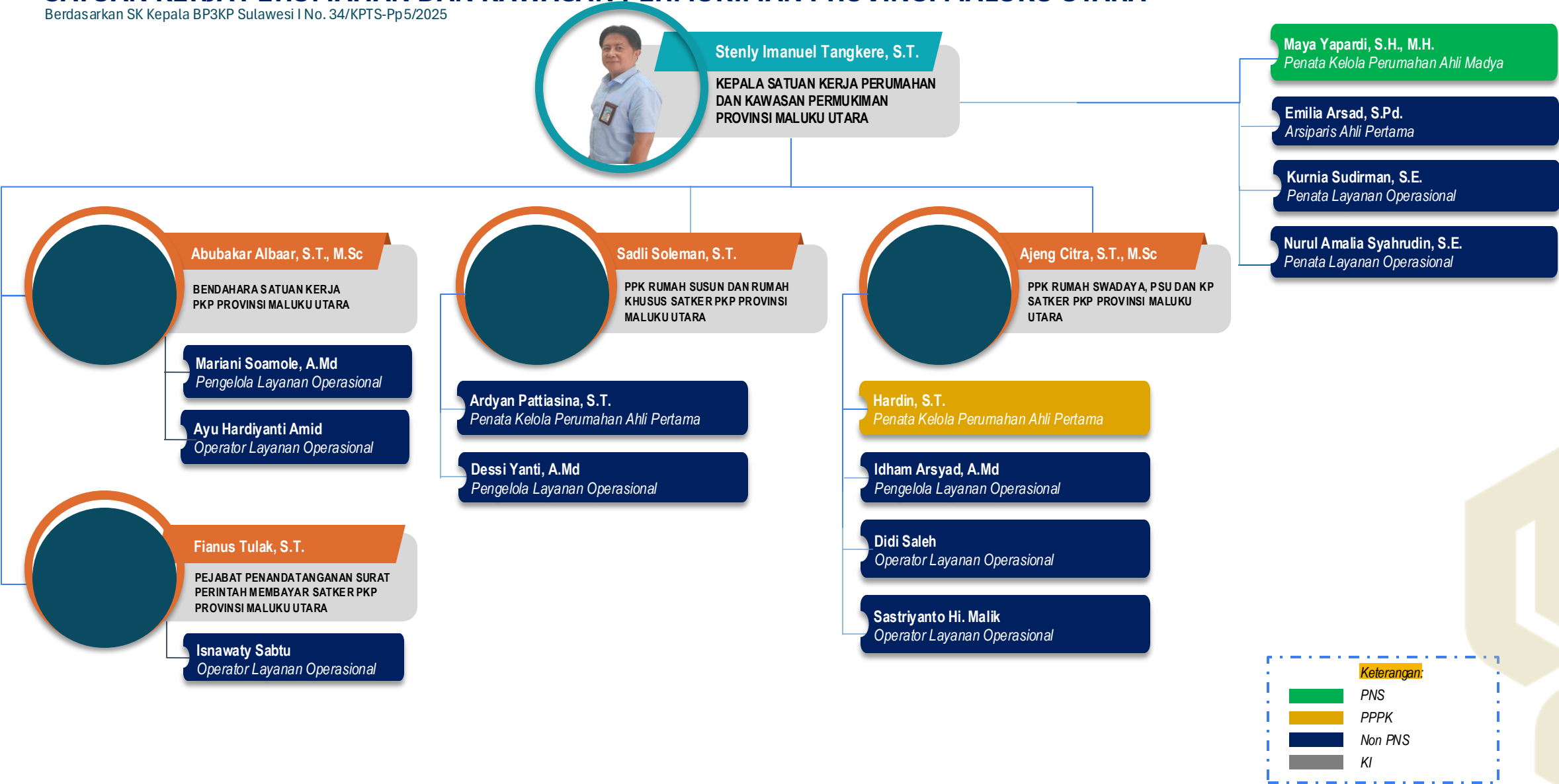
STRUKTUR ORGANISASI BP3KP SULAWESI I

KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN



SATUAN KERJA PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN PROVINSI MALUKU UTARA

Berdasarkan SK Kepala BP3KP Sulawesi I No. 34/KPTS-Pp5/2025



PROGRES ANGGARAN BALAI P3KP SULAWESI I



TAHUN ANGGARAN 2025

Status : 24 September 2025

PROGRES ANGGARAN BALAI P3KP SULAWESI I

TA. 2025

NO	SATUAN KERJA	DIPA UNIT	PAGU	JUMLAH DIPA	KEUANGAN		FISIK	
					RENCANA (%)	REALISASI (%)	RENCA NA (%)	REALISA SI (%)
1	BP3KP SULAWESI I	SEKJEN	755,170,000.00	1	60.48	35.29	-	-
2	SATKER PKP PROV. SULUT	SEKJEN	1,029,771,000.00	1	31.12	34.70	-	-
3	SATKER PKP PROV. GORONTALO	SEKJEN	596,153,000.00	1	50.33	43.24	-	-
4	SATKER PKP PROV. MALUT	SEKJEN	561,036,000.00	1	40.20	29.10	-	-
5	BP3KP SULAWESI I	KP	610,426,000.00	1	50.50	16.82	-	-
6	SATKER PKP PROV. SULUT	KP	15,448,099,000.00	1	0.68	0.68	0.68	0.68
7	SATKER PKP PROV. GORONTALO	KP	14,435,535,000.00	1	1.38	1.41	-	-
8	SATKER PKP PROV. MALUT	KP	16,885,272,360.00	1	35.22	9.80	-	-
9	BP3KP SULAWESI I	DESA	314,556,000.00	1	36.56	17.31	-	-
10	SATKER PKP PROV. SULUT	DESA	140,114,138,000.00	1	77.76	67.78	95.00	95.00
11	SATKER PKP PROV. GORONTALO	DESA	117,423,000.00	1	-	-	-	-
12	SATKER PKP PROV. MALUT	DESA	16,069,470,000.00	1	0.12	0.29	-	-
13	BP3KP SULAWESI I	KOTA	1,181,222,000.00	1	36.24	3.40	-	-
14	SATKER PKP PROV. SULUT	KOTA	1,841,886,000.00	1	4.92	4.92	4.92	4.92
15	SATKER PKP PROV. GORONTALO	KOTA	8,361,148,000.00	1	4.21	4.21	-	-
16	SATKER PKP PROV. MALUT	KOTA	508,065,000.00	1	3.79	1.42	-	-
17	BP3KP SULAWESI I	TKPR	303,466,000.00	1	38.28	22.18	-	-
TOTAL / RATA-RATA			219,132,836,360.00		53.83	45.08		

PELAKSANAAN ANGGARAN DAN PROGNOSIS

PER DIPA BP3KP SULAWESI I 2025



NO	SATUAN KERJA	DIPA UNIT	PAGU (Rp)	SEPTEMBER		OKTOBER		NOVEMBER		DESEMBER	
				KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK	KEUANGAN	FISIK
1	BP3KP SULAWESI I	SEKJEN	755,170,000	60.48	-	72.48	-	90.48	-	100.00	-
2	SATKER PKP PROV. SULUT	SEKJEN	1,029,771,000	31.12	-	47.52	-	60.11	-	100.00	-
3	SATKER PKP PROV. GORONTALO	SEKJEN	596,153,000	50.33	-	67.65	-	96.52	-	100.00	-
4	SATKER PKP PROV. MALUT	SEKJEN	561,036,000	40.20	-	55.10	-	70.15	-	100.00	-
5	BP3KP SULAWESI I	KP	610,426,000	50.50	-	73.95	-	88.95	-	100.00	-
6	SATKER PKP PROV. SULUT	KP	15,448,099,000	0.68	0.68	48.21	48.21	97.12	97.12	100.00	100.00
7	SATKER PKP PROV. GORONTALO	KP	14,435,535,000	1.38	-	75.39	-	90.39	-	100.00	100.00
8	SATKER PKP PROV. MALUT	KP	16,885,272,360	35.22	-	54.88	100.00	81.17	100.00	100.00	100.00
9	BP3KP SULAWESI I	DESA	314,556,000	36.56	-	60.56	-	84.56	-	100.00	-
10	SATKER PKP PROV. SULUT	DESA	140,114,138,000	77.76	95.00	77.76	100.00	90.12	100.00	100.00	100.00
11	SATKER PKP PROV. GORONTALO	DESA	117,423,000	-	-	52.29	-	89.59	-	100.00	-
12	SATKER PKP PROV. MALUT	DESA	16,069,470,000	0.12	100.00	99.56	100.00	99.78	100.00	100.00	100.00
13	BP3KP SULAWESI I	KOTA	1,181,222,000	36.24	-	57.24	-	84.90	-	100.00	-
14	SATKER PKP PROV. SULUT	KOTA	1,841,886,000	4.92	4.92	60.73	60.73	91.30	91.30	100.00	100.00
15	SATKER PKP PROV. GORONTALO	KOTA	8,361,148,000	4.21	-	23.18	-	61.03	-	100.00	-
16	SATKER PKP PROV. MALUT	KOTA	508,065,000	3.79	-	91.59	100.00	96.31	100.00	100.00	100.00
17	BP3KP SULAWESI I	TKPR	303,466,000	38.28	-	63.28	-	93.28	-	100.00	-
TOTAL			219,132,836,360								

PROGRES KEUANGAN DAN FISIK SATKER BALAI P3KP SULAWESI I

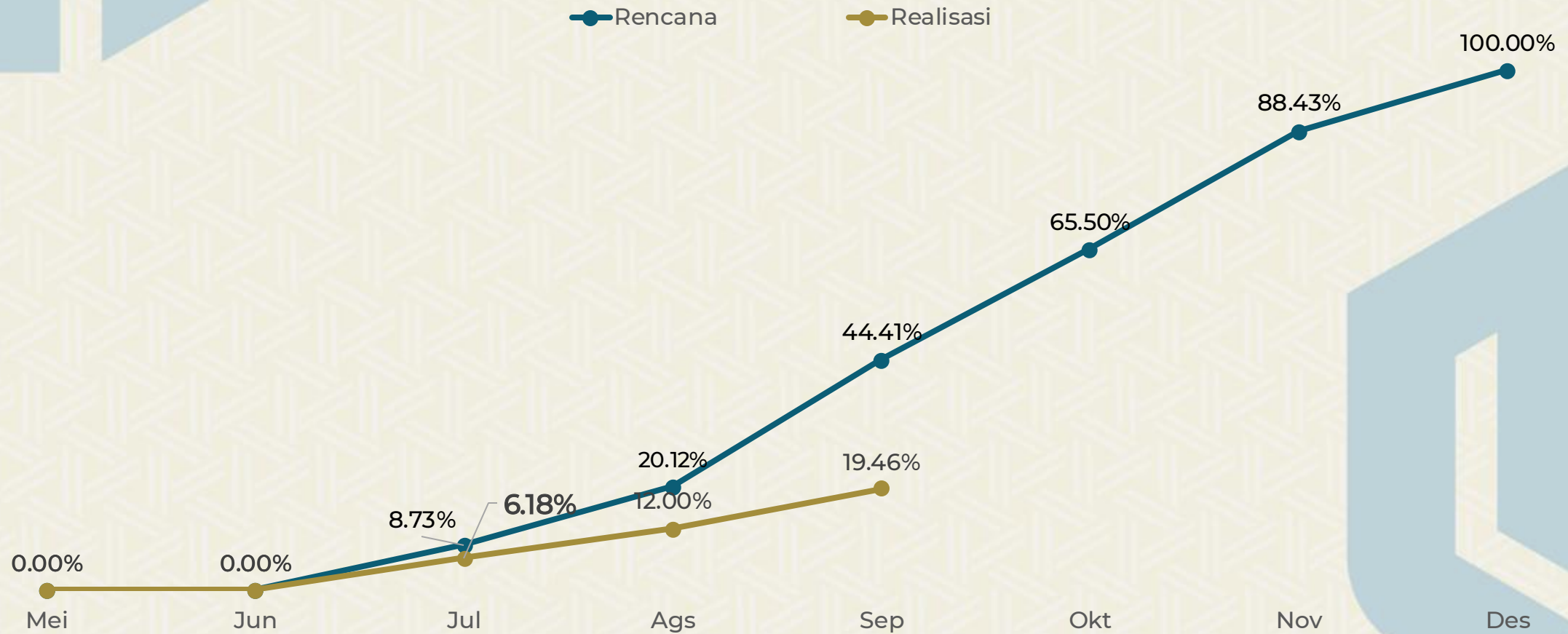


TAHUN ANGGARAN 2025

Status : 24 September 2025

RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK (AKUMULASI 5 DIPA) TA 2025

RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN

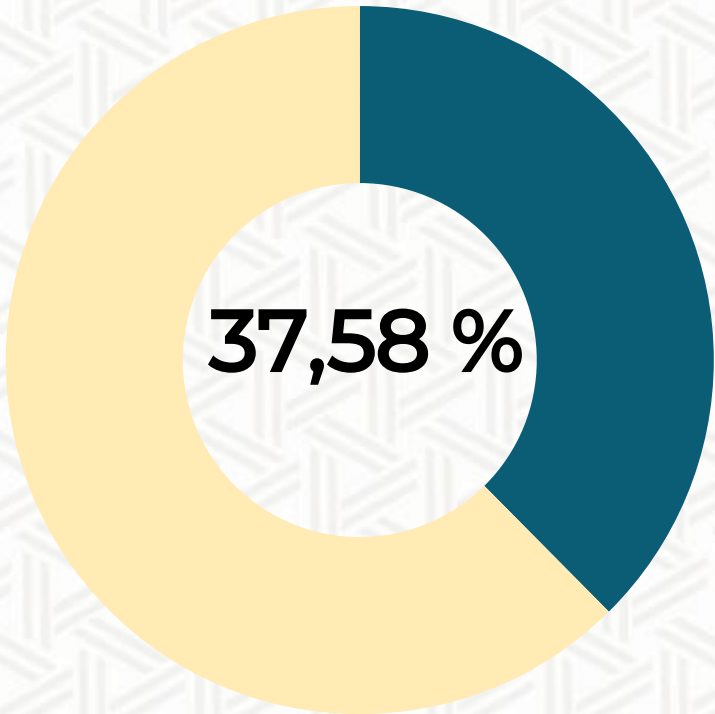


PROGRES KEUANGAN SATKER BP3KP SULAWESI I



SEKRETARIAT JENDERAL
691417

Pagu : Rp. 755.170.000
Realisasi : Rp. 283.800.942



DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
EBA.994.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor BP3KP Sulawesi I	Rp. 144.567.716	40,82%
EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	Rp. 17.153.670	23,82%
EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Rp. 44.879.556	24,18%
EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp.77.200.000	53,81%

PROGRES KEUANGAN SATKER BP3KP SULAWESI I

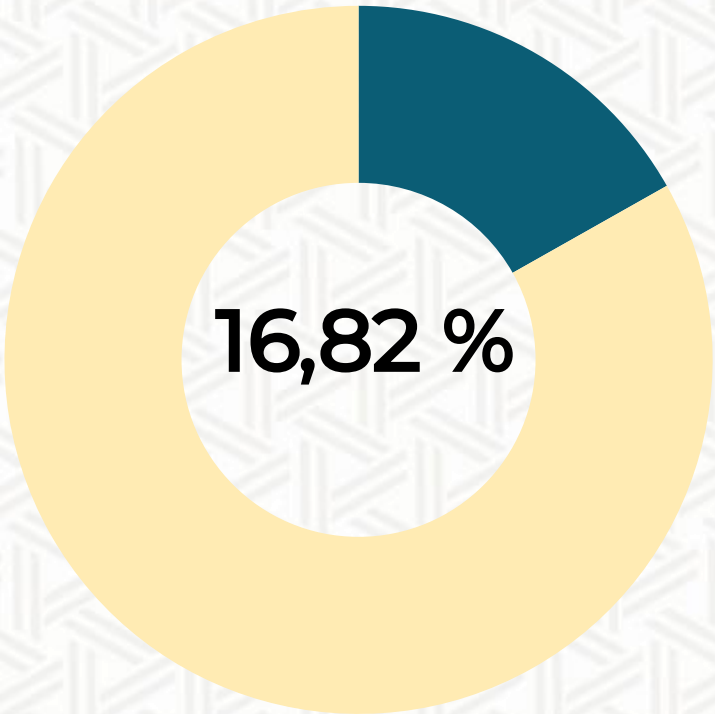


DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN
691471

Pagu : Rp. 610.426.000
Realisasi : Rp. 102.675.989

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
FAE.001.100.A	Pemantauan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman BP3KP Sul I	Rp. 43.377.349	22,21%
FAE.003.100.A	Pemantauan dan Evaluasi Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Rp. 45.798.640	12,54%
PBF.001.100.A	Penyelenggaraan Klinik Perumahan dan Kawasan Permukiman	Rp. 13.500.000	27%



PROGRES KEUANGAN SATKER BP3KP SULAWESI I

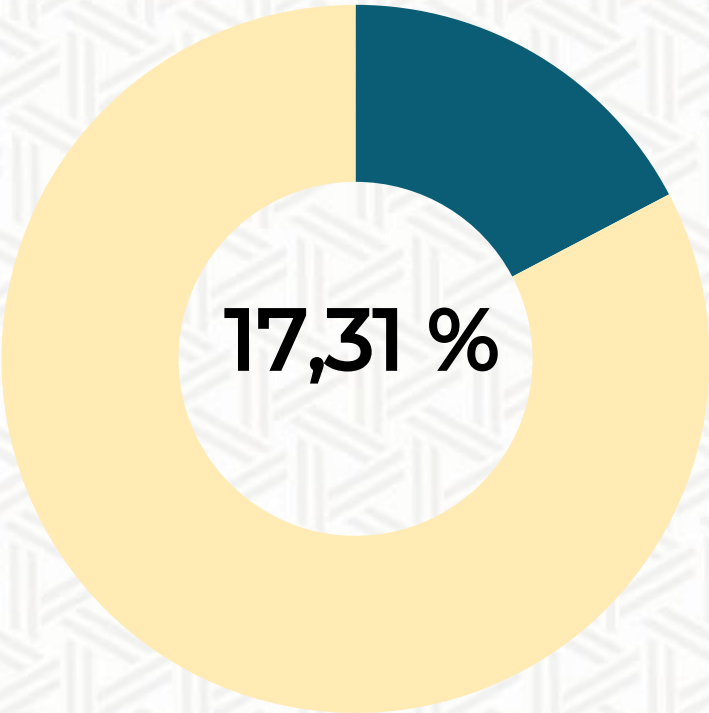


DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERDESAAN
691525

Pagu : Rp. 314.556.000
Realisasi : Rp. 54.449.534

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	DETIL	NILAI REALISASI
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Perjalanan Dinas Koordinasi dan Pemantauan Pembangunan Huntap Bolsel dan Kota Ternate	Rp. 54.449.534



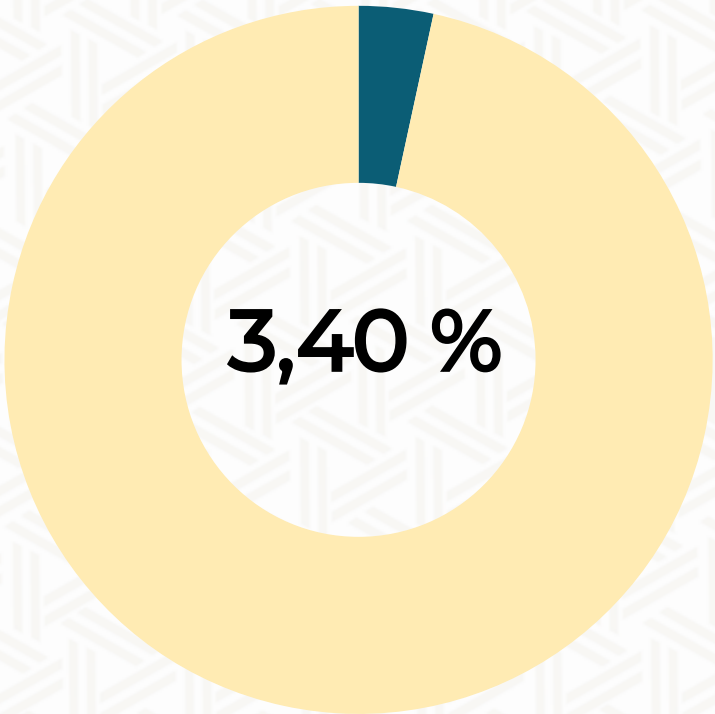
PROGRES KEUANGAN SATKER BP3KP SULAWESI I

DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERKOTAAN
691579

Pagu : Rp. 1.181.222.000
Realisasi : Rp. 40.139.305

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

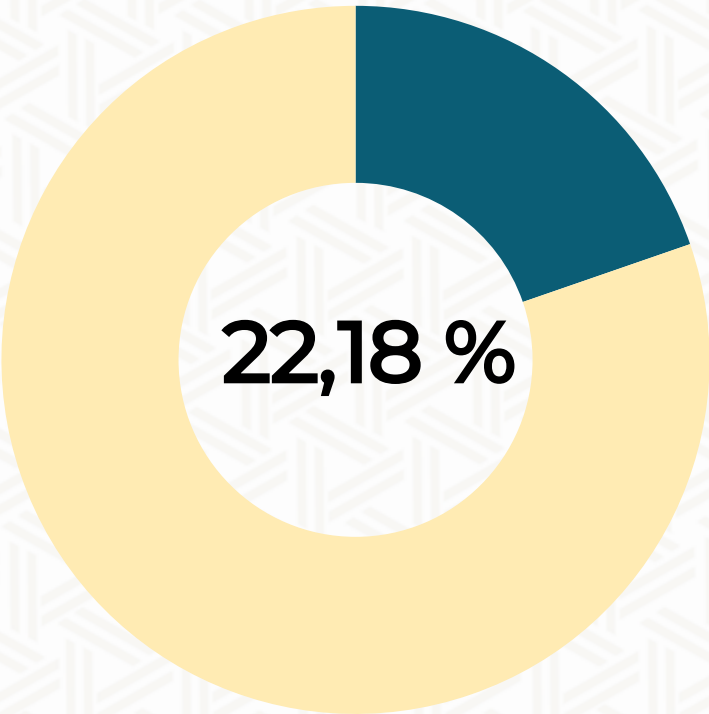
KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
ABF.001.100.A	Sinkronisasi dan Koordinasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan Pusat dan Daerah	Rp. 11.353.920	2,88%
ABF.004.100.A	Verifikasi Bantuan Pembangunan Perumahan Perkotaan	Rp. 0	0%
ABF.005.100.A	Verifikasi Bantuan Peningkatan Kualitas Perumahan Perkotaan	Rp. 8.448.860	2,70%
FAE.001.100.A	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp. 20.336.525	6,71%



PROGRES KEUANGAN SATKER BP3KP SULAWESI I

DIREKTORAT JENDERAL
TATA KELOLA DAN PENGELOLAAN RISIKO
691608

Pagu : Rp. 303.466.000
Realisasi : Rp. 67.307.260



DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
ABF.004.100.D	Pembangunan Zona Integritas BP3KP Sulawesi I	Rp. 38.224.950	29,58%
ABF.005.100.A	Penerapan Manajemen Risiko	Rp. 29.082.310	16,69%

PROGRES KEGIATAN VERIFIKASI PROGRAM PKP PENINGKATAN KUALITAS RUMAH SWADAYA



TAHUN ANGGARAN 2025



SULAWESI UTARA



MALUKU UTARA



SEBARAN USULAN BSPS TAHUN 2025

SESUAI INSTRUKSI VERIFIKASI
NO. RU 1003 – Pw/184
Tanggal 5 Agustus 2025

PROVINSI	UNIT	VERIFIKASI	BA HASIL VERIFIKASI
SULAWESI UTARA	695	Verifikasi dilakukan 11 – 27 Agustus 2025	BA dikirim pada tanggal 28 Agustus 2025
MALUKU UTARA	384	Verifikasi dilakukan 11 – 27 Agustus 2025	BA dikirim pada tanggal 1 September 2025



SULAWESI UTARA



MALUKU UTARA



SEBARAN USULAN BSPS PERKOTAAN TA 2025

SESUAI INSTRUKSI VERIFIKASI
NO. RU 1002 – Dk/216
Tanggal 8 Agustus 2025

PROVINSI	UNIT	STATUS VERIFIKASI	BA HASIL VERIFIKASI
SULAWESI UTARA	53	Selesai dilaksanakan	BA dikirim pada tanggal 8 September 2025
MALUKU UTARA	290	Dalam Tahap Verifikasi Ulang	Target: disampaikan pada 30 September 2025

REKAP HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN BSPS

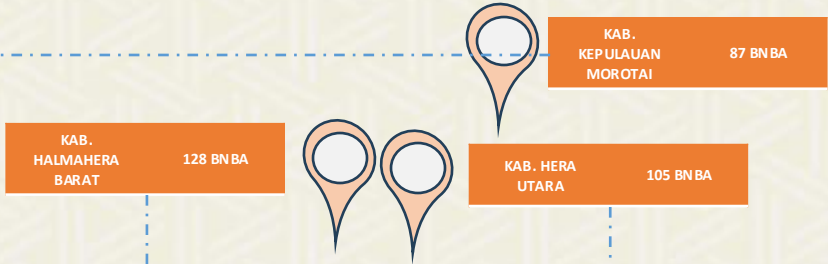
MALUKU UTARA

KABUPATEN	LOLOS	TIDAK LOLOS/PENGGANTI
KAB. KEPULAUAN MOROTAI	66 UNIT	21 UNIT

KABUPATEN	LOLOS	TIDAK LOLOS/PENGGANTI
KAB. HALMAHERA BARAT	108 UNIT	20 UNIT

KABUPATEN	LOLOS	TIDAK LOLOS/PENGGANTI
KAB. HALMAHERA UTARA	56 UNIT	49 UNIT

KABUPATEN	LOLOS	TIDAK LOLOS/PENGGANTI
KAB. KEPULAUAN SULA	37 UNIT	27 UNIT

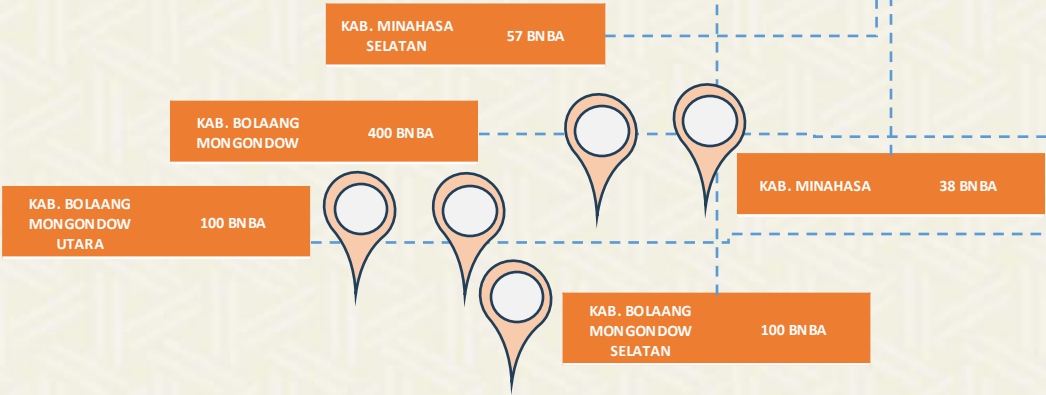


MALUKU UTARA
TOTAL 384 UNIT
LOLOS 267 UNIT
TIDAK LOLOS/PENGGANTI 117 UNIT

SULAWESI UTARA
TOTAL 695 UNIT

LOLOS 435 UNIT

TIDAK LOLOS/PENGGANTI 260 UNIT



SULAWESI UTARA

KABUPATEN	LOLOS	TIDAK LOLOS/PENGGANTI
KAB. MINAHASA	-	38
KABUPATEN	LOLOS	TIDAK LOLOS/PENGGANTI
KAB. MINAHASA SELATAN	33	24
KABUPATEN	LOLOS	TIDAK LOLOS/PENGGANTI
KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN	67	33
KABUPATEN	LOLOS	TIDAK LOLOS/PENGGANTI
KAB. BOLAANG MONGONDOW	278	122
KABUPATEN	LOLOS	TIDAK LOLOS/PENGGANTI
KAB. BOLAANG MONGONDOW UTARA	57	43

REKAP HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN BSPS

MALUKU UTARA

KOTA	ALOKASI CPB
TERNATE	126 UNIT

KOTA	ALOKASI CPB
TIDORE KEPULAUAN	164 UNIT

MALUKU UTARA TOTAL 290 CPB

KOTA	LOLOS	PENGGANTI	TOTAL
TERNATE	57	69	126
TIDORE KEPL	162	2	164
TOTAL			290

REKAP HASIL VERIFIKASI CALON PENERIMA BANTUAN BSPS

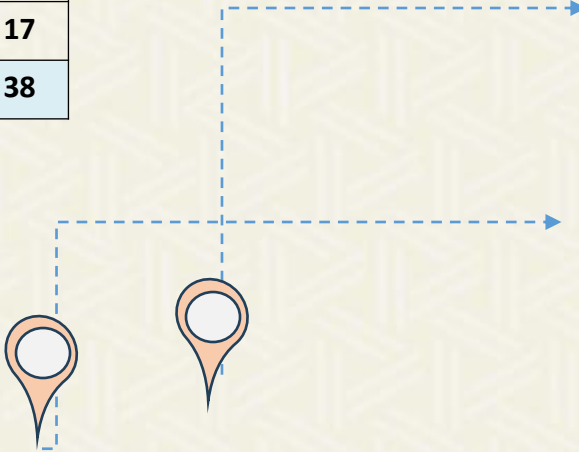
SULAWESI UTARA TOTAL 53 UNIT

NO	KABUPATEN/KOTA	CPB (UNIT)	HASIL VERIFIKASI		
			LOLOS	TIDAK LOLOS	CPB PENGGA NTI
1.	KOTA MANADO	33	12	21	21
2.	KOTA BITUNG	20	3	17	17
TOTAL BANTUAN		53	15	38	38

SULAWESI UTARA

KOTA	ALOKASI CPB
BITUNG	20

KOTA	ALOKASI CPB
MANADO	33



DOKUMENTASI VERIFIKASI CPB DELINEASI PESISIR



DOKUMENTASI

VERIFIKASI CPB DELINEASI PESISIR

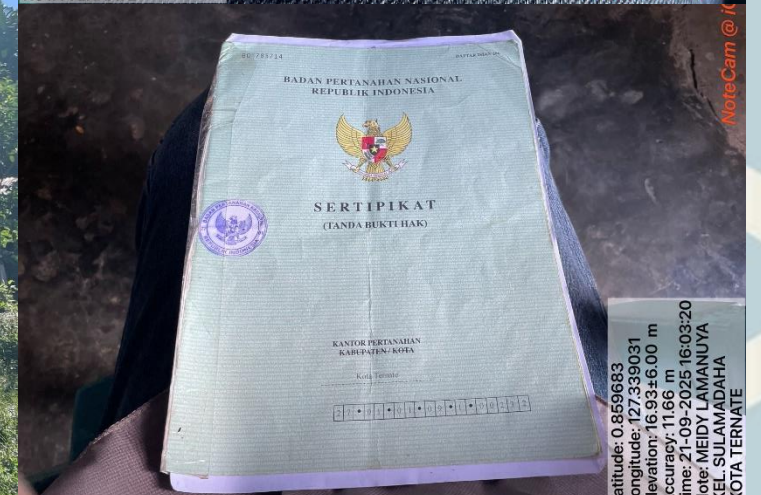


DOKUMENTASI

VERIFIKASI CPB DELINEASI PERKOTAAN

VERIFIKASI CPB PROV. MALUKU UTARA

LOKASI : KOTA TERNATE
KELURAHAN SULAMADAH



**LOKASI : KOTA MANADO
KELURAHAN KOMBOS BARAT**

4
E
N
n
h
at
3





KARTU KELUARGA

No. 717031812070372

Nama Kepala Keluarga
LAUREN FERRY MUOMAT

Alamat
LUNGKONGANI I - 201

Kabupaten/Kota
Sulawesi Utara

Desa/Kelurahan
SINGGOL

Kecamatan
Kota Manado

Provinsi
SULAWESI UTARA

KEMBARA BARAT
SINGGOL

KOTA MANADO
SULAWESI UTARA

No	Nama Lengkap	NIR	Jenis Kelamin	Tanggal Lahir	Tanggal Masuk	Agama	Pendidikan	Jenis Pekerjaan	Golongan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	LAUREN FERRY MUOMAT	7170102280001	Laki-laki	14-08-1988	14-08-1988	Protestan	SLTP	Manajemen	1
2.	DEWITA MUOMAT	7170302080001	Perempuan	14-08-1988	14-08-1988	Protestan	SLTP	Manajemen	2
3.	IRENETHY KATRINA BRILA MUOMAT	7170308020002	Perempuan	14-08-1988	14-08-1988	Protestan	SLTP	Manajemen	3
4.									
5.									
6.									
7.									
8.									
9.									
10.									

No

Status Perkawinan

Tanggal Perkawinan

Daftar Keluarga

Kewarganegaraan

Daftar Pengantar

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

Nama Orang Tua

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

No

Status Perkawinan

Tanggal Perkawinan

Daftar Keluarga

Kewarganegaraan

Daftar Pengantar

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

Nama Orang Tua

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

No

Status Perkawinan

Tanggal Perkawinan

Daftar Keluarga

Kewarganegaraan

Daftar Pengantar

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

Nama Orang Tua

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

No

Status Perkawinan

Tanggal Perkawinan

Daftar Keluarga

Kewarganegaraan

Daftar Pengantar

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

Nama Orang Tua

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

No

Status Perkawinan

Tanggal Perkawinan

Daftar Keluarga

Kewarganegaraan

Daftar Pengantar

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

Nama Orang Tua

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

No

Status Perkawinan

Tanggal Perkawinan

Daftar Keluarga

Kewarganegaraan

Daftar Pengantar

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

Nama Orang Tua

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

No

Status Perkawinan

Tanggal Perkawinan

Daftar Keluarga

Kewarganegaraan

Daftar Pengantar

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

Nama Orang Tua

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

No

Status Perkawinan

Tanggal Perkawinan

Daftar Keluarga

Kewarganegaraan

Daftar Pengantar

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

Nama Orang Tua

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

No

Status Perkawinan

Tanggal Perkawinan

Daftar Keluarga

Kewarganegaraan

Daftar Pengantar

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

Nama Orang Tua

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

No

Status Perkawinan

Tanggal Perkawinan

Daftar Keluarga

Kewarganegaraan

Daftar Pengantar

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

Nama Orang Tua

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

No

Status Perkawinan

Tanggal Perkawinan

Daftar Keluarga

Kewarganegaraan

Daftar Pengantar

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

Nama Orang Tua

Daftar Pengantar

No. Paspor

Daftar Pengantar

No

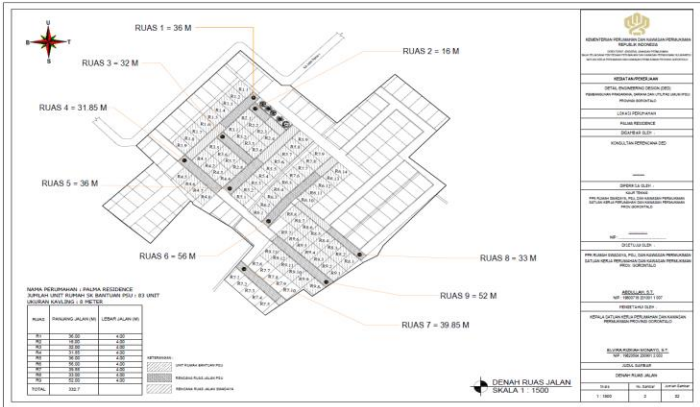
Status Perkawinan

Tanggal Perkawinan

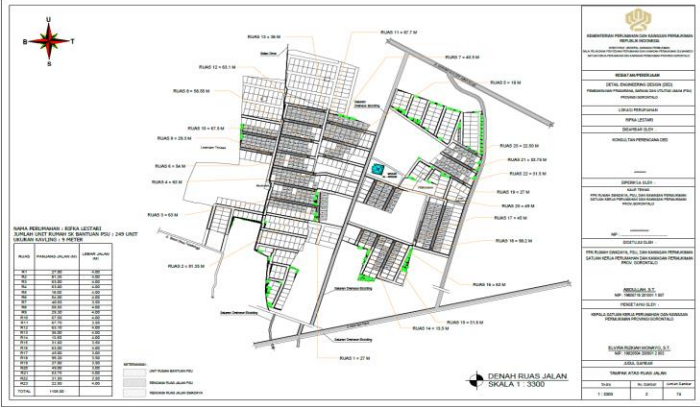
Daftar Keluarga

SEBARAN BANTUAN PSU BALAI P3KP SULAWESI I

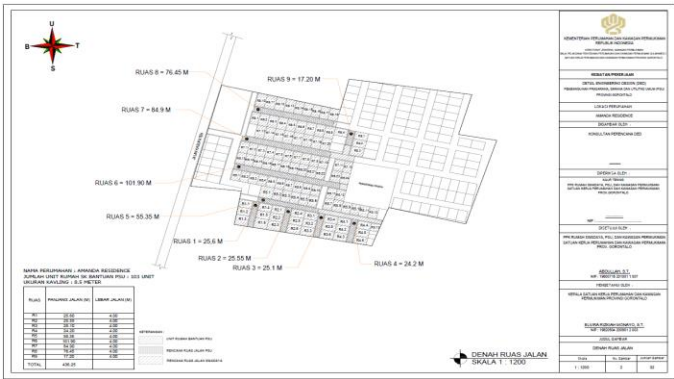
PSU PERUMAHAN MBR PALMA RESIDENCE KOTA GORONTALO = 83 UNIT



PSU PERUMAHAN MBR RIFKA LESTARI KABUPATEN GORONTALO = 253 UNIT

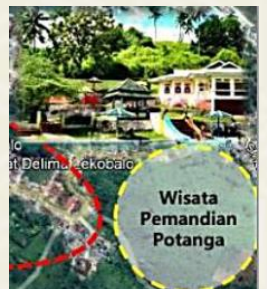


PSU PERUMAHAN MBR AMANDA RESIDENCE KABUPATEN GORONTALO = 103 UNIT



Kawasan Lekobalo

Jl. Usman Isa, Kelurahan Lekobalo, Kota Barat, Kota Gorontalo



Arah Kota Gorontalo

Jalan Utama, Jl. Usman Isa, Kelurahan Lekobalo, Kota Barat, Kota Gorontalo.

Arah Kab. Gorontalo

Kawasan Lekobalo berada pada posisi yang diapit oleh kawasan wisata alam dan wisata Heritage/pusaka. Kelurahan Lekobalo merupakan Kampung Kota yang sangat berpotensi menjadi Destinasi "Wisata Kampoeng Kota" dengan Karakter kampung bukit dan kampung Tepi Air

HASIL VERIFIKASI PENANGANAN KAWASAN KUMUH

BALAI P3KP SULAWESI I



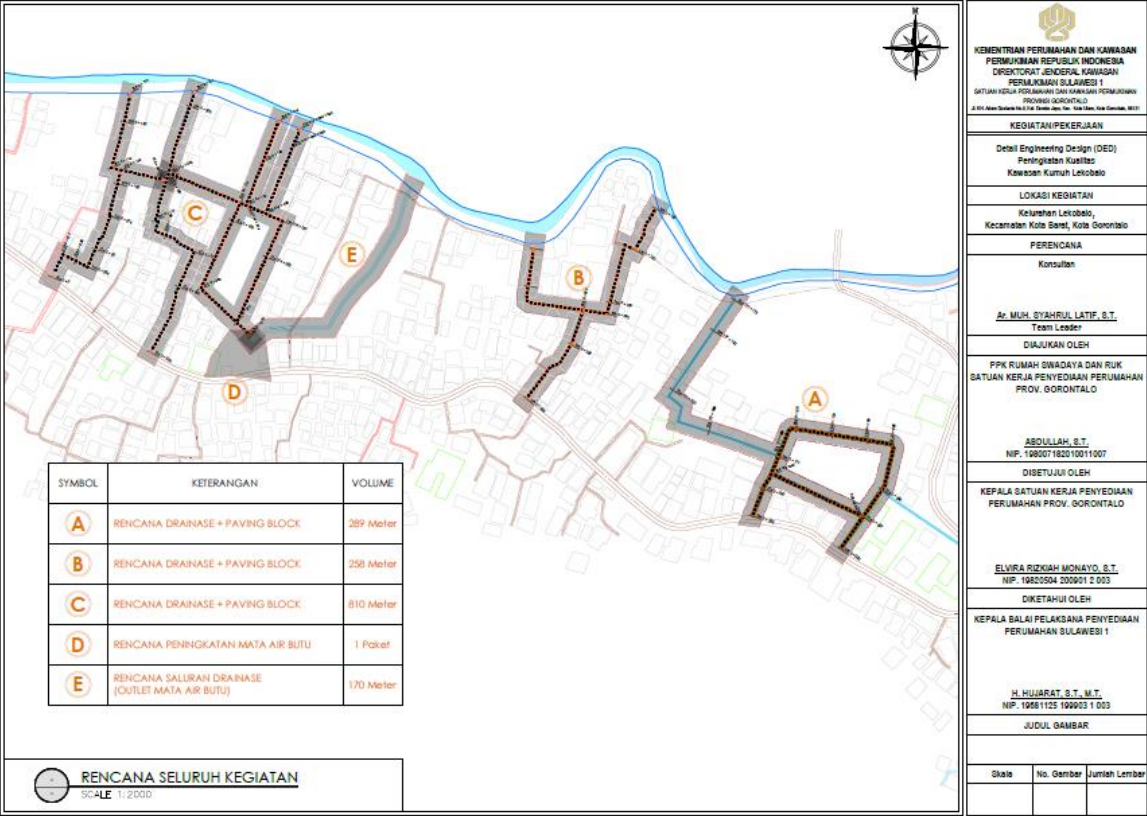
1. Verifikasi Administrasi

No	Kawasan	Luas	Kategori Kumuh	Persyaratan Administrasi
1	Kawasan Permukiman Kumuh Lekobalo Kelurahan Kelobalo Kecamatan Kota Barat	18.81 Ha	Kumuh Ringan	Lengkap/ Belum Lengkap

2. Verifikasi Lokasi

No	Usulan Komponen Bantuan	Jumlah/ Luas Usulan (unit/m)	Catatan
1	Jalan Lingkungan	1751.45 m	Paving Blok
2	Drainase Lingkungan	2491.85 m	Pasangan U Ditch
3	Penataan Mata Air Butu	0.40 ha	Peningkatan Kualitas
4	Penanganan Persampahan	143 KK	Tempat Sampah 3 Warna

DED HASIL REVIEW UNTUK PENANGANAN PENINGKATAN KUALITAS KAWASAN KUMUH DI LEKOBALO



Rencana Anggaran Biaya Rp 4 .621.639.318,34 (setelah direview)

HASIL VERIFIKASI PENANGANAN KAWASAN KUMUH

BALAI P3KP SULAWESI I



FORM VERIFIKASI ADMINISTRASI USULAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH KAWASAN KELURAHAN LEKOBALO

FORM VERIFIKASI ADMINISTRASI
USULAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH
TAHUN ANGGARAN 2025

Jenis Bantuan	Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh	
Komponen Bantuan	• Bangunan Rumah	• Pengelolaan Air Limbah
	• Jalan Lingkungan	• Pengelolaan Persampahan
	• Drainase Lingkungan	• Proteksi Kebakaran
	• Penyediaan Air Minum	
Kota	Kota Gorontalo	
Provinsi	Provinsi Gorontalo	
Nama Kawasan	Kelurahan Lekobalo	
Nama Pemeriksa	Rinni Silvana Engeline Wowiling, S.T.	
Tanggal Pemeriksaan	Selasa, 29 Juli 2025	

FORM VERIFIKASI LOKASI USULAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH

FORM VERIFIKASI LOKASI
USULAN PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH TAHUN ANGGARAN 2025

Kawasan	Kawasan Permukiman Kumuh Lekobalo
Koordinat	Site D 0°32'54.2"N 123°01'11.7"E
	Site E 0°32'55.2"N 123°01'01.3"E
	Site N 0°32'53.1"N 123°01'03.5"E
	Site H 0°32'51.29"N 123°01'17.08"E
	Site M 0°32'55.61"N 123°01'7.004"E
	Site P 0°32'55.61"N 123°01'7.004"E
	Penataan Mata Air Butu 0°32'53.07"N 123°01'3.482"E
Luas Kawasan Kumuh	18.81 Hektar
Kelurahan	Lekobalo
Kecamatan	Kota Barat
Kota	Gorontalo
Provinsi	Gorontalo
Jumlah Unit Rumah Terdampak	544 Unit
Tipologi Kawasan	Permukiman Tepi Air

DATA NUMERIK PARAMETER KEKUMUHAN		DATA EXISTING				RENCANA PENANGANAN				Ket
	persyaratan teknis									
b. Sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai standar teknis	Jumlah KK dengan sistem pengolahan sampah tidak sesuai standar teknis	488	lkl	74.05	3	143	lkl	52.35	3	
7. ASPEK KEBAKARAN		Vol	Sat	Prosen (%)	Nilai	Vol	Sat	Prosen (%)	Nilai	
a. Ketidaksediaan prasarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran	534	Unit	98	5	-	Unit	98	5	
b. Ketidaksediaan sarana proteksi kebakaran	Jumlah bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran	468	Unit	86.02	5	-	Unit	86.02	5	
Total Nilai					27				19	
Tingkat Kekumuhan			Data Eksisting Kumuh Ringan			Rencana Penanganan Menjadi: Kumuh Ringan				

Batas Ambang Nilai Tingkat Kekumuhan Berdasarkan Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018

> 60 : KUMUH BERAT
38 - 59 : KUMUH SEDANG
16 - 37 KUMUH RINGAN
< 16, DINYATAKAN TIDAK KUMUH



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I
Jl. Ring Road No. 1, Paal IV, Kec. Ika, Kota Manado, Sulawesi Utara 95129

BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN LOKASI TINGKAT BALAI PENINGKATAN KUALITAS PERMUKIMAN KUMUH TA 2025 KOTA GORONTALO

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kota Gorontalo Tim Verifikasi telah melaksanakan verifikasi administrasi dan teknis kegiatan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Tahun Anggaran 2025 di Kota Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

1. Verifikasi Administrasi

No	Kawasan	Luas	Kategori Kumuh	Persyaratan Administrasi
1	Kawasan Permukiman Kumuh Lekobalo Kelurahan Kelobalo Kecamatan Kota Barat	18.81 Ha	Kumuh Ringan	Lengkap/Belum Lengkap

2. Verifikasi Lokasi

No	Usulan Komponen Bantuan	Jumlah/ Luas Usulan (unit/m)	Catatan
1	Jalan Lingkungan	1751.45 m	Paving Blok
2	Drainase Lingkungan	2491.85 m	Pasangan U Ditch
3	Penataan Mata Air Butu	0.40 ha	Peningkatan Kualitas
4	Penanganan Persampahan	143 KK	Tempat Sampah 3 Warna

Berdasarkan data tersebut maka kami simpulkan lokasi kumuh memenuhi syarat untuk dilaksanakan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh oleh APBN Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman TA 2025.

TINDAKLANJUT

1. Sedang persiapan pengadaan lelang dan untuk dokumen – dokumen lelang sudah lengkap.
2. Penandatanganan Kontrak Pihak ketiga 15 Oktober 2025

HASIL VERIFIKASI PENANGANAN KAWASAN KUMUH

BALAI P3KP SULAWESI I

SEBELUM



SESUDAH



SEBELUM



SESUDAH



HASIL VERIFIKASI PENANGANAN KAWASAN KUMUH

BALAI P3KP SULAWESI I



Formulir Hasil Verifikasi Administrasi dan Verifikasi Teknis

FORMAT II-1

FORMAT DAFTAR SIMAK VERIFIKASI ADMINISTRASI

USULAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH

	FORM VERIFIKASI ADMINISTRASI USULAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH TA 2025
Jenis Kegiatan	Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah
Komponen Kegiatan	- Bilik - Kloset Leher Angsa - Tangki Septik Kedap
Provinsi	Gorontalo
Kota	Gorontalo
Kecamatan/Kelurahan	Kota Barat / Lekobalo
Nama Tim Verifikator	Balai P3KP Sulawesi I
Tanggal Verifikasi	15 Agustus 2025

NO	DOKUMEN/BERKAS	CHECKLIST (✓/X)	KETERANGAN
1	Surat Usulan Pemerintah Daerah	✓	
2	Surat Pernyataan dari Pemerintah Daerah/Pemerintah Desa bahwa Calon Penerima Manfaat adalah MBR atau Masyarakat Miskin	✓	
3	Surat Pernyataan Masyarakat untuk Bersedia Menerima Aset Hasil Kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	✓	
4	Surat Pernyataan Lahan <i>Clean and Clear</i> Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah	✓	

FORMAT II-2

FORM VERIFIKASI TEKNIS

USULAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH

	FORM VERIFIKASI TEKNIS USULAN KEGIATAN PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH TA 2025
Koordinat	RT001-RW001 0°32'55.949"N 123° 1'22.177"E RT001-RW002 0°32'51.63"N 123°1'11.51"E RT001-RW003 0°32'53.935"N 123° 1'3.574"E RT001-RW004 0°32'56.47"N 123° 0'46.99"E
Provinsi	Gorontalo
Kabupaten/Kota	Gorontalo
Kecamatan/Kelurahan	Kota Barat / Lekobalo
Kawasan Kumuh	Lekobalo
Jumlah Rumah yang Belum Memiliki Akses Sanitasi Layak	275 unit

Data Numerik Parameter Ketidaklayakan Sanitasi		Data Eksisting			Rencana Penanganan			Keterangan
		Vol	Sat	Persen (%)	Vol	Sat	Persen (%)	
a. Pengelolaan ALD yang belum memadai (kakus/kloset terhubung dengan tangki septik individual/komunal)	Jumlah rumah yang belum memiliki pengelolaan sanitasi layak	275	Unit Rumah	41.73	100	Unit Rumah	26.55	Berpatokan pada SK Kumuh Kota Gorontalo Tahun 2020 untuk jumlah KK yang tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis untuk data eksisting
b. Prasarana dan sarana pengelolaan ALD yang belum memenuhi persyaratan teknis	Jumlah rumah yang belum memiliki kloset leher angsa dan/atau memiliki tangki septik kedap	250	Unit Rumah	37.94	100	Unit Rumah	22.76	Berpatokan pada SK Kumuh Kota Gorontalo Tahun 2020 untuk jumlah KK dengan sarpras air limbah tidak sesuai persyaratan teknis untuk data eksisting

Berita Acara Hasil Verifikasi



KEMENTERIAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
BALAI PELAKSANA PENYEDIAAN PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN SULAWESI I
Jl. Ring Road No. 1, Paal IV, Kec. Tikala, Kota Manado, Sulawesi Utara 95129

BERITA ACARA
PEMBAHASAN HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DAN TEKNIS
TINGKAT BALAI
PENINGKATAN KUALITAS SANITASI RUMAH TA 2025
KOTA GORONTALO

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Belas bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Kota Gorontalo Tim Verifikasi telah melaksanakan verifikasi administrasi dan teknis kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah Tahun Anggaran 2025 di Kota Gorontalo, dengan rincian sebagai berikut:

1. Verifikasi Administrasi

No	Kawasan	Jumlah Sanitasi Rumah yang Tidak Layak	Persyaratan Administrasi
1	Lekobalo	275 Unit Rumah	Lengkap

2. Verifikasi Teknis

No	Kondisi Eksisting Sanitasi Rumah	Jumlah	Catatan
1	Jumlah rumah yang belum memiliki pengelolaan sanitasi layak	275 Unit Rumah	Rencana Penanganan 100 unit sesuai dengan hasil verifikasi di lapangan
2	Jumlah rumah yang belum memiliki kloset leher angsa dan/atau memiliki tangki septik kedap	250 Unit Rumah	Rencana Penanganan 100 Unit sesuai dengan hasil verifikasi di lapangan

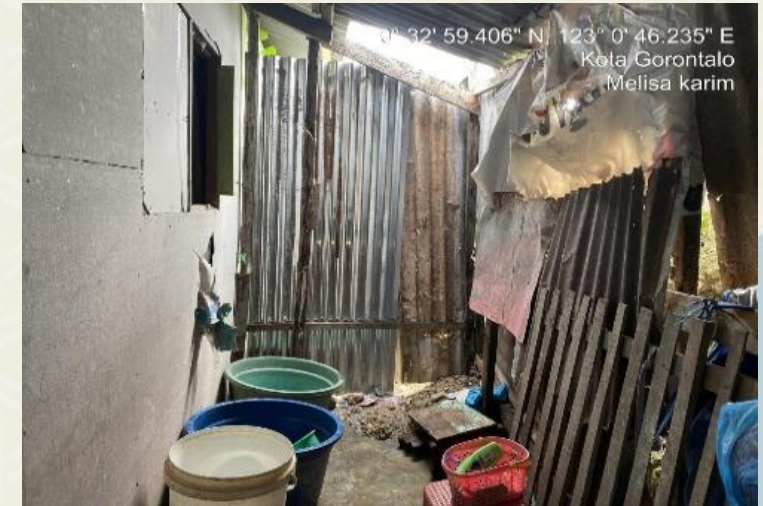
Demikian Berita Acara Hasil Verifikasi Administrasi dan Teknis Tingkat Balai ini kami buat sebagai bahan untuk proses pelaksanaan kegiatan Peningkatan Kualitas Sanitasi Rumah di Kota Gorontalo lebih lanjut.

TINDAKLANJUT

1. Sedang persiapan pengadaan lelang dan untuk dokumen – dokumen lelang sudah lengkap.
2. Penandatanganan Kontrak Pihak ketiga 15 Oktober 2025

HASIL VERIFIKASI PENANGANAN KAWASAN KUMUH

BALAI P3KP SULAWESI I



PENDAMPINGAN CSR



TAHUN ANGGARAN 2025



REKAP CSR

BALAI P3KP SULAWESI I



No.	Provinsi	Kab / Kota	Pemberi CSR	Jenis Bantuan (Pembangunan Baru / Peningkatan Kualitas (Renovasi))		Penerima Bantuan (BNBA)		Titik Koordinat	Dokumen tasi (ada / tidak)	Progress	Keterangan
				Kategori	Jumlah (unit)	Nama	NIK				
1	Gorontalo	Kab. Pohuwato	BAZNAS	Pembangunan Baru	1			Desa Pentadu			proses konfirmasi
					1			Desa Marisa Selatan			proses konfirmasi
					1			Desa Manawa			proses konfirmasi
					1			Desa Hulawa			proses konfirmasi
					1			Desa Ayula			proses konfirmasi
					1			Desa Ayula			proses konfirmasi
		Kota Gorontalo	BAZNAS (Dukungan APBD : Pembangunan Baru 12 Unit, Peningkatan Kualitas 5 Unit)	Sambungan Baru Listrik	12						proses konfirmasi
				SR Air Minum	5						proses konfirmasi
		Kab. Gorontalo Utara	Bank SulutGo	Pembangunan Baru	10						Dalam Proses Verifikasi oleh Pemkab
		Kab. Gorontalo	PT. Merdeka Gold	Pembangunan Baru	50						proses konfirmasi Dinas Perkim Kab Gorontalo
total 1					83						

REKAP CSR

BALAI P3KP SULAWESI I



No.	Provinsi	Kab / Kota	Pemberi CSR	Jenis Bantuan (Pembangunan Baru / Peningkatan Kualitas (Renovasi))		Penerima Bantuan (BNBA)		Titik Koordinat	Dokumentasi (ada / tidak)	Progress	Keterangan
				Kategori	Jumlah (unit)	Nama	NIK				
2.	Sulawesi Utara	Kab. Bolaang Mongondow Selatan	PT. SMF	Peningkatan Kualitas	20			Desa Matondoi Selatan		pembangunan tahap II	cp: Sahrul (PT.SMF) 082316654321
		Kab. Minahasa Utara	PT. Meares Soputan Mining	Peningkatan Kualitas	2	Deni Deeng		Desa Pinenek Jaga IV Kecamatan Likupang Timur	ada	proses pelaksanaan	Proses kofirmasi
						Jeanetje Lahabir		Desa Pinenek Jaga IV Kecamatan Likupang Timur	ada	proses pelaksanaan	Proses kofirmasi
			PT. Pilar Andalan Lestari	Peningkatan Kualitas	1	Yohana Manaroinson		Desa Paniki Atas Jaga I Kecamatan Talawaan	ada	proses pelaksanaan	Proses kofirmasi
			PT. Karya Putra Kawanua	Peningkatan Kualitas	1	Yusti Kaunang		Desa Wori Kecamatan Wori	ada	proses pelaksanaan	Proses kofirmasi
			PT. Manado Maju Perkasa	Peningkatan Kualitas	1	Lidya L.A Undap		Desa Matungkas Jaga III, Kecamatan Dimembe	ada	proses pelaksanaan	Proses kofirmasi
			PT. Viola Putri Mandiri	Peningkatan Kualitas	1	Chandra S. Lahu		Desa Tontalet Rokrok, Kecamatan Kema	ada	proses pelaksanaan	Proses kofirmasi
			PT. Cherry Kasih Abadi	Peningkatan Kualitas	1	Yoppy Goni		Desa Matungkas Jaga IV, Kecamatan Dimembe	ada	proses pelaksanaan	Proses kofirmasi
			PT. Kharisma	Peningkatan Kualitas	1	Yosina Abigail Tete regoh		Desa Matungkas Jaga IV, Kecamatan Dimembe	ada	proses pelaksanaan	Proses kofirmasi
		Kota Kotamobagu	Polres Kotamobagu	Peningkatan Kualitas	1	Hamitsuna Mokoginta	7101131007910302	RT 015/RW 008, Kel. Molinow, Kec. Kotamobagu Barat	ada	Sudah realisasi	
	total 2				29						
3.	Maluku Utara	Kota Ternate	BAZNAS Kota Ternate & Baznas RI	Peningkatan Kualitas	1	Salmi Kaidati	8202013112690000	Sango RT 005 / RW 003		perencanaan	proses konfirmasi. Contact person via pak Romel
				Pembangunan Baru	4	Ali Umar	8271021408840000	Maliaro RT 016 / RW 005		perencanaan	Proses kofirmasi
						Masni Ahmad	8271024505870020	Sasa RT 004 / RW 002		perencanaan	Proses kofirmasi
						Erni Hasan	8271015402780000	Kastela RT 002 / RW 001		perencanaan	Proses kofirmasi
						Nina Giyana Kristina	8271017101940000	Kastela RT 004 / RW 002		perencanaan	Proses kofirmasi
		Kota Tidore Kepulauan	PLN	Pembangunan Baru	1					rencana	proses konfirmasi pihak PLN Tidore Kepulauan

REKAP BANTUAN CSR

PROVINSI SULAWESI UTARA

KOTA KOTAMOBAGU

1 UNIT Peningkatan Kualitas

KABUPATEN MINAHASA UTARA

8 UNIT Peningkatan Kualitas
Nilai Bantuan Rp. 20.000.000 / Unit

KAB. BOLAANG MONGONDOW SELATAN

20 UNIT Peningkatan Kualitas

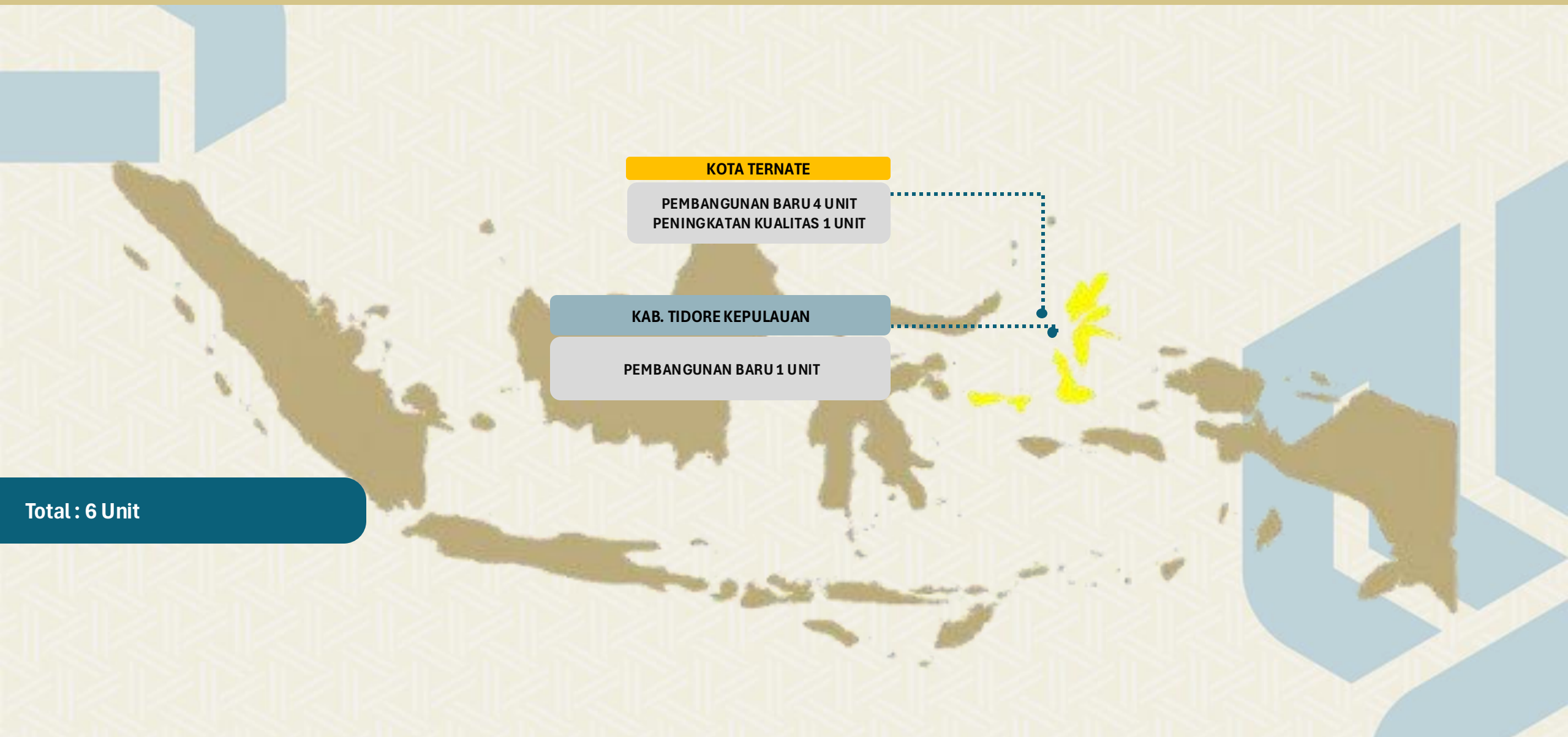
Total : 29 Unit

REKAP BANTUAN CSR PROVINSI GORONTALO



Total : 83 Unit

REKAP BANTUAN CSR PROVINSI MALUKU UTARA



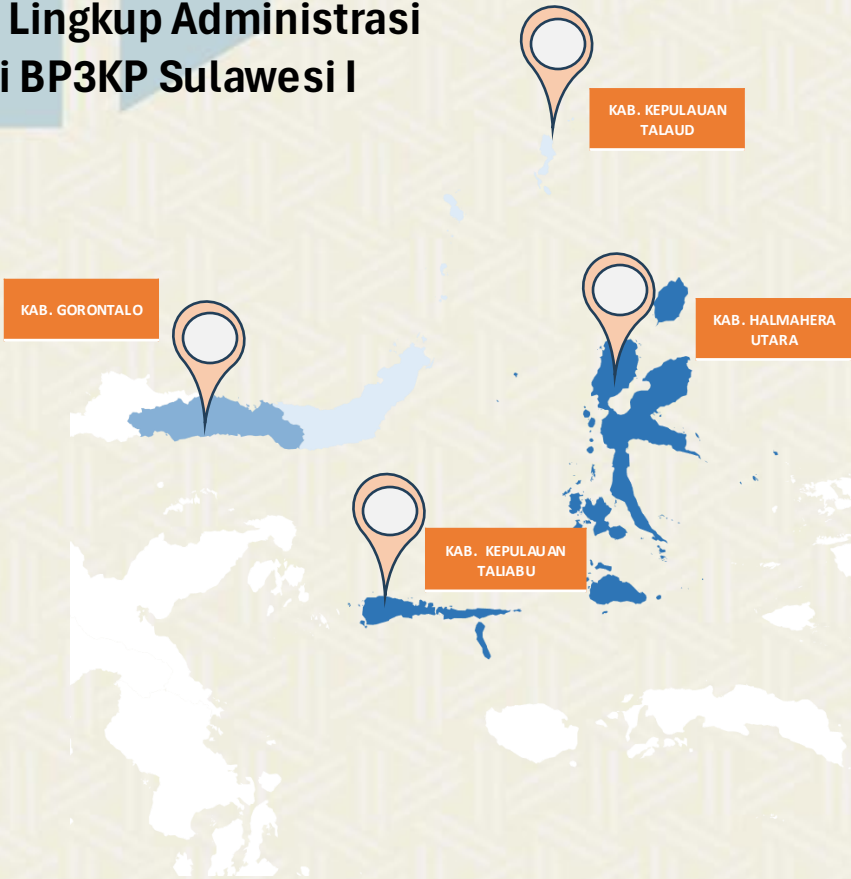
Total : 6 Unit

PENDAMPINGAN RP3KP DAN RP2KPKPK



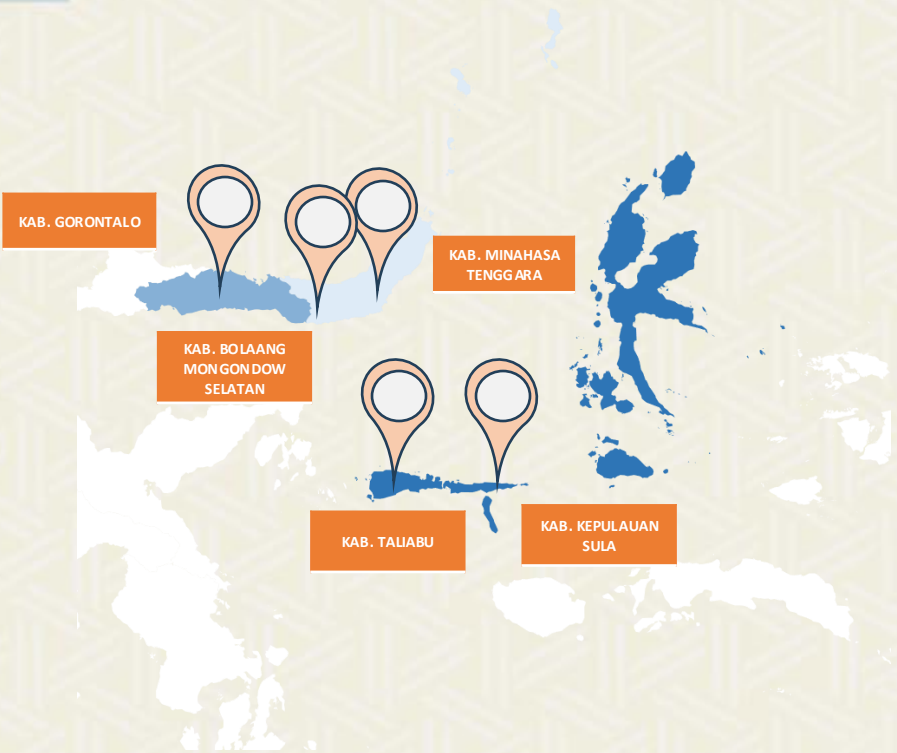
TAHUN ANGGARAN 2025

Peta Lingkup Administrasi
Balai BP3KP Sulawesi I



No	Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan Sampai Bulan September
	Provinsi Sulawesi Utara	
1	Kabupaten Kepulauan Talaud	Penyusunan Profil
2	Kabupaten Minahasa	Laporan Akhir, memasuki proses legalisasi (prolegda)
	Provinsi Gorontalo	
1	Kabupaten Gorontalo	Proses Legalisasi Perda
	Provinsi Maluku Utara	
1	Provinsi Maluku Utara	Penyusunan Profil
2	Kabupaten Kepulauan Taliabu	Penyusunan Profil

Peta Lingkup Administrasi Balai BP3KP Sulawesi I



No	Kabupaten/Kota	Jenis Kegiatan Sampai Bulan September
	Provinsi Sulawesi Utara	
	Kabupaten Bolaang Mongondow	
1	Selatan	Draf Laporan Akhir
2	Kabupaten Minahasa Tenggara	Penyusunan Data dan Fakta
	Provinsi Gorontalo	
1	Kabupaten Gorontalo	Proses Legalisasi Perbup
	Provinsi Maluku Utara	
1	Kabupaten Kepulauan Taliabu	Penyusunan Data dan Fakta
2	Kabupaten Kepulauan Sula	Penyusunan Data dan Fakta

PROGRES KEUANGAN DAN FISIK SATKER PKP SULAWESI UTARA



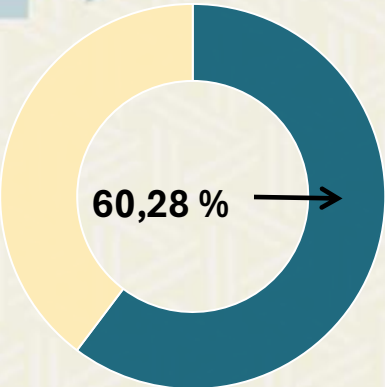
TAHUN ANGGARAN 2025

Status : 24 September 2025

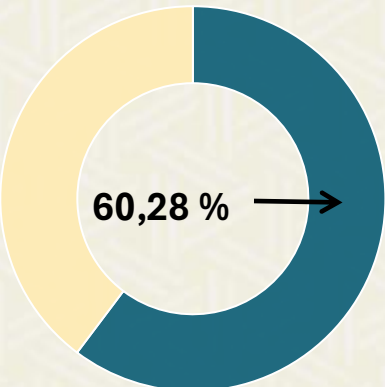
PROGRES KEUANGAN (AKUMULASI 4 DIPA)

TA 2025

PROGRES KEUANGAN (AKUMULASI 4 DIPA)

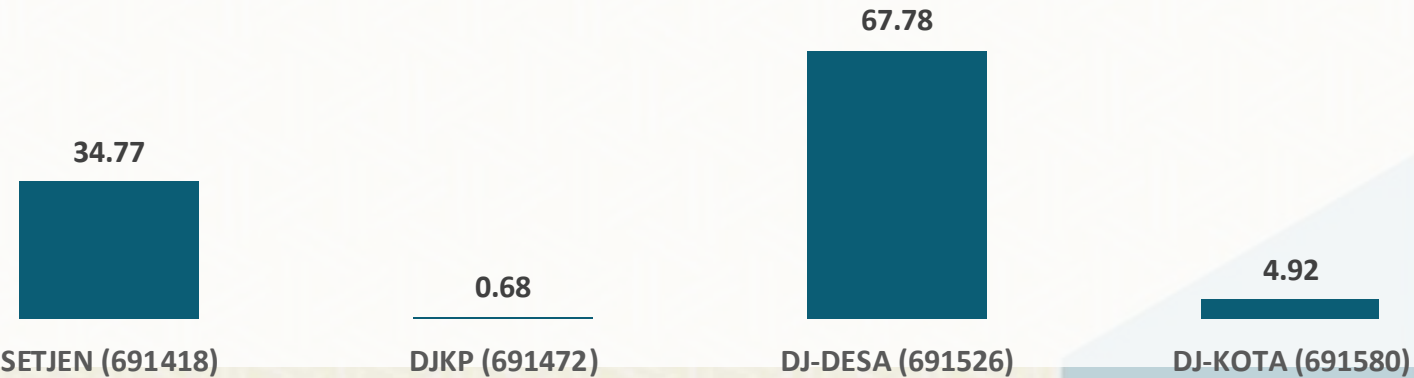


PROGRES FISIK (AKUMULASI 4 DIPA)



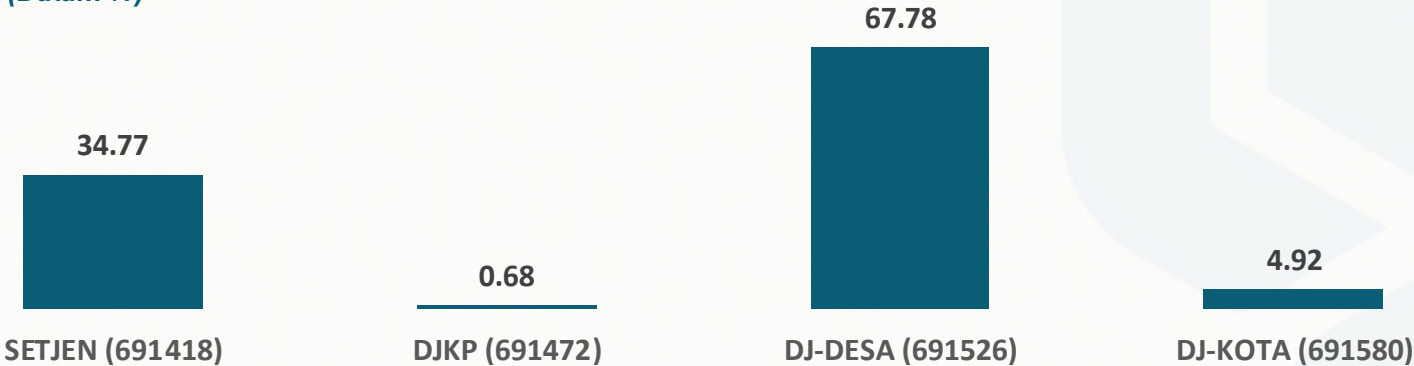
BREAKDOWN PROGRES PER DIPA (Dalam %)

Pagu : Rp. 158.473.894.000
Realisasi : Rp. 95.521.835.331



BREAKDOWN PROGRES PER DIPA (Dalam %)

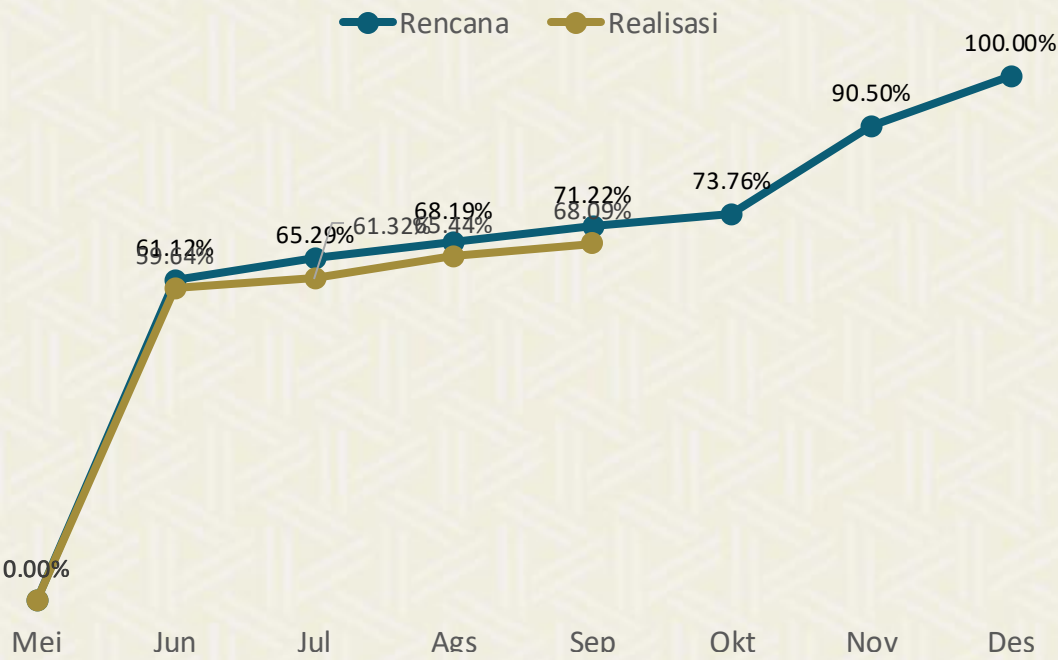
Pagu : Rp. 158.473.894.000
Fisik : Rp. 95.521.835.331



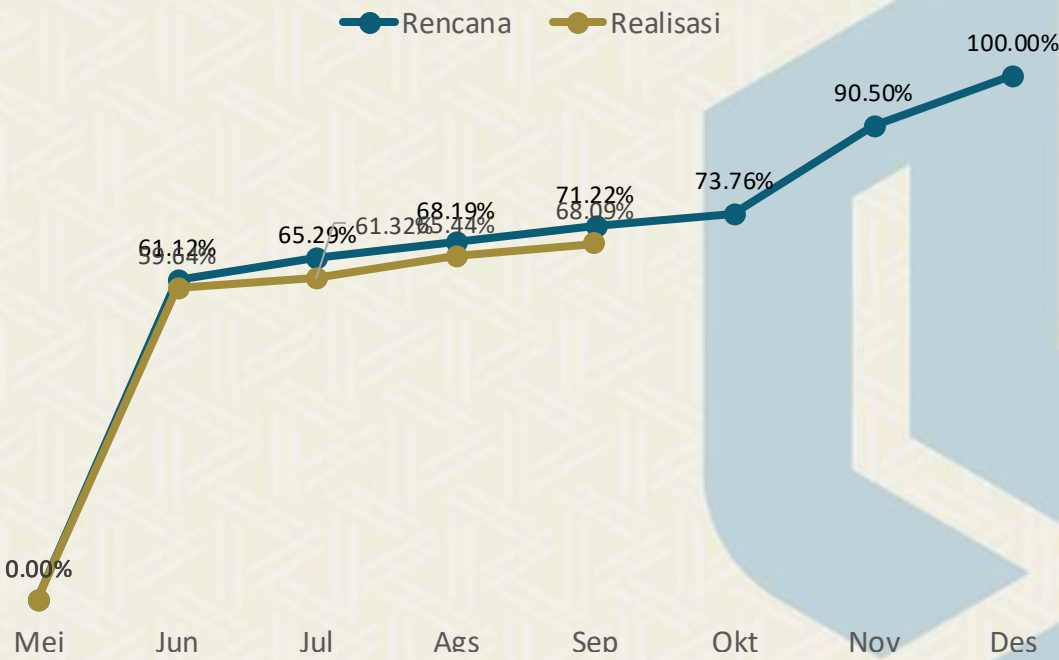
RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK (AKUMULASI 4 DIPA) TA 2025



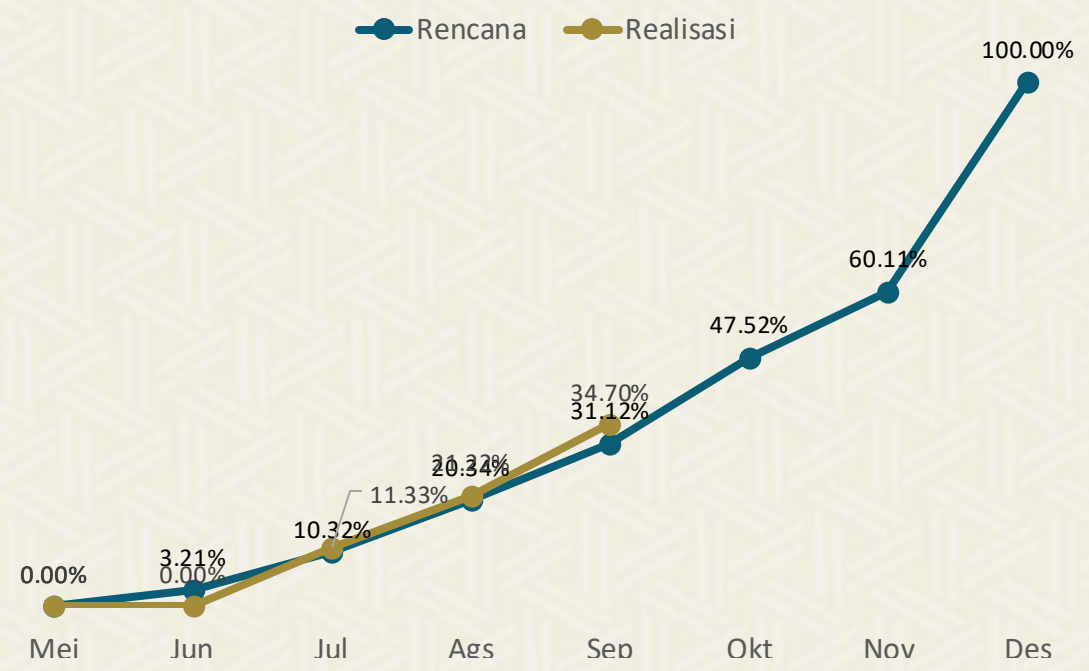
RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN



RENCANA DAN REALISASI FISIK



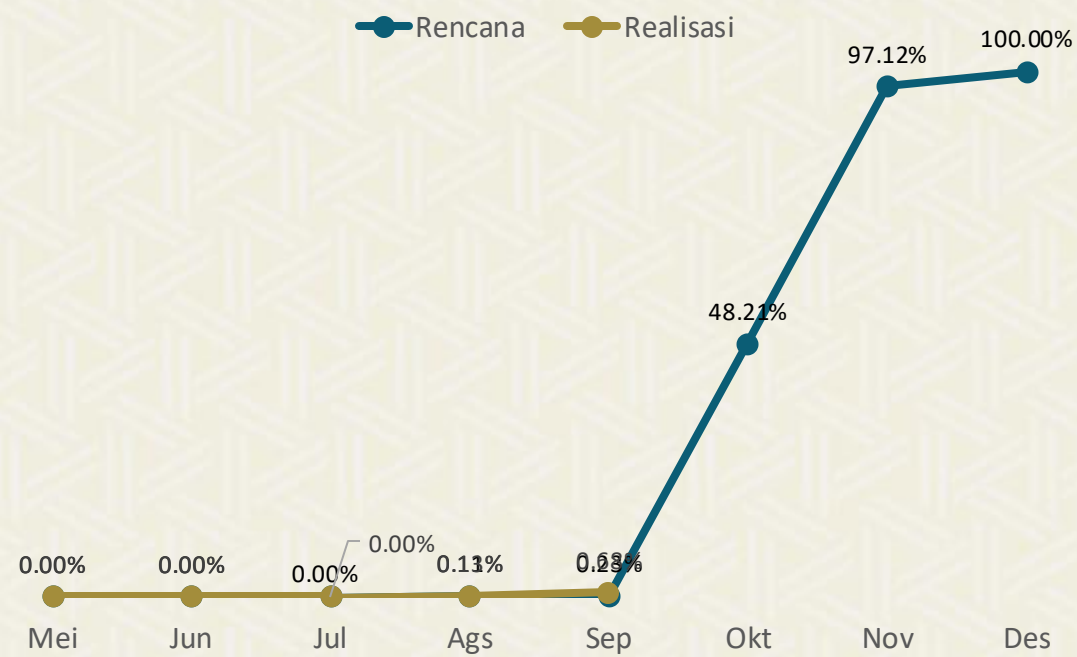
RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN



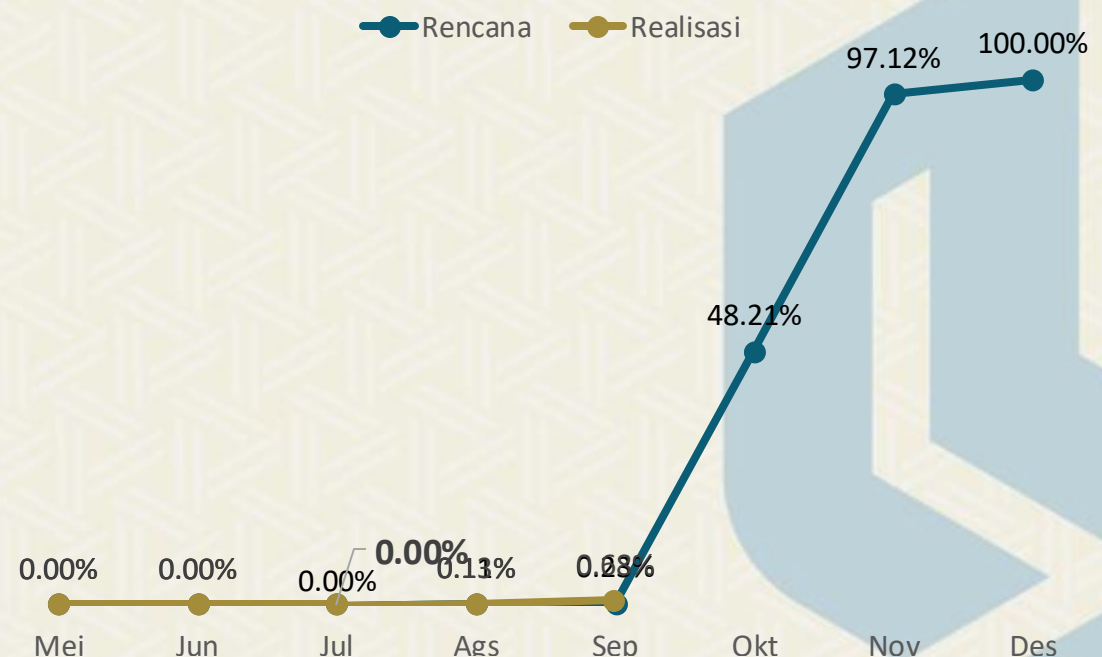
RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK DIPA DITJEN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2025



RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN

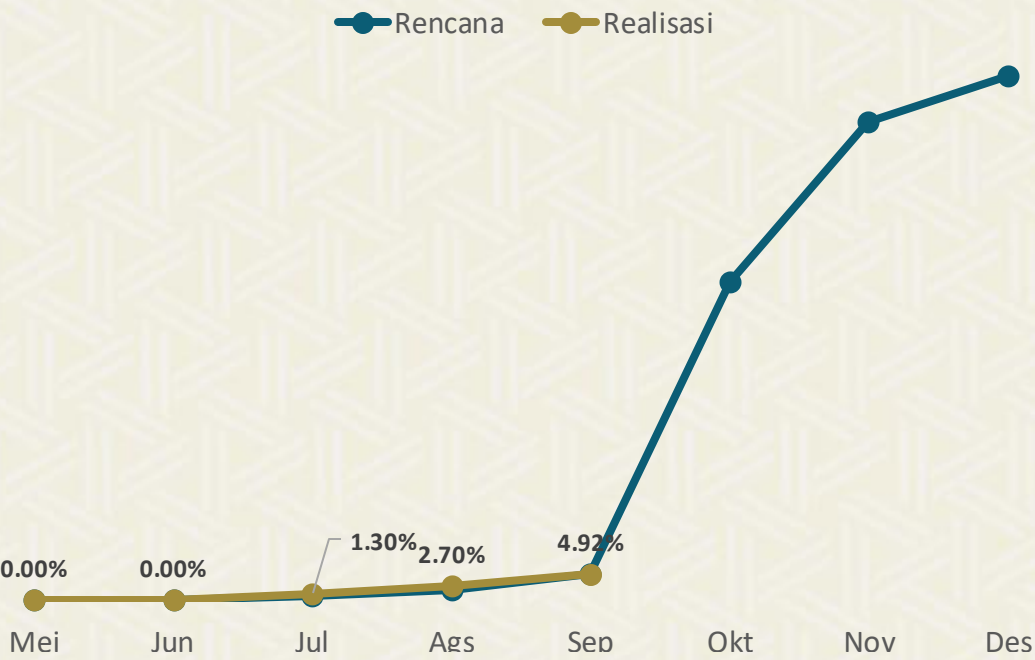


RENCANA DAN REALISASI FISIK

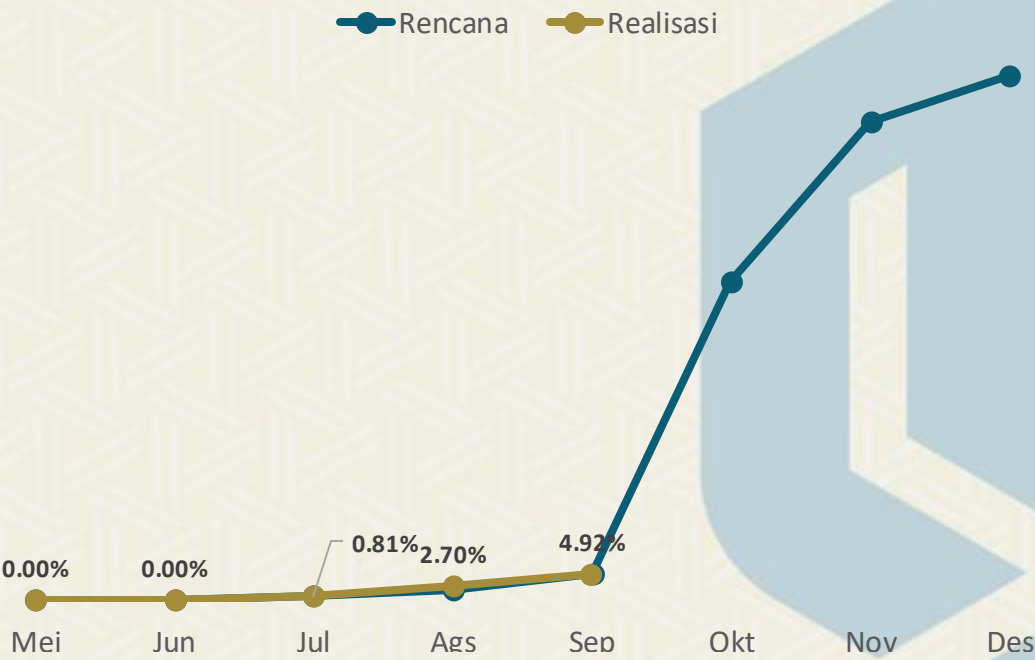


RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK DIPA DITJEN PERUMAHAN PERKOTAAN TA 2025

RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN

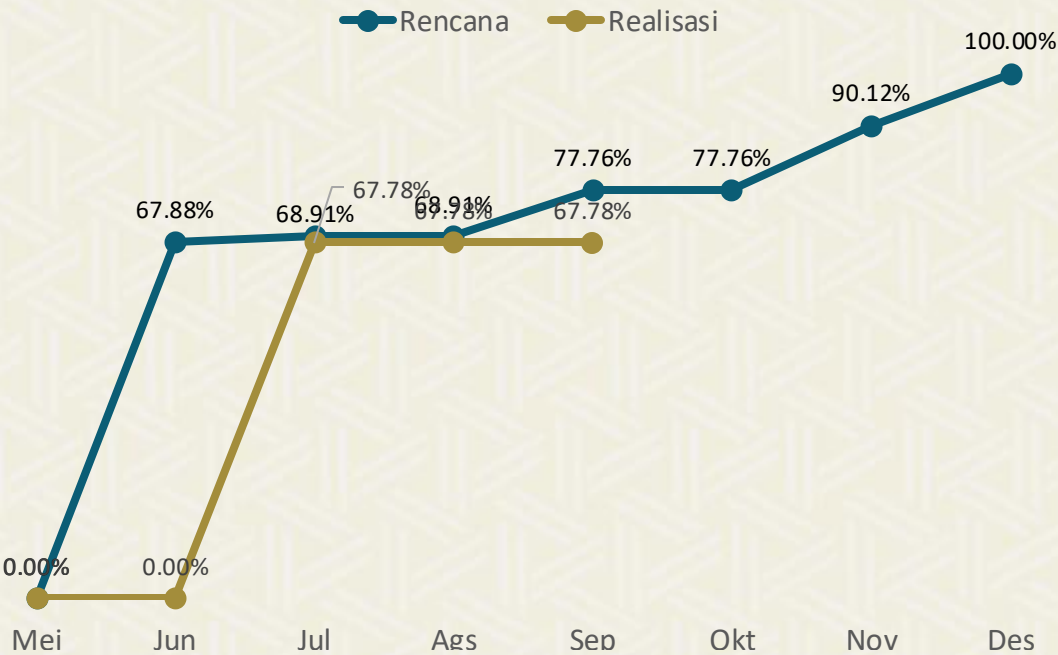


RENCANA DAN REALISASI FISIK



RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK DIPA DITJEN PERUMAHAN PERDESAAN TA 2025

RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN

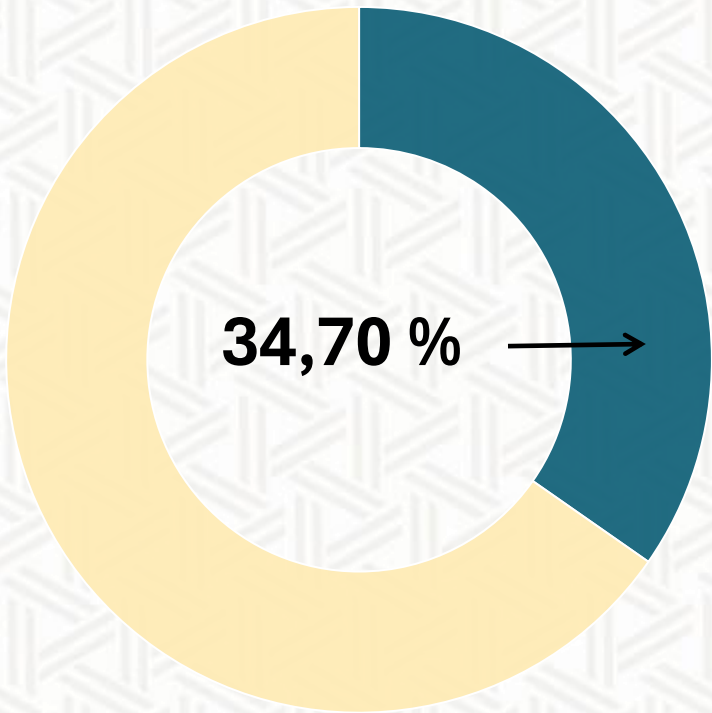


RENCANA DAN REALISASI FISIK



SEKRETARIAT JENDERAL
691418

Pagu : Rp. 1.029.771.000
Realisasi : Rp. 357.376.813

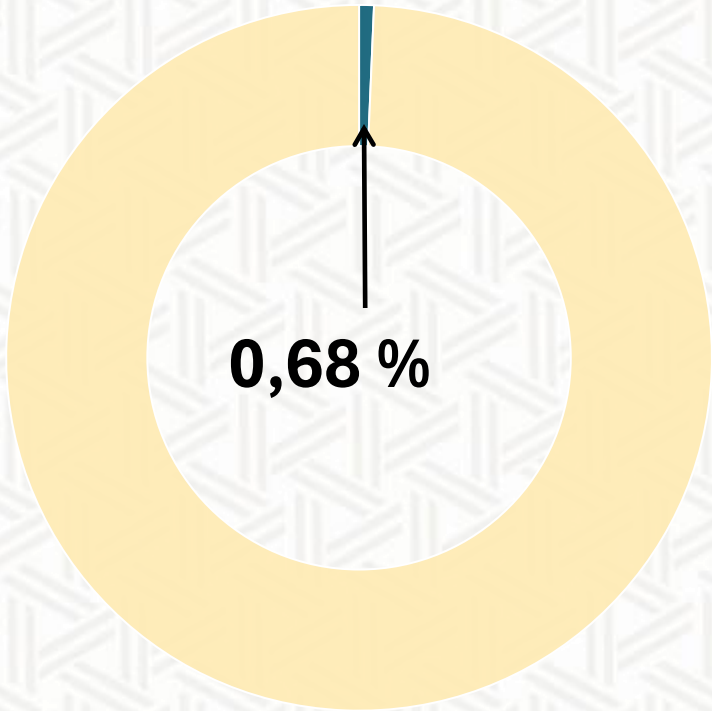


DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
EBA.994.002.A	Operasional dan Pemeliharaan Kantor BP3KP Sulawesi I	Rp. 117.798.579	35,77%
EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	Rp. 43.844.916	19,57%
EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Rp. 22.127.542	20,70%
EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 173.605.776	46,98%

DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN
691472

Pagu : Rp. 15.488.099.000
Realisasi : Rp. 104.972.300



DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

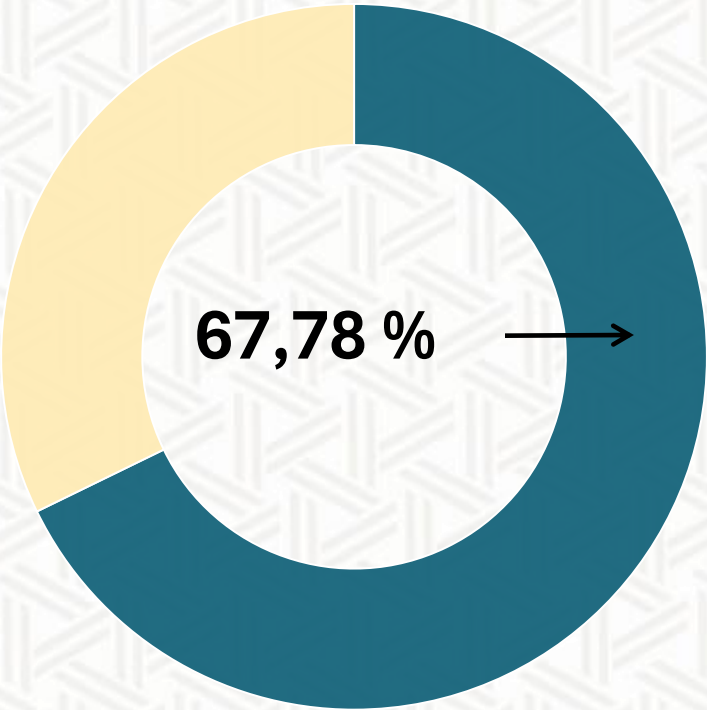
KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
FAE.003.100.A	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Rp. 56.449.000	54,47%
RBB.003.101.A	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Rp. 0	0%
RBB.003.102.A	Pendampingan Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman	Rp. 48.523.300	3,27%

DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERDESAAN
691526

Pagu : Rp. 140.114.138.000
Realisasi : Rp. 94.968.812.755

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
FAE.001.100.A	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan	Rp. 21.270.000	94,92%
FAE.001.100.B	Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perdesaan (Pergeseran)	Rp.70.946.000	65,24%
RBB.002.101.A	Pelaksanaan Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan	Rp. 94.876.596.350	69,74%
RBB.002.102.A	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Perdesaam	Rp. 0	0%
RBB.002.102.B	Pengawasan dan Pengendalian Rumah Khusus Perdesaan	Rp. 0	0%



PROGRES KEUANGAN

SATKER PROVINSI SULAWESI UTARA

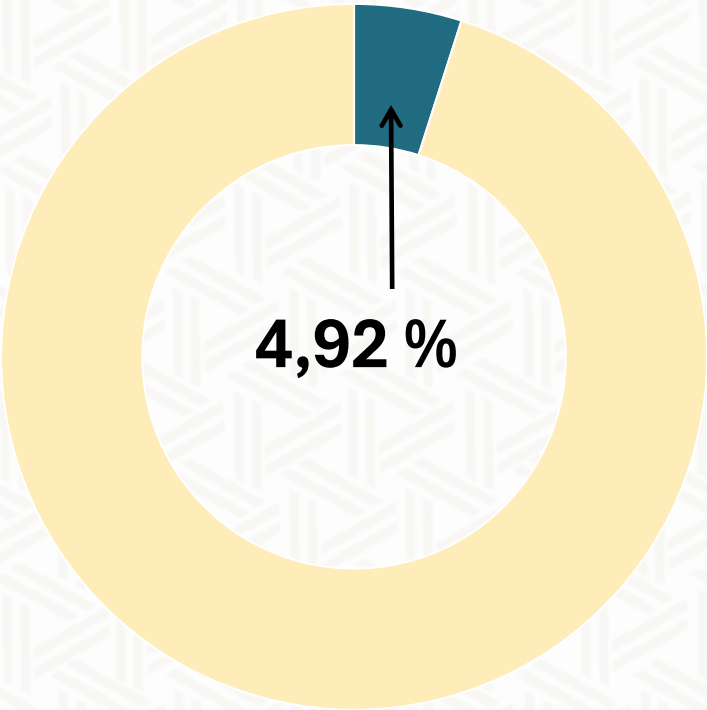


DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERKOTAAN
691580

Pagu : Rp. 1.841.886.000
Realisasi : Rp. 90.673.463

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
F AE.001.100.A	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp. 90.673.463	17,37%
RBB.008.100.A	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Rp. 0	0%
RBB.008.100.A	Pengawasan dan Pengendalian Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya Perkotaan Sulawesi Utara	Rp. 0	0%

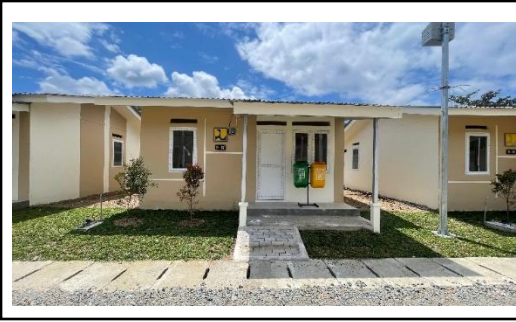


PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG RUANG DI SULAWESI UTARA

DATA UMUM BANGUNAN	
Nama Rumah Khusus	Hunian Tetap Pasca Bencana Erupsi Gunung Ruang Di Sulawesi Utara
Alamat	Desa Modisi Kecamatan Pinolosian Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
Tahun Anggaran	2024 - 2025
Penerima Manfaat	Masyarakat terdampak bencana erupsi Gunung Ruang di Sulawesi Utara
Tipe Bangunan/Jumlah Unit	Tipe-45/287 Unit
Kepemilikan Aset	
Nilai Perolehan	
DATA KONTRAK	
Konsultan MK/SPV	PT. INDAH KARYA (PERSERO)
Kontraktor Pelaksana	PT. NINDYA KARYA
Penyedia Jasa Meubelair	-
DATA PELAKSANAAN	
Progres Fisik	95,75 %
Progres Meubelair	-
Serah Terima I	
Rencana Serah Terima II	
Waktu Pelaksanaan	533 Hari Kalender
Sisa Waktu	36 Hari Kalender



Perspektif



Tampak Depan



Tampak Belakang



Samping Kiri



Samping Kanan



Perspektif

MINGGU KE – 72 MYC (Kontrak)

Rencana 96,57%	Realisasi 95,75%	Deviasi 0,82 %	-	Keluaran 68,69%
-------------------	---------------------	-------------------	---	--------------------

PEMBANGUNAN HUNIAN TETAP PASCA BENCANA ERUPSI GUNUNG RUANG DI SULAWESI UTARA



PEKERJAAN SAAT INI :

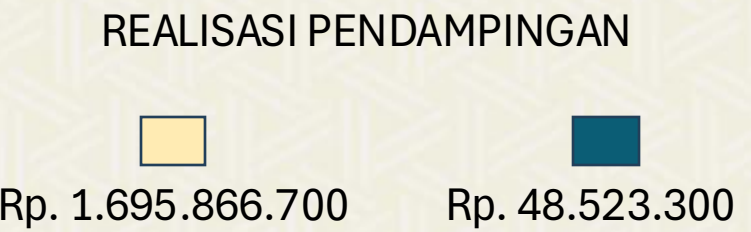
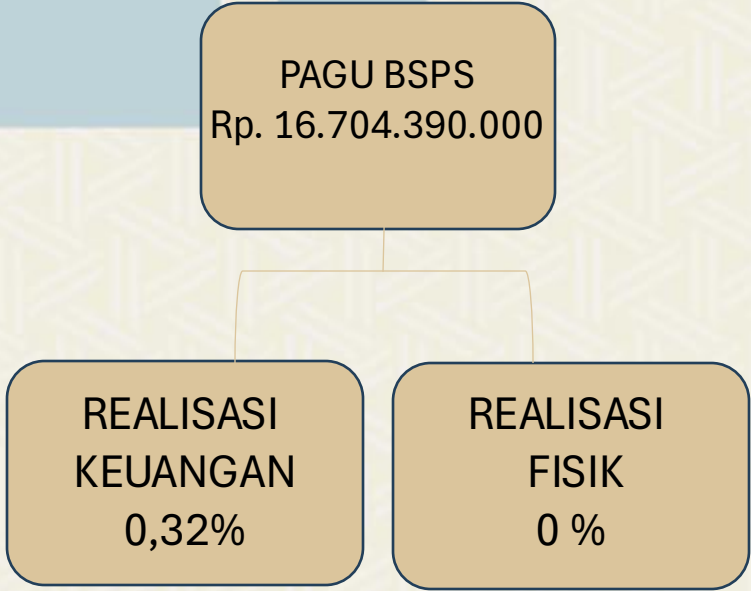
1. Pekerjaan timbunan area 1
2. Pekerjaan pembentukan badan jalan area 1 dan area 2
3. Pekerjaan Sub Base, Kelas B area 1 dan area 2
4. Pekerjaan Sub Base, Kelas A area 1 dan area 2
5. Pekerjaan saluran pasangan batu area 1
6. Pekerjaan peninggian DPT batas kawasan sisi barat area 1
7. Pekerjaan peninggian DPT batas kawasan sisi timur area 1
8. Pekerjaan pemasangan buis beton outlet saluran kawasan
9. Pekerjaan defect list DPT area 2
10. Pekerjaan pemasangan rambu, nama blok hunian area 1 dan area 2
11. Pekerjaan pemasangan kansteen area 1 dan area 2
12. Pekerjaan penanaman rumput gajah mini landscape area 1
13. Pekerjaan hidrosidding lereng area 2

PERMASALAHAN :

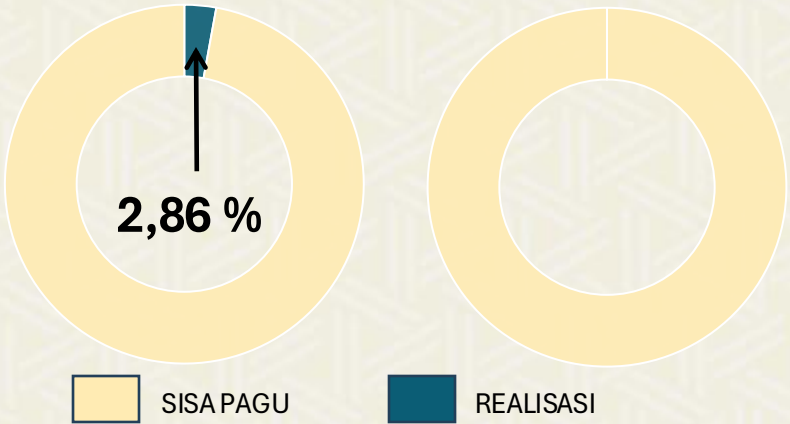
1. Pekerjaan akses jalan masih digunakan oleh BPBPK untuk akses material dan alat berat untuk pekerjaan fasum dan fasos
2. Penyiapan lahan badan jalan untuk mendapatkan kepadatan maksimal belum bisa dicapai karena kadar air tanah sangat tinggi

TINDAK LANJUT:

1. Pengaspalan jalan akses dilakukan sebagian jalur jalan sedangkan jalur jalan yang lain untuk akses material dan alat berat pekerjaan fasum dan fasos
2. Pembuatan saluran untuk mengalihkan aliran air ke luar kawasan
3. Percepatan pembuatan outlet saluran kawasan ke arah pantai



PEKERJAAN SAAT INI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Penyusunan Proposal	1. -	1. Menunggu penetapan SK Dirjen



Pelaksanaan Sosialisasi & Penyuluhan oleh TFL

Kegiatan dilaksanakan pada setiap Lokasi dampingan per Kabupaten/Kota



Pelaksanaan Penyusunan Proposal oleh CPB didampingi oleh TFL Kegiatan dilaksanakan pada setiap Lokasi dampingan per Kabupaten/Kota



PROGRES KEUANGAN DAN FISIK SATKER PKP GORONTALO



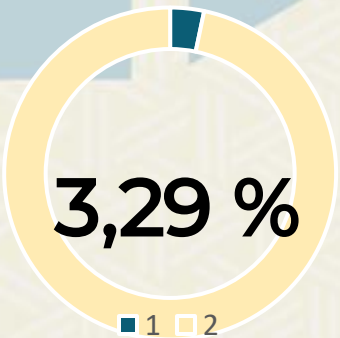
TAHUN ANGGARAN 2025

Status : 24 September 2025

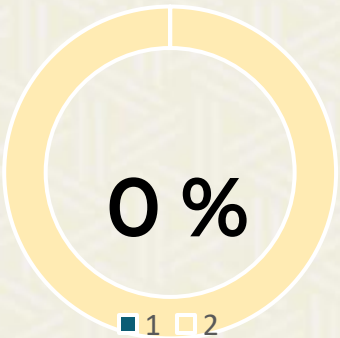
PROGRES KEUANGAN (AKUMULASI 4 DIPA)

TA 2025

PROGRES KEUANGAN (AKUMULASI 4 DIPA)



PROGRES FISIK (AKUMULASI 4 DIPA)



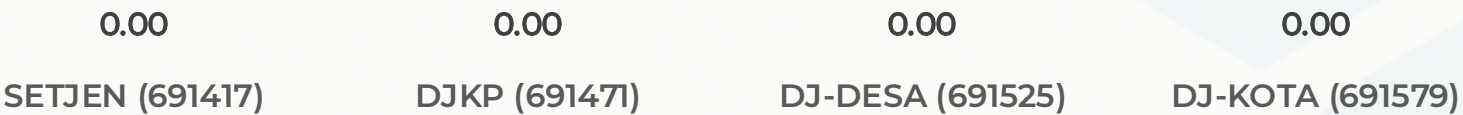
Pagu : Rp. 15.657.176.000
Realisasi : Rp. 515.541.314

BREAKDOWN PROGRES PER DIPA (Dalam %)



Pagu : Rp. 15.657.176.000
Fisik : Rp. 12.579.190.000

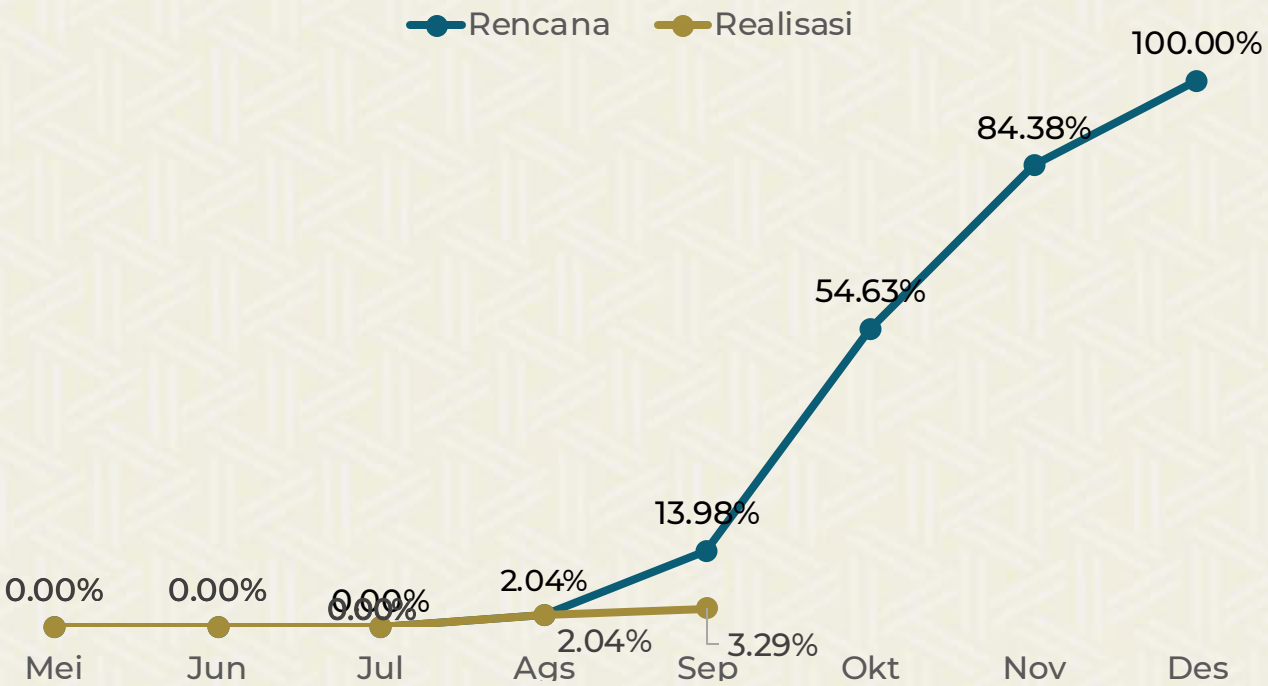
BREAKDOWN PROGRES PER DIPA (Dalam %)



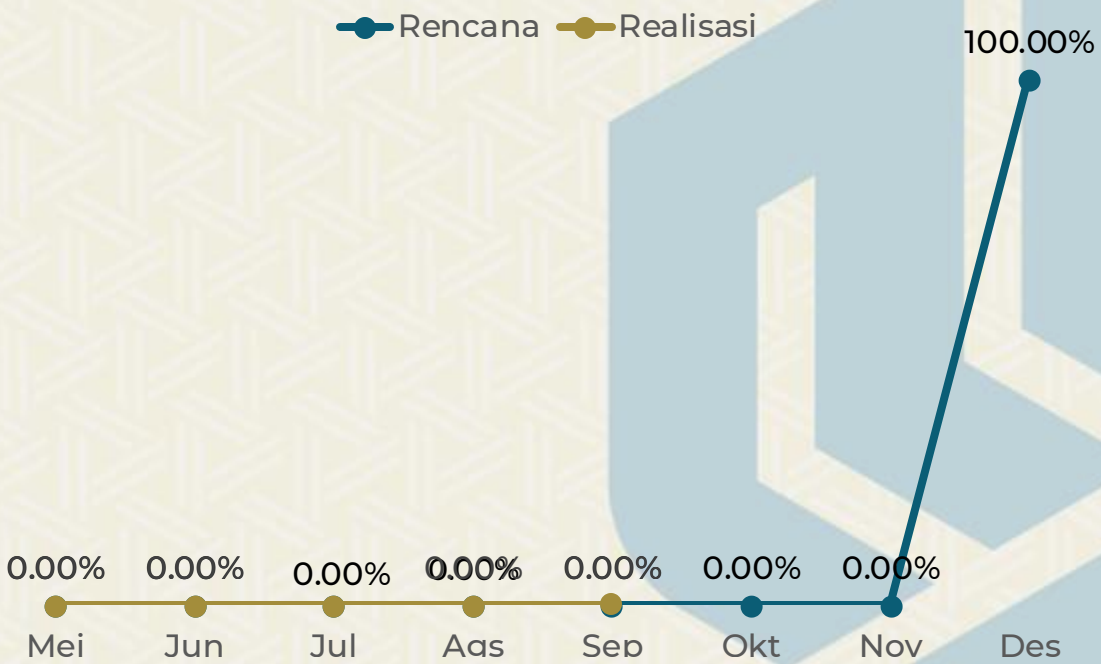
RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK (AKUMULASI 4 DIPA) TA 2025



RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN

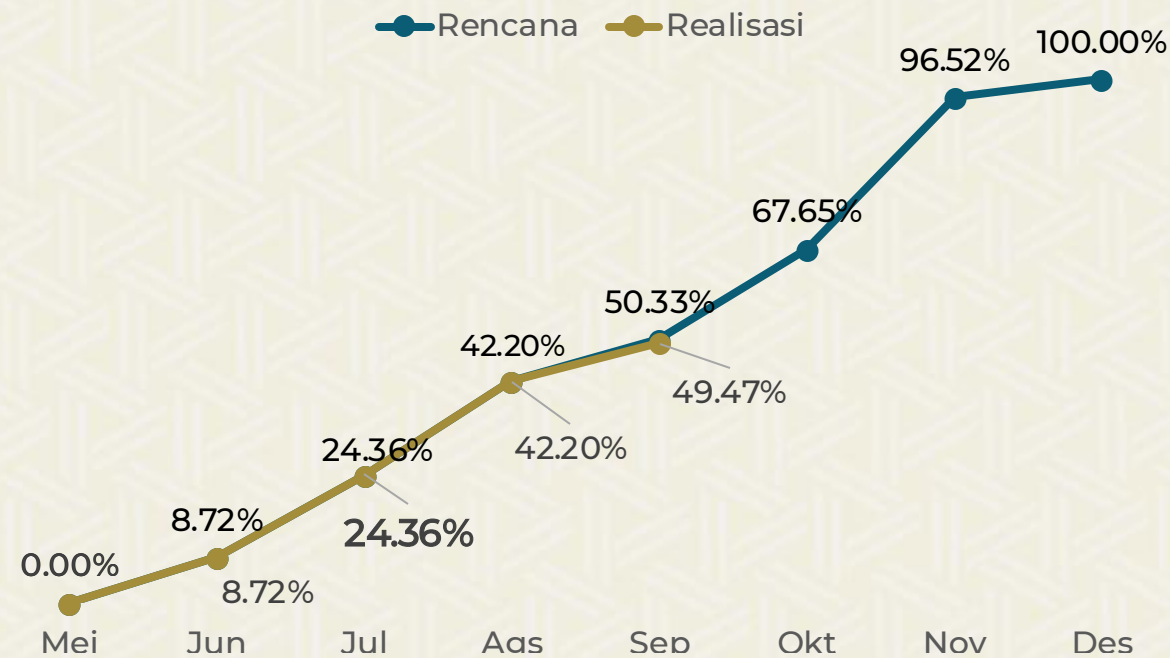


RENCANA DAN REALISASI FISIK

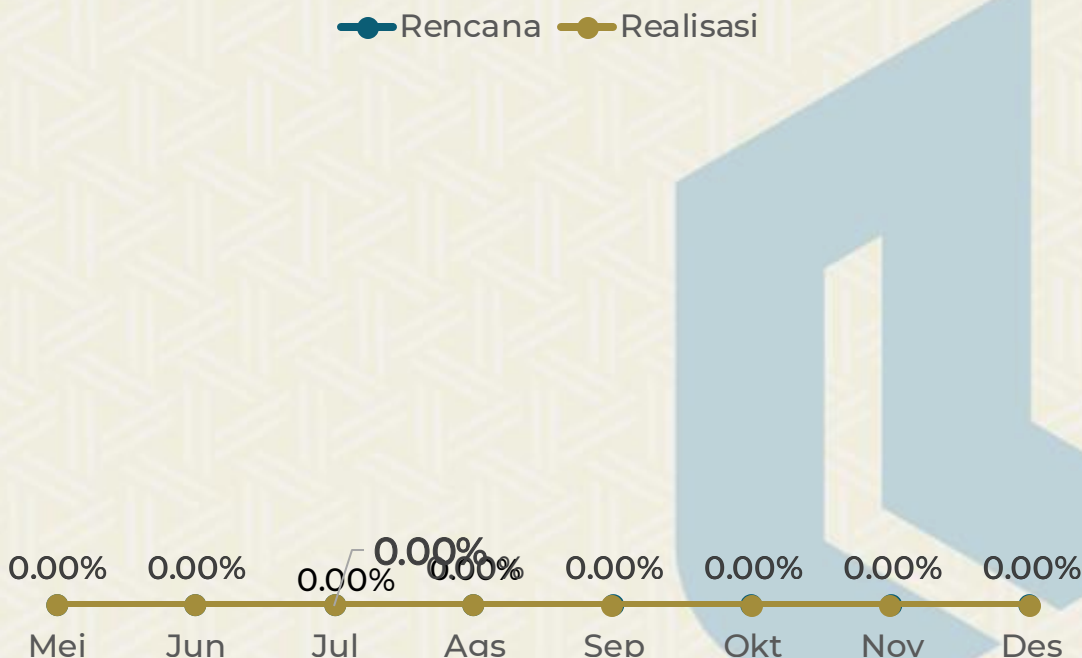


RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK DIPA SEKRETARIAT JENDRAL TA 2025

RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN

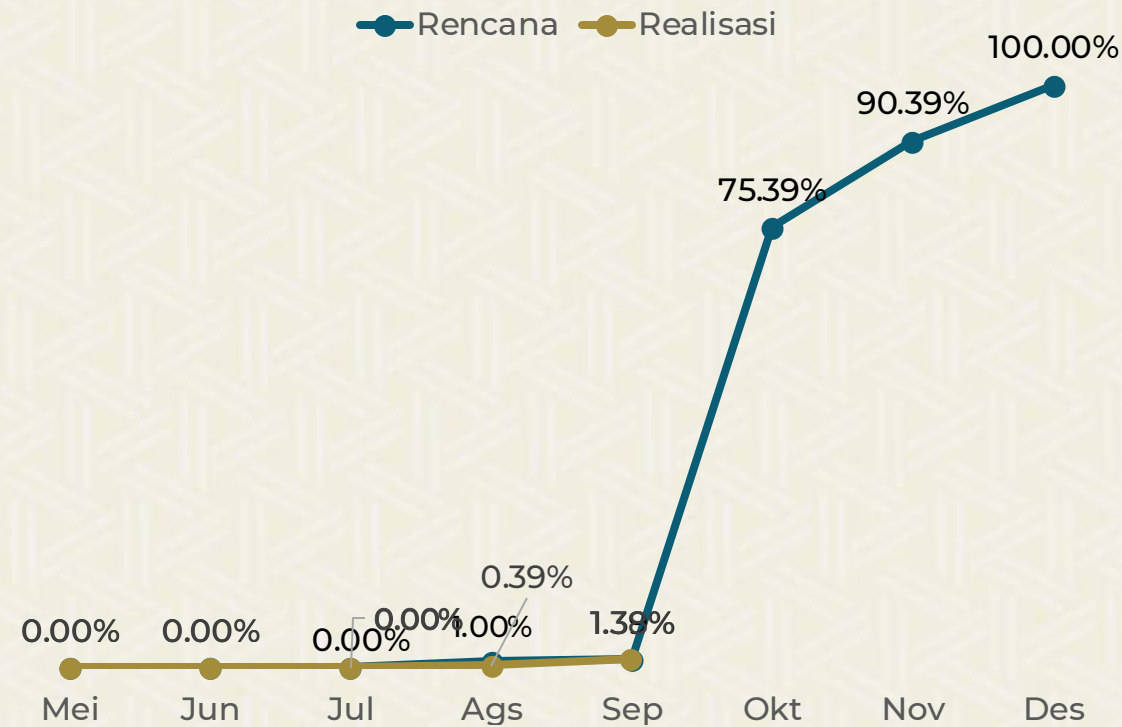


RENCANA DAN REALISASI FISIK

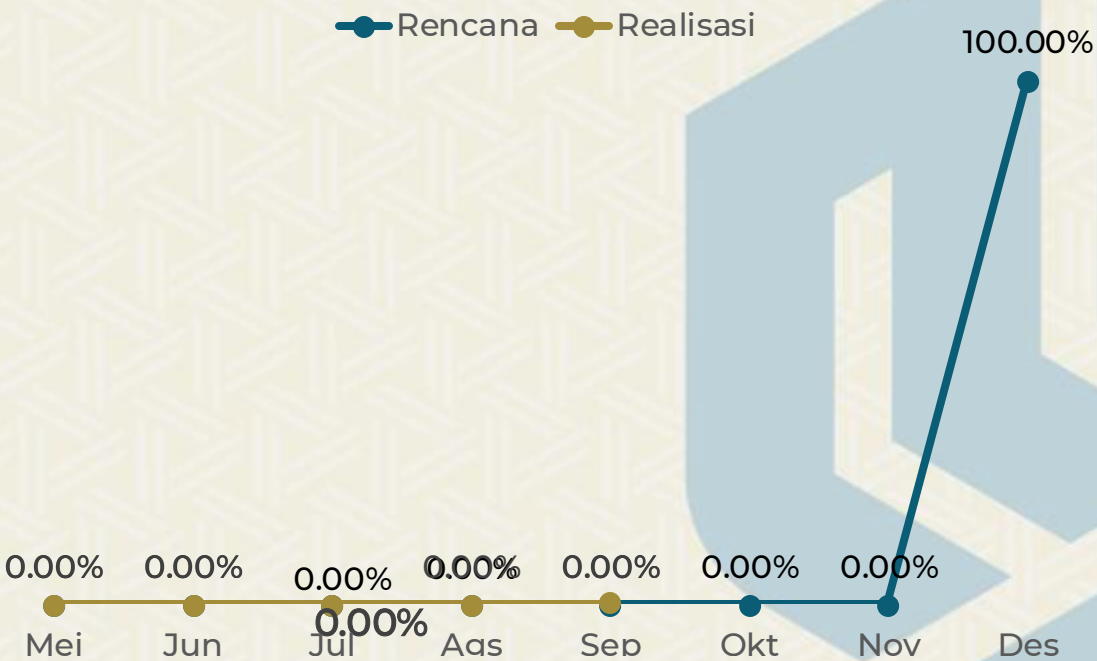


RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK DIPA DITJEN KAWASAN PERMUKIMAN TA 2025

RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN

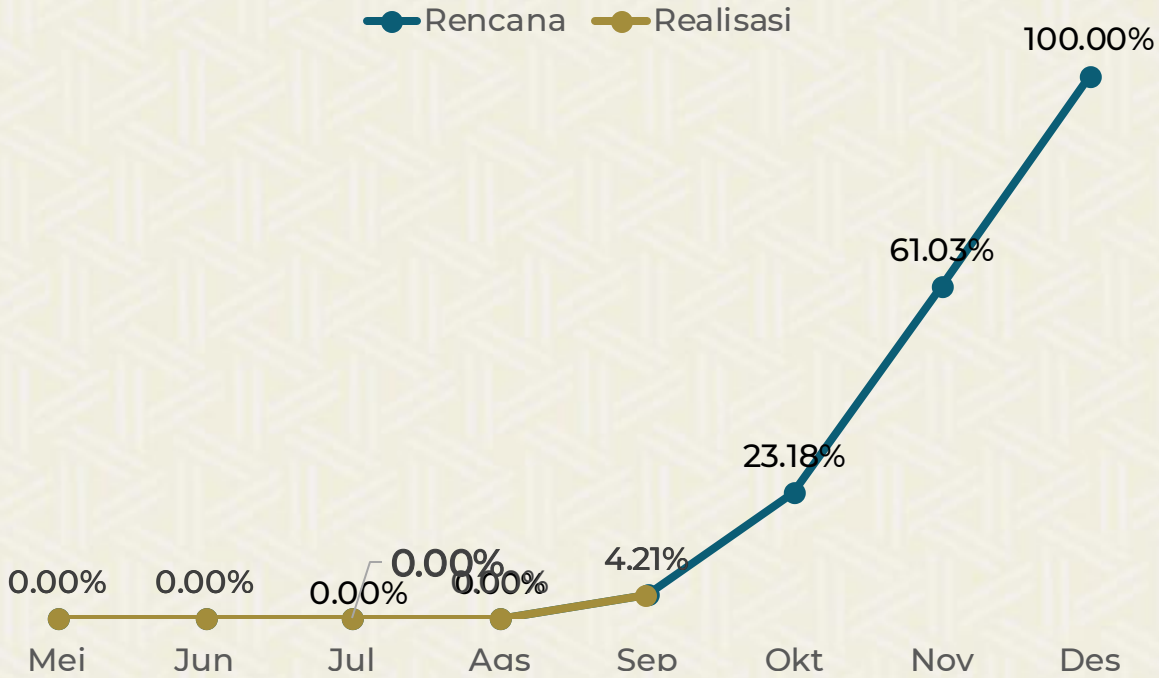


RENCANA DAN REALISASI FISIK

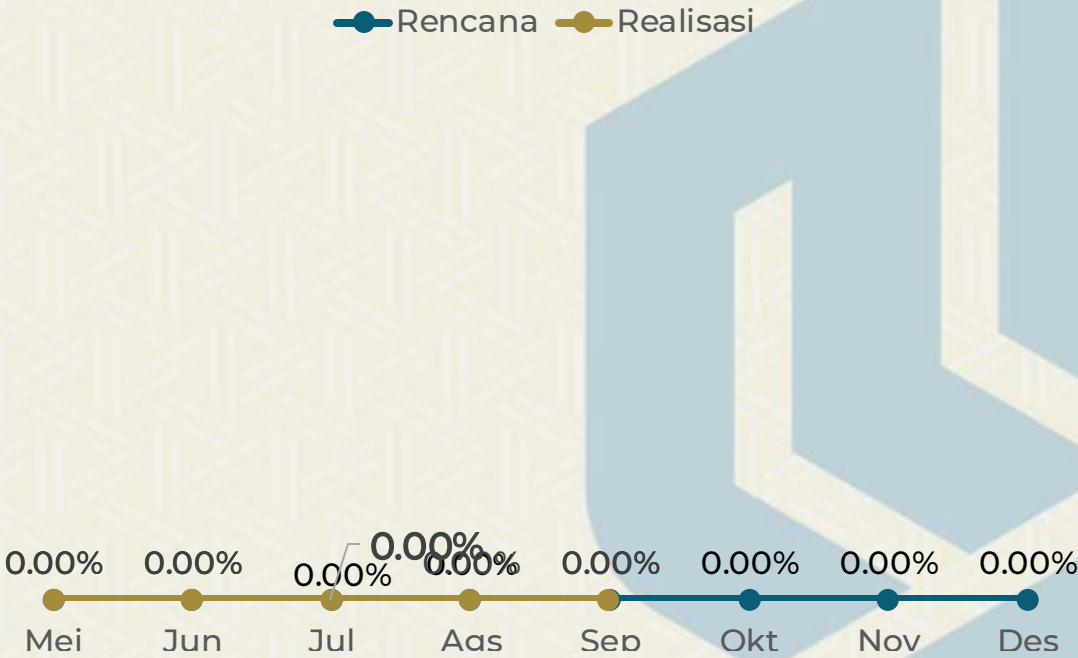


RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK DIPA DITJEN PERUMAHAN PERKOTAAN TA 2025

RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN

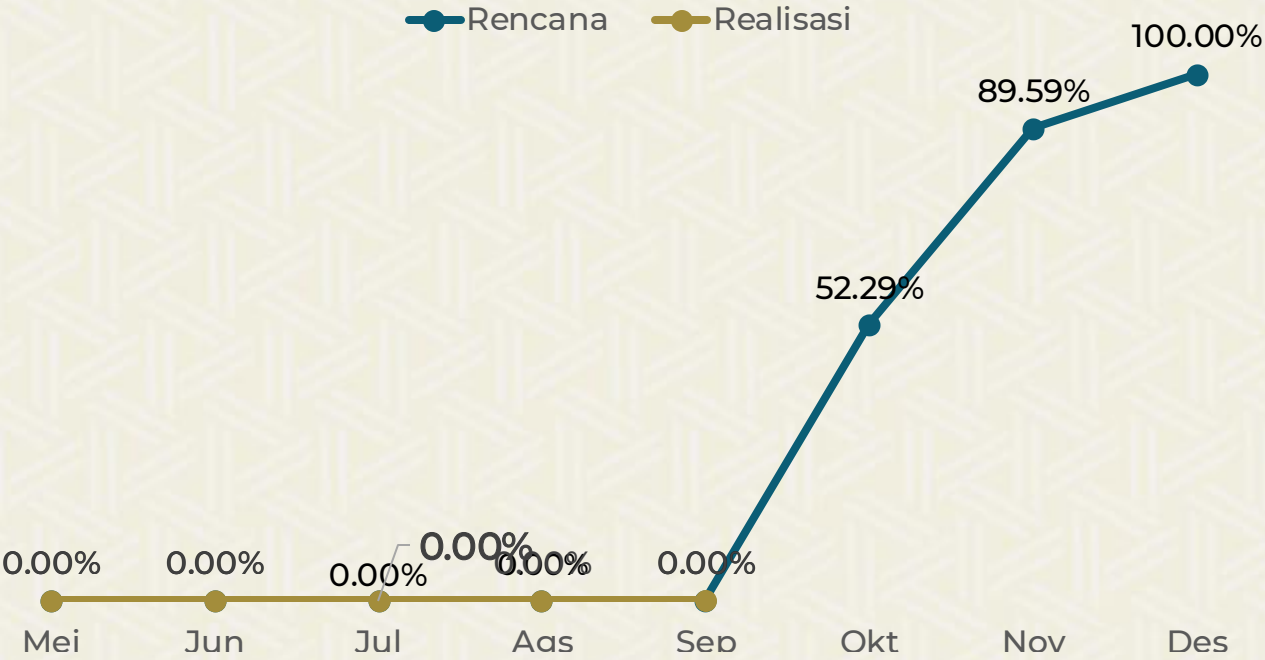


RENCANA DAN REALISASI FISIK

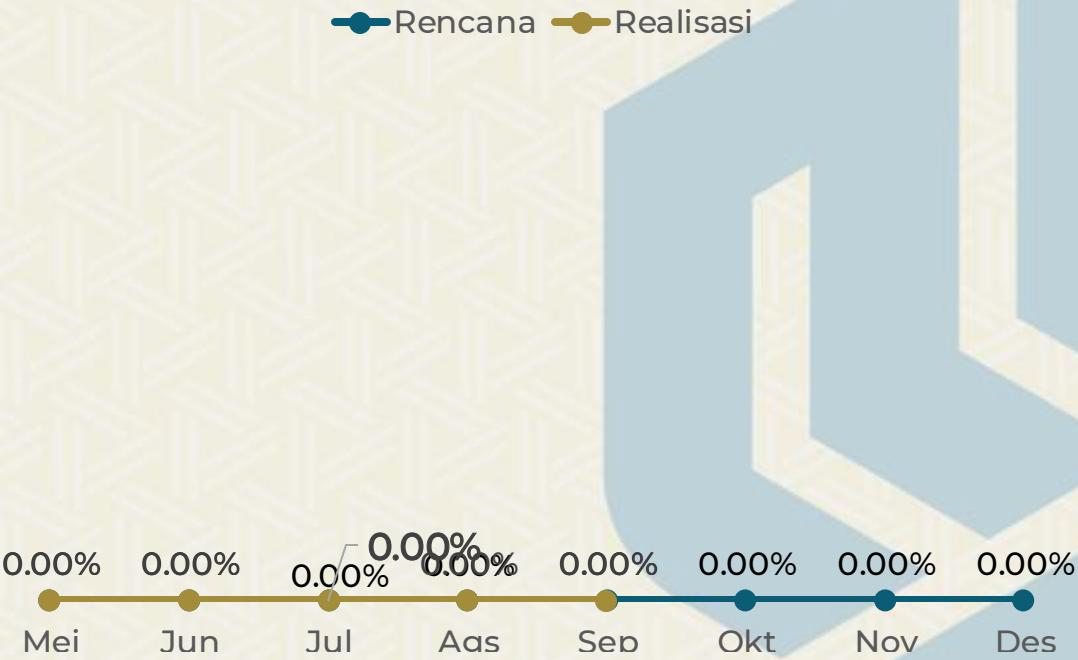


RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK DIPA DITJEN PERUMAHAN PERDESAAN TA 2025

RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN



RENCANA DAN REALISASI FISIK



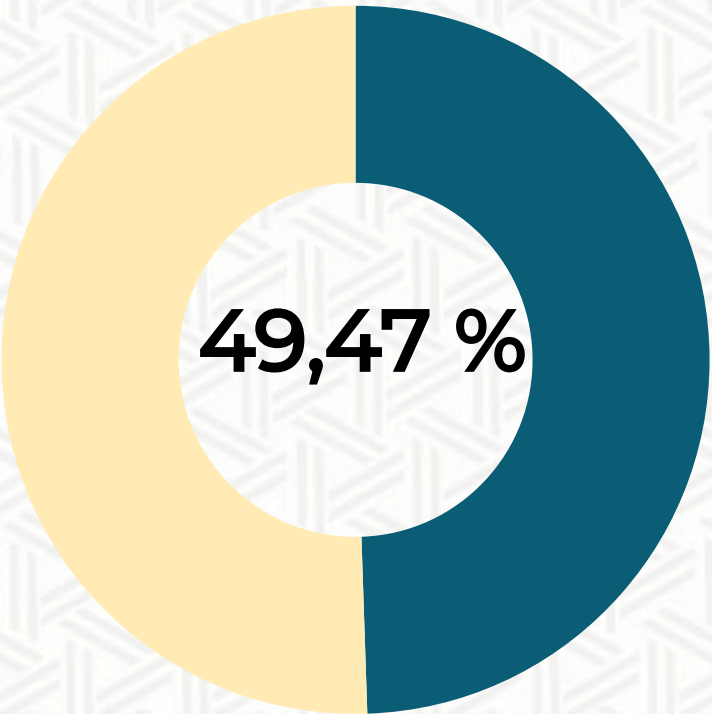
PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI GORONTALO

SEKRETARIAT JENDERAL
691419

Pagu : Rp. 596.153.000
Realisasi : Rp. 294.943.104

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
EBA.994.002.A	Layanan Perkantoran	Rp. 294,943,103	49,47%



PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI GORONTALO

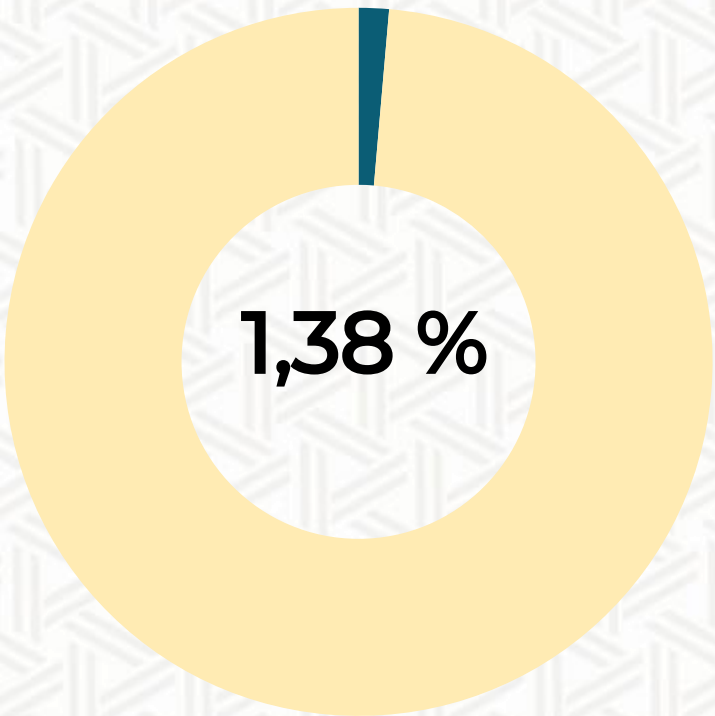


DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN
691473

Pagu : Rp. 14,435,535,000
Realisasi : Rp. 199,230,710

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
F AE.003.100.A	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Pembangunan Rusun, Peningkatan Kualitas dan Penanganan Kumuh	Rp. 26,308,500	29,05%
R BB.001.100.0A	Perencanaan dan Supervisi Pembangunan PSU Prov. Gorontalo	Rp. 14,000,000	6,98%
R BB.001.101.0A	Pembangunan PSU Perumahan (Palma Residence)	Rp. 0	0%
R BB.001.101.0B	Pembangunan PSU Perumahan (Rifka Lestari)	Rp. 0	0%



PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI GORONTALO



DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN
691473

Pagu : Rp. 14,435,535,000
Realisasi : Rp. 199,230,710

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTAS E REALISASI	KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTAS E REALISASI
RBB.001.101.0C	Pembangunan PSU Perumahan (Amanda Residence)	Rp. 0	0%	RBB.005.102.0A	Peningkatan Kualitas Kawasan Kumuh	Rp. 0	0%
RBB.001.101.0D	Pembangunan PSU Perumahan MBR	Rp. 0	0%	RBB.005.102.0B	Pembangunan Sanitasi Kawasan Kumuh	Rp. 0	0%
RBB.001.108.0A	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan PSU	Rp. 52,512,810	15,09%	RBB.005.103.0A	Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Kumuh	Rp. 15,969,400	1,87%
RBB.005.100.0A	Perencanaan Teknis Penanganan Kawasan Kumuh	Rp. 48,590,000	49,59%	RBB.005.103.0B	Pengawasan dan Pengendalian Kawasan Sanitasi	Rp. 5,850,000	3,60%
RBB.005.100.0B	Perencanaan Teknis Kawasan Sanitasi	Rp. 36,000,000	36,00%				

PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI GORONTALO



DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERDESAAN
691527

Pagu : Rp. 117,423,000
Realisasi : Rp. 0

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE AKUN	NAMA AKUN	DETIL	NILAI REALISASI
521211	Belanja Bahan	Makan Rapat Biasa, Snack Rapat Biasa, Pengadaan Laporan	Rp. 0
522151	Belanja Jasa Profesi	Honorarium Narasumber (Pejabat Esalon II)	Rp. 0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	Uang Harian, Penginapan, Taksi, Tiket, Uang Harian	Rp. 0

0 %

PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI GORONTALO

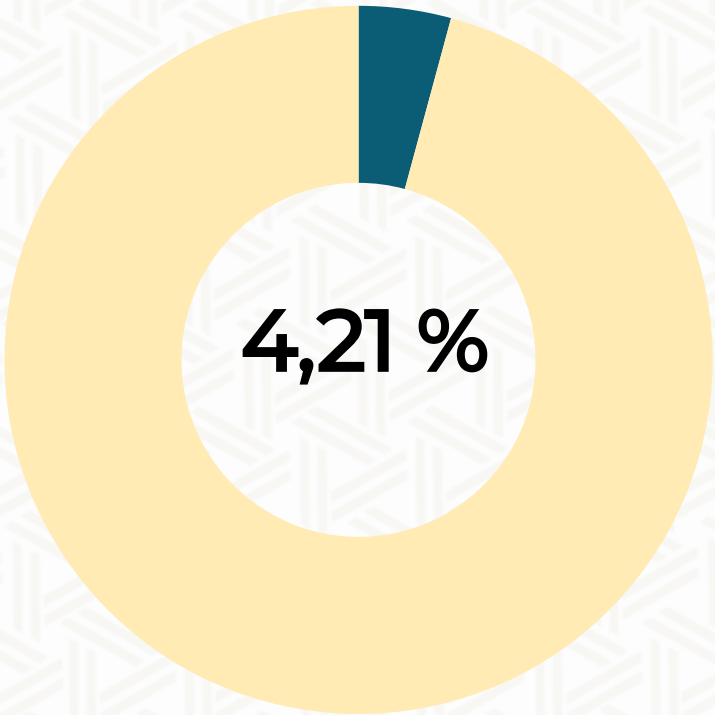


DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERKOTAAN
691581

Pagu : Rp. 508,065,000
Realisasi : Rp. 21,367,500

DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
FAE.001.100.0A	Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Perumahan Perkotaan	Rp. 21,367,500	4,21%



DATA UMUM				
Nama Paket	Pembangunan PSU Perumahan MBR di Perumahan Rifka Lestari, Kab. Gorontalo, Provinsi Gorontalo (PSU25-GORONTALO-KABGORONTALO-02)			
Alamat	Jl. Abdul Gandhi Pajuhi, Desa Dumati, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo			
Tahun Anggaran	2025			
Penerima Manfaat	Perumahan Rifka Lestari			
Tipe Perkerasan/Jumlah Unit	Paving Block/ 249 Unit			
Kepemilikan Aset	PT. Rifka Mutiara Indah			
Nilai Perolehan	Rp. 1.099.910.000			
DATA KONTRAK				
Konsultan Supervisi	Roki Monoarfa, S.T.			
Kontraktor Pelaksana	PT. Rifka Mutiara Indah			
DATA PELAKSANAAN				
Progres Fisik	Rencana 0,06%	Realisasi 0,31%	Deviasi 2 +0,25%	Keuangan -
Waktu Pelaksanaan	90 HK			
Sisa Waktu	88 HK			



Ruas 8



Ruas 8



Ruas 8



Ruas 3



Ruas 17



Ruas 3

PEKERJAAN SAAT INI :
Pekerjaan Galian Pemasangan
Kanstin

PERMASALAHAN :
-

TINDAK LANJUT:
-

PROGRES KEUANGAN DAN FISIK SATKER PKP MALUKU UTARA



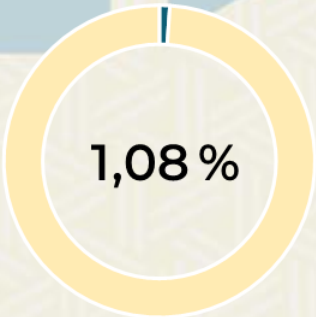
TAHUN ANGGARAN 2025

Status : 24 September 2025

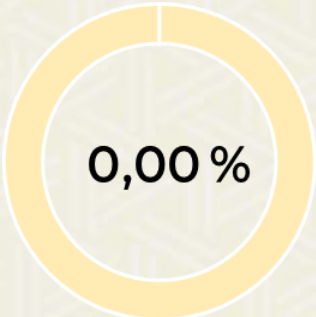
PROGRES KEUANGAN (AKUMULASI 4 DIPA)

TA 2025

PROGRES KEUANGAN (AKUMULASI 4 DIPA)

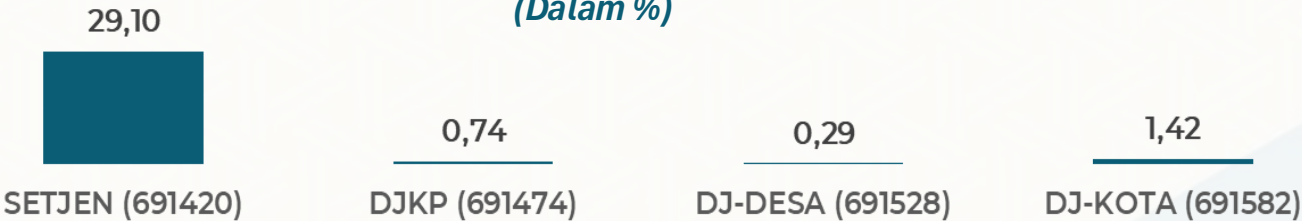


PROGRES FISIK (AKUMULASI 4 DIPA)



Pagu : Rp. 41.986.656.000
Realisasi : Rp. 244.982.444

BREAKDOWN PROGRES PER DIPA (Dalam %)



Pagu : Rp. 38.210.385.000
Realisasi : Rp. -

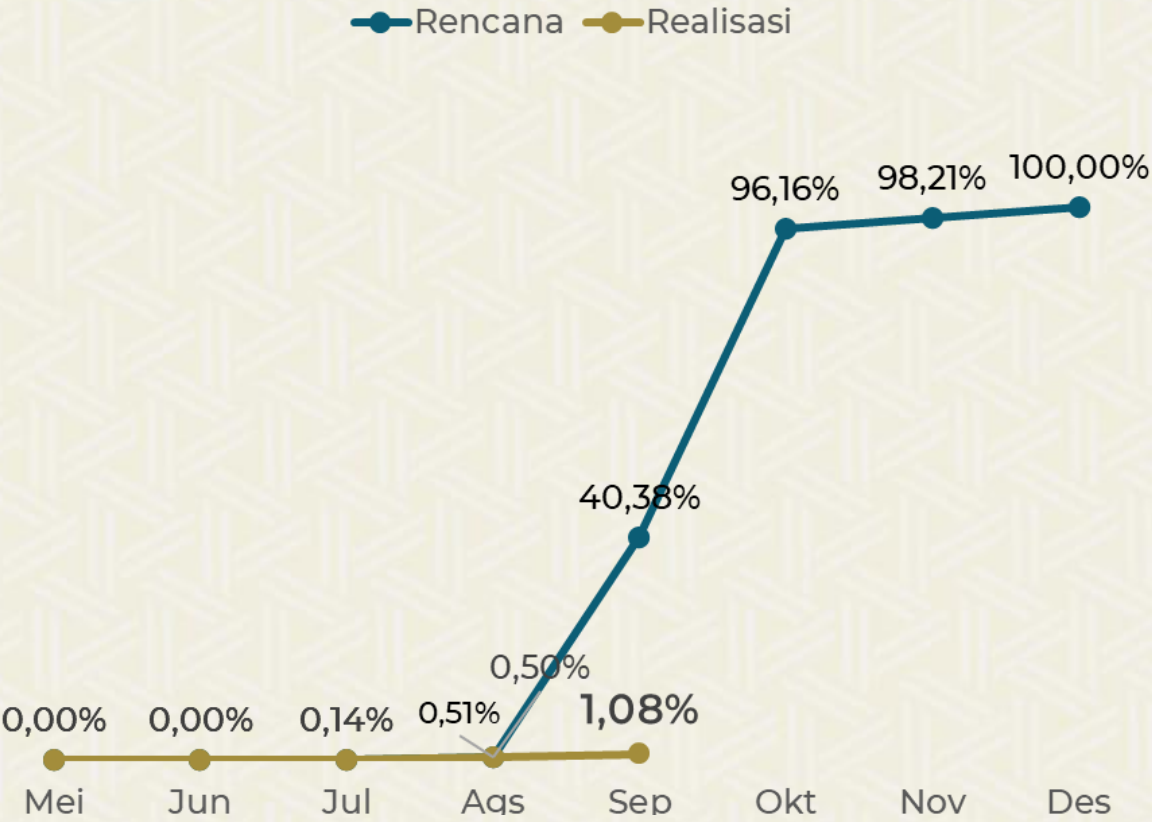
BREAKDOWN PROGRES PER DIPA (Dalam %)



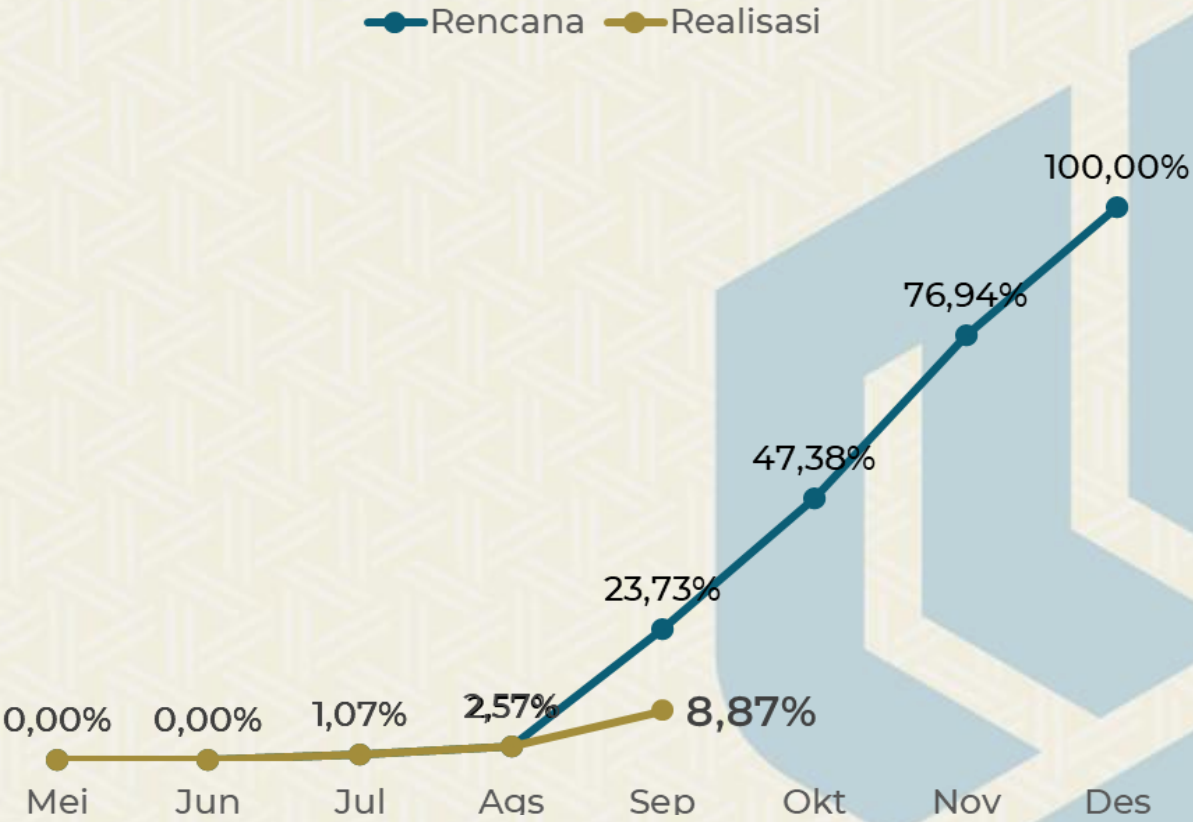
RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK (AKUMULASI 4 DIPA) TA 2025



RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN

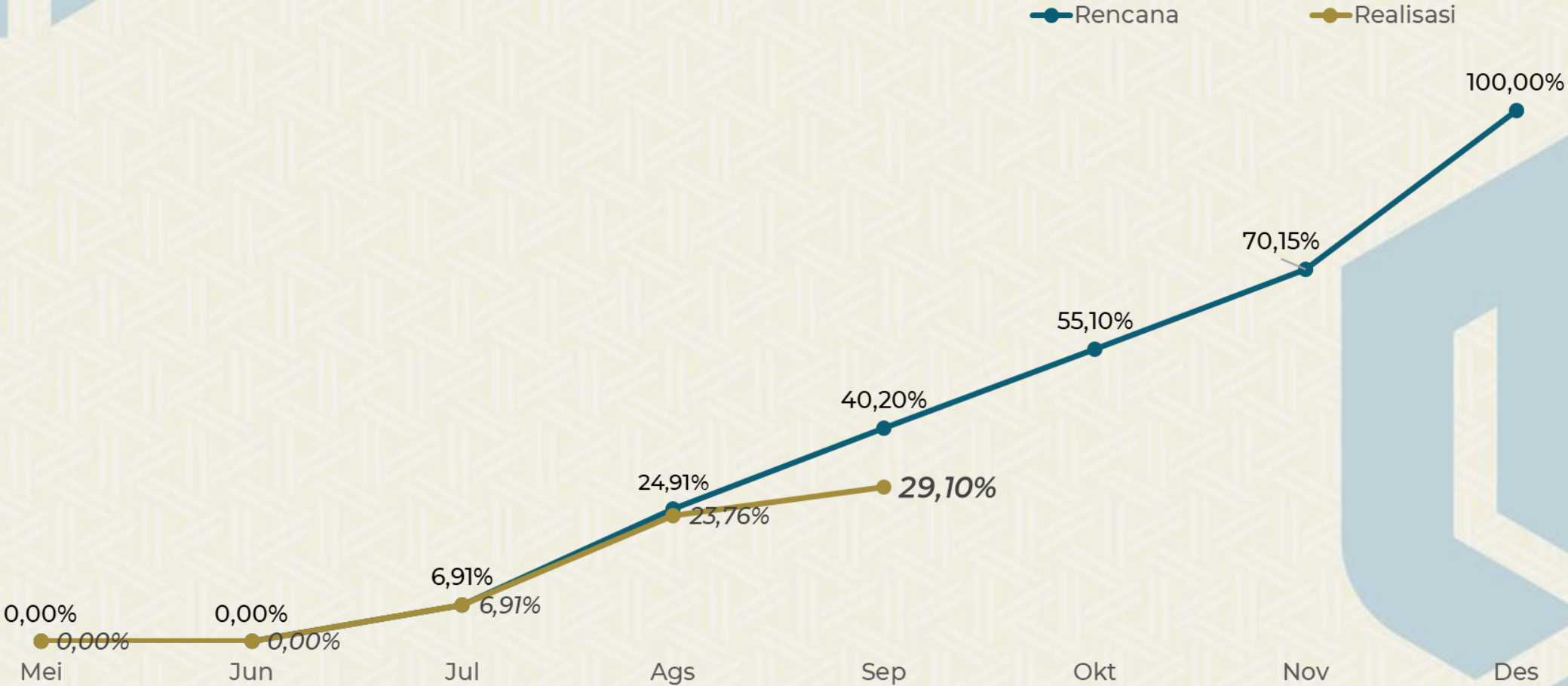


RENCANA DAN REALISASI FISIK



RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK DIPA SEKRETARIAT JENDERAL (691420) TA 2025

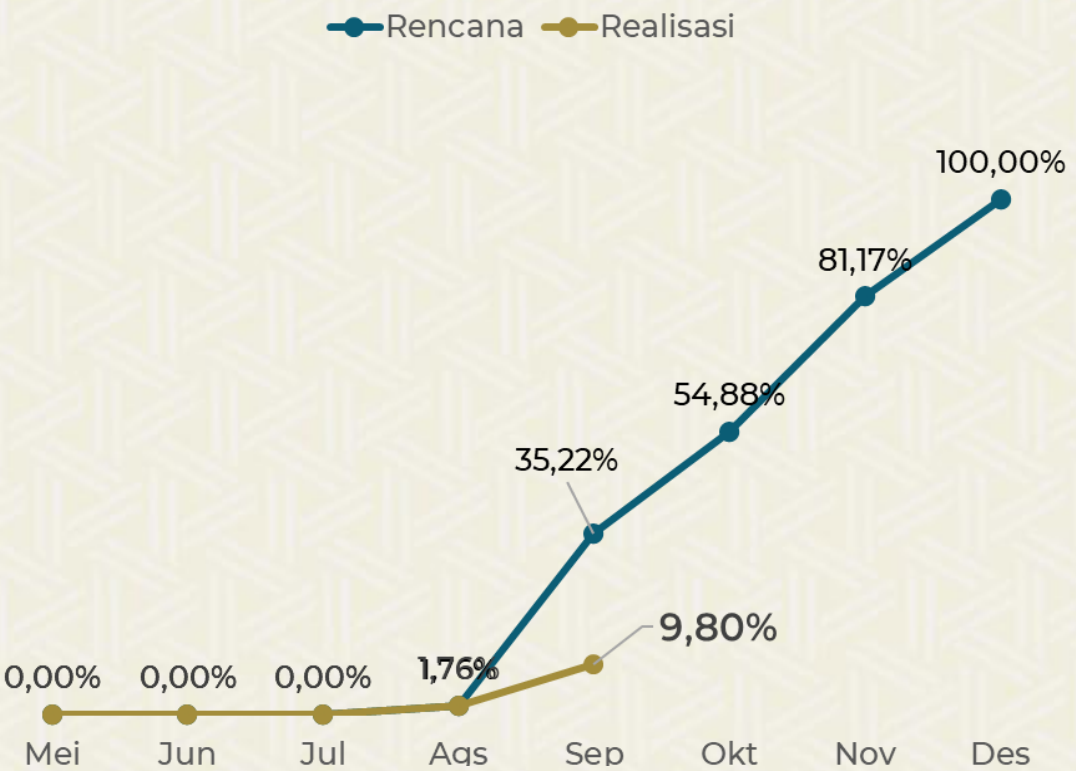
RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN



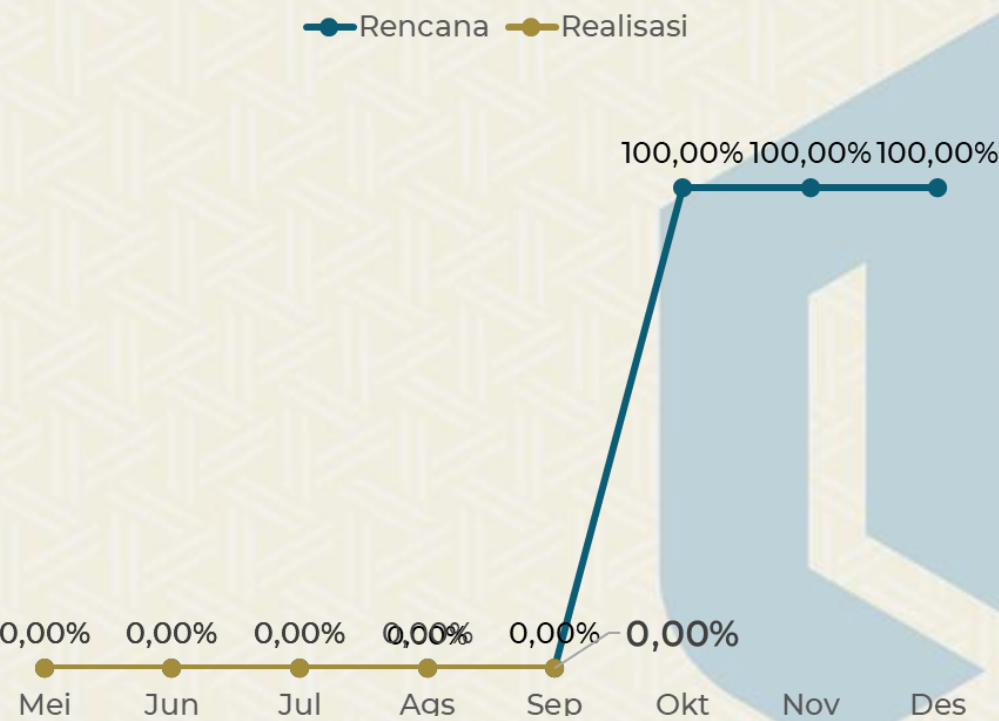
RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK DIPA DITJEN KAWASAN PERMUKIMAN (691474) TA 2025



RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN



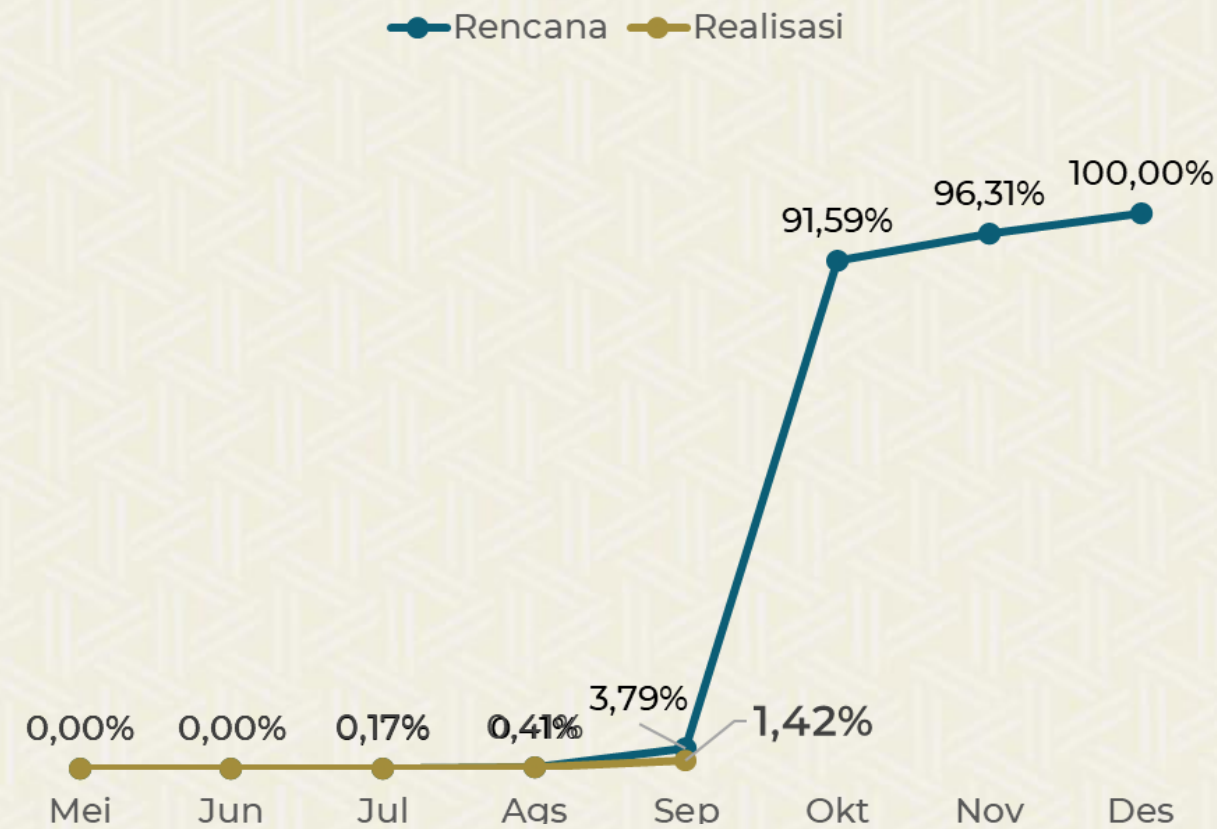
RENCANA DAN REALISASI FISIK



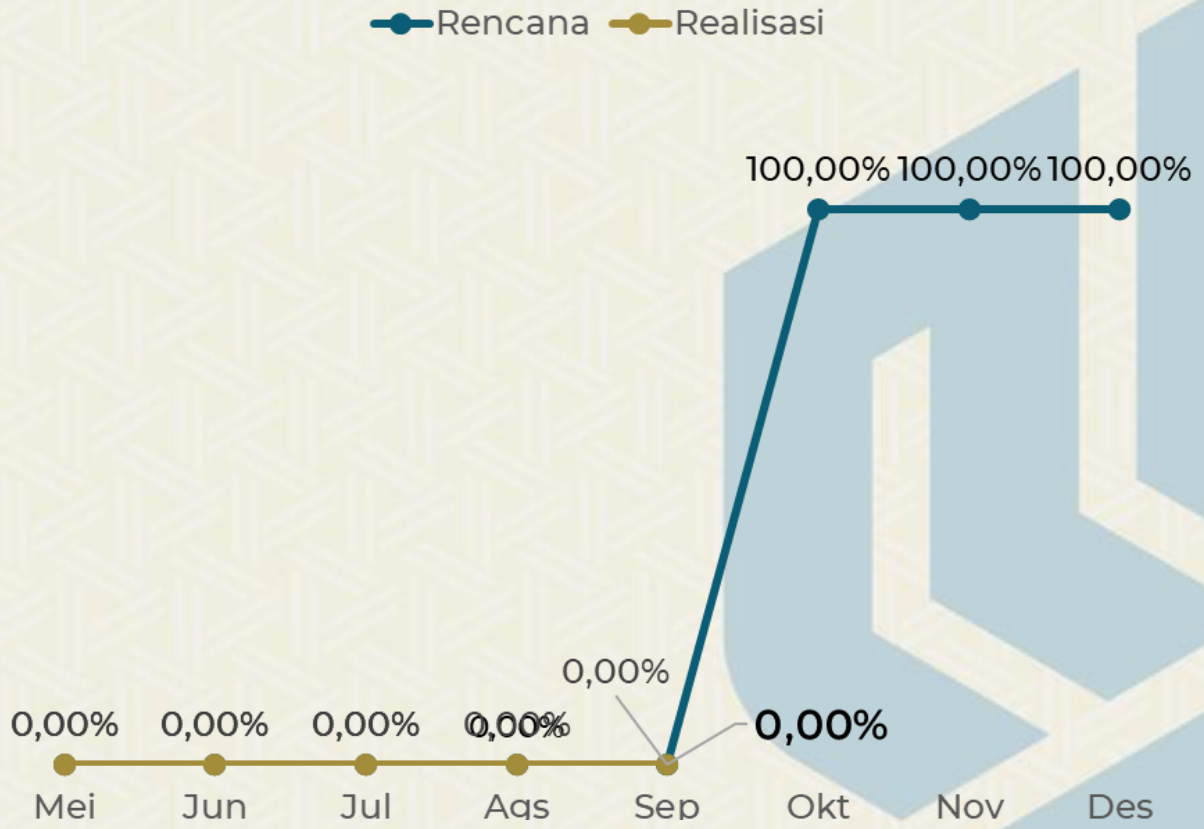
RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK DIPA DITJEN PERUMAHAN PERKOTAAN (691582) TA 2025



RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN

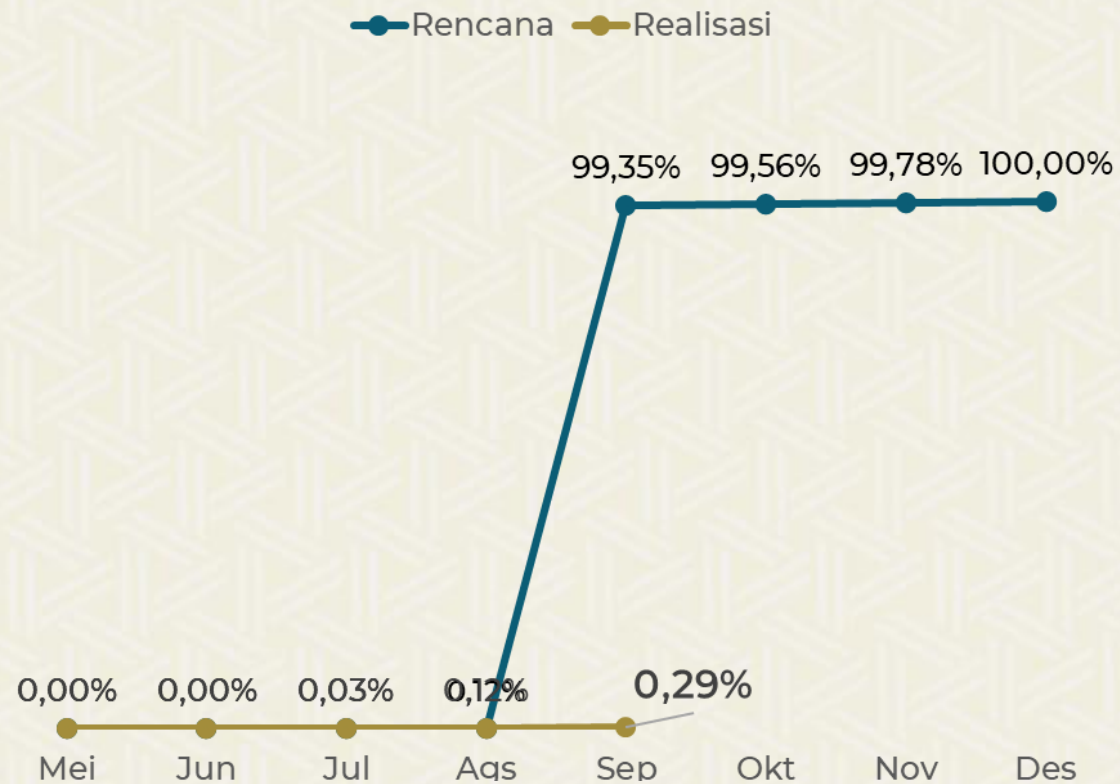


RENCANA DAN REALISASI FISIK

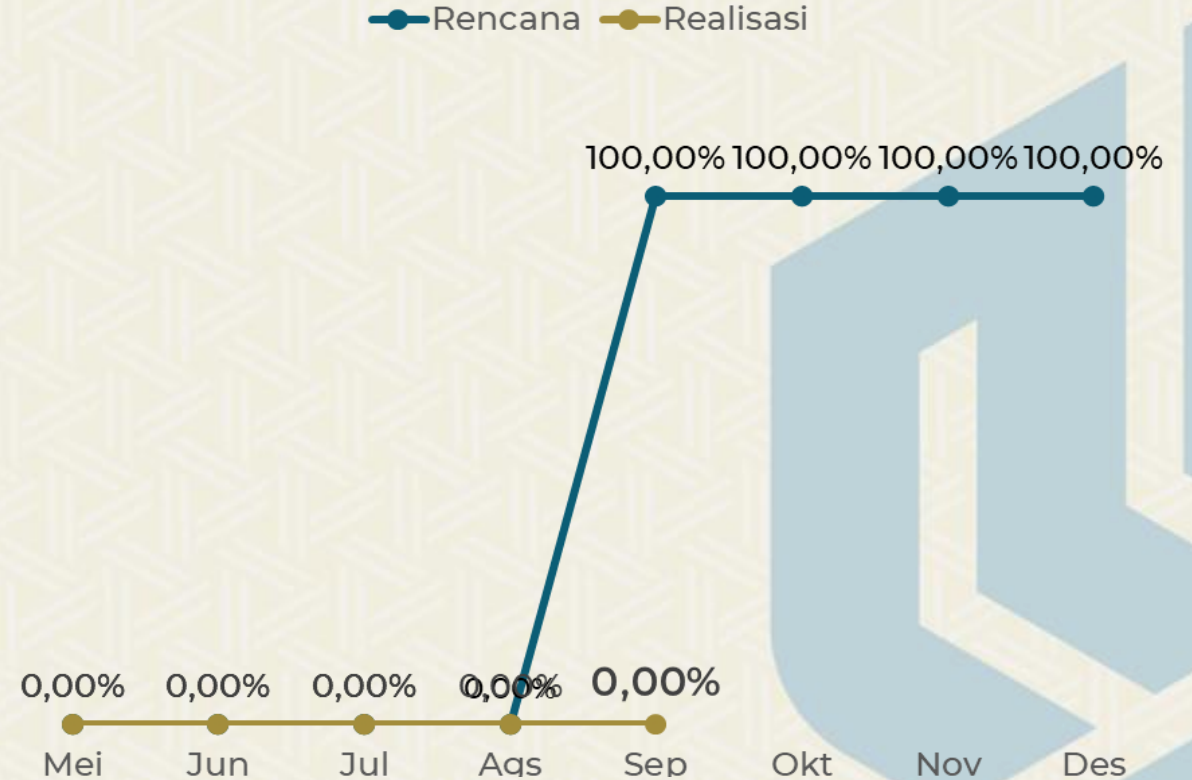


RENCANA PENYERAPAN KEUANGAN DAN FISIK DIPA DITJEN PERUMAHAN PERDESAAN TA 2025

RENCANA DAN REALISASI KEUANGAN



RENCANA DAN REALISASI FISIK

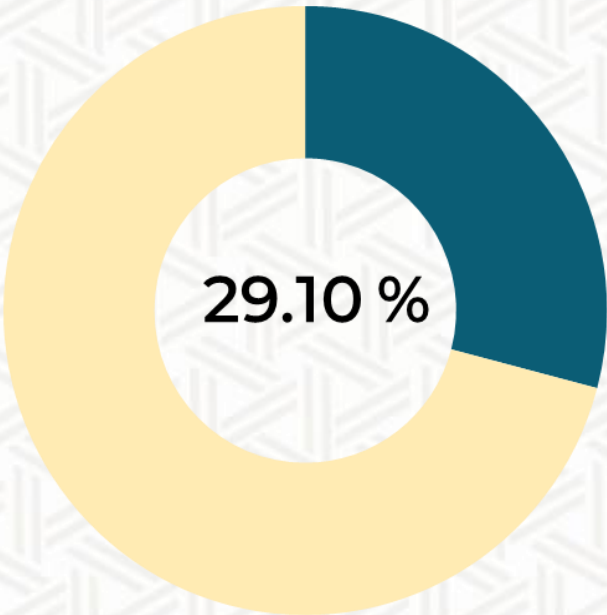


PROGRES KEUANGAN SATKER PROVINSI MALUKU UTARA



SEKRETARIAT JENDERAL
691420

Pagu : Rp. 561.036.000
Realisasi : Rp. 163.279.565

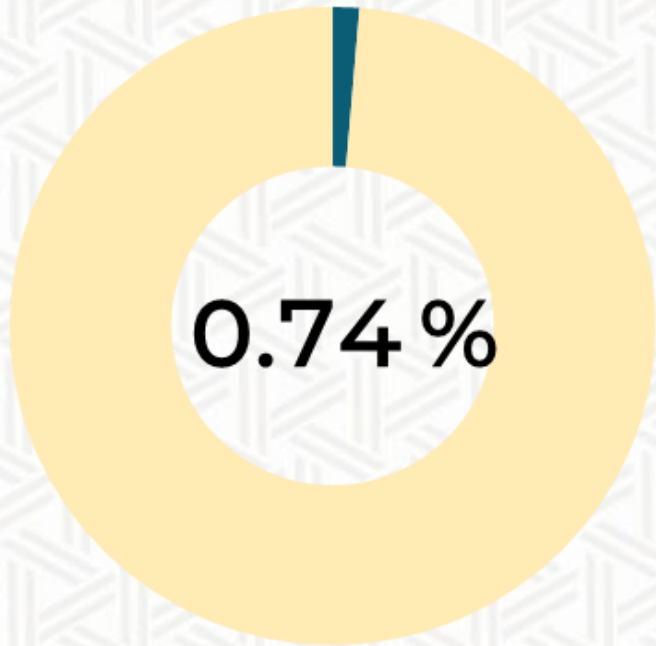


DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
EBA.994.002.A	Adiministrasi kegiatan SATKER	Rp. 86.554.079	31,31%
EBA.994.002.B	Langganan Daya dan Jasa	Rp. 16.441.421	18,10%
EBA.994.002.C	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana	Rp. 47.004.500	46,50%
EBA.994.002.D	Honor Operasional Satuan Kerja	Rp. 13.279.565	14,34%

DIREKTORAT JENDERAL
KAWASAN PERMUKIMAN
691474

Pagu : Rp. 16.995.002.000
Realisasi : Rp. 124.978.640



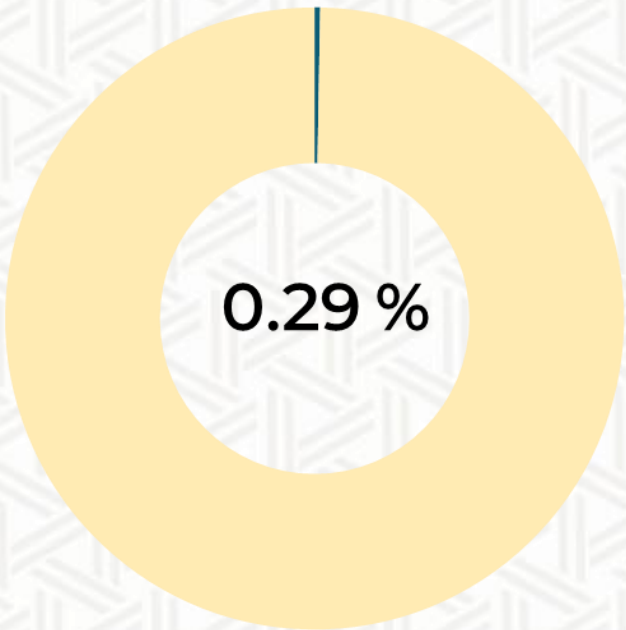
DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
FAE.003.100.0A	Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan	Rp. 29.215.640	26,09%
RBB.003.101.0A	Pelaksanaan Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kawasan Permukiman Provinsi Maluku Utara	Rp. 0	0.00%
RBB.003.101.0B	Pengawasan Pengendalian Pembangunan Rumah Swadaya	Rp. 95.763.000	8,23%

DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERDESAAN
691528

Pagu : Rp. 16.069.470.000
Realisasi : Rp. 47.041.859

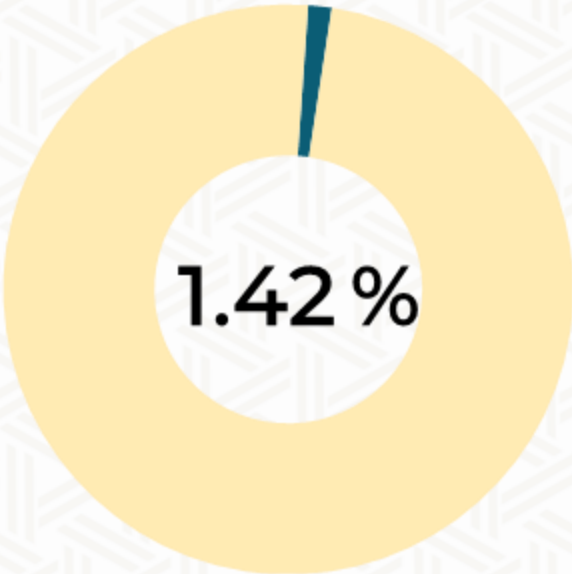
DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN



KODE AKUN	NAMA AKUN	NILAI REALISASI		PRESENTASE REALISASI
F AE.001.100.0A	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Hunian Tetap Pasca Bancana Banjir di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara	Rp. 41.195.559		29,45%
R BB.002.100.0A	Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan dan PSU Pendukungnya	Rp.	0	0,00%
R BB.002.102.0A	Manajemen Konstruksi Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan	Rp.	0	0,00%
R BB.002.102.0B	Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan Rumah Khusus Perdesaan	Rp. 5.846.300		5,85%

DIREKTORAT JENDERAL
PERUMAHAN PERKOTAAN
691582

Pagu : Rp. 8.361.148.000
Realisasi : Rp. 118.477.331



DETAIL PENYERAPAN ANGGARAN

KODE	KEGIATAN (KRO/RO)	NILAI REALISASI	PERSENTASE REALISASI
FAE.001.100.0A	Perencanaan , Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaran Perumahan Perkotaan	Rp. 6.000.000	2,06%
FEA.001.100.0B	Perjalanan Dinas dalam Rangka Verifikasi, Monitoring dan Evaluasi	Rp. 96.477.331	19,67%
RBB.008.100.0A	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya	Rp. 0	0,00%
RBB.008.101.0A	Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)	Rp. 16.000.000	2,89%

PAKET RUMAH KHUSUS

Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara
Tahun Anggaran 2024



DATA UMUM BANGUNAN			
Nama Rumah Khusus		Hunian Tetap Pasca Bencana Banjir Bandang di Kota Ternate Provinsi Maluku Utara	
Alamat		Jl. Pertamina, Kel. Jambula, Kec. Pulau Ternate, Kota Ternate	
Tahun Anggaran		2024	
Penerima Manfaat		Korban Bencana Banjir Bandang di Kota Ternate	
Tipe Bangunan/Jumlah Unit		Tipe 36/49 Unit Hunian, 1 Unit Musallah dan PSU	
Kepemilikan Aset		Pemerintah kota Ternate	
Nilai Perolehan		Rp 18.204.191.227	
DATA KONTRAK			
Konsultan MK/SPV		PT. Indah Karya (Persero)	
Kontraktor Pelaksana		PT. Nindiya Karya	
Penyedia Jasa Meubelair		-	
DATA PELAKSANAAN			
Progres Fisik		100 %	
Progres Meubelair		-	
Serah Terimah I		Selasa, 31 Desember 2024	
Rencana Serah Terima II		Rabu, 31 Desember 2025	
Waktu Pelaksanaan		110	
Sisa Waktu		-	
Rencana 100%	Realisasi 100%	Deviasi -	Keuangan 25,98%



Perspektif



Tampak Depan



Tampak Belakang



Samping Kiri



Samping Kanan



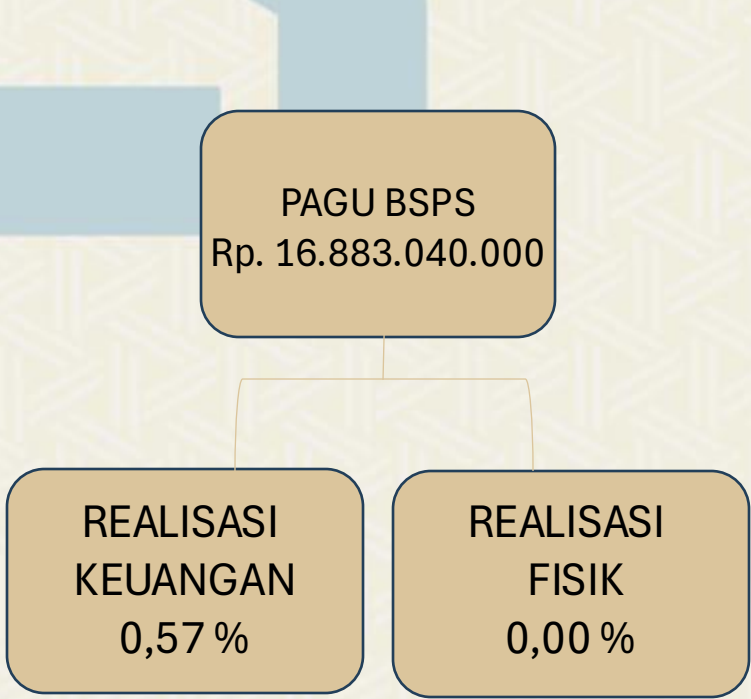
Perspektif

PEKERJAAN SAAT INI :
-

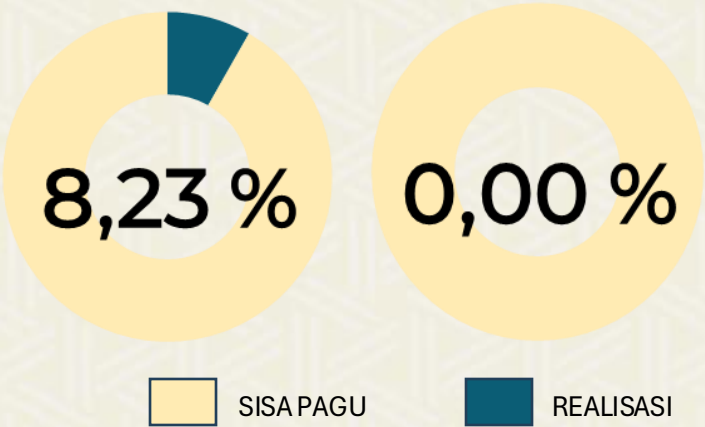
PERMASALAHAN :
Pembayaran Prestasi Pekerjaan
Pembangunan Huntap Korban Bencana
di Kelurahan Rua, Kota Ternate masih
dalam Proses Post Audit BPKP

TINDAK LANJUT:
Menunggu Hasil Post Audit sebagai
dasar Pembayaran

PROGRES BSPTS DELINEASI PESISIR



PEKERJAAN SAAT INI	PERMASALAHAN	TINDAK LANJUT
1. Tahapan Pelaksanaan Pleno Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan	1.	1.



PROGRES BSPPS DELINEASI PERKOTAAN



PEKERJAAN SAAT INI

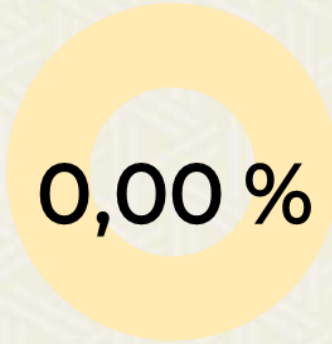
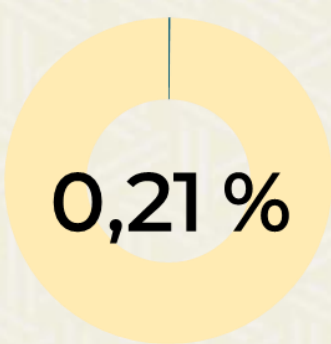
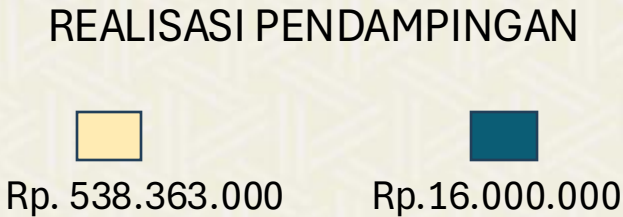
1. Tahapan Pelaksanaan Pleno Hasil Verifikasi Calon Penerima Bantuan

PERMASALAHAN

1.

TINDAK LANJUT

1.



DOKUMENTASI PROGRES BSPTS DELINEASI PERKOTAAN DAN PESISIR

KEGIATAN: Melakukan verifikasi teknis terhadap Calon Penerima Bantuan



KEGIATAN: Pada tanggal 24 September 2025 dilakukan Rapat Evaluasi Pelaksanaan BSPTS Provinsi Maluku Utara Delineasi Pesisir dan Perkotaan TA 2025





KEMENTERIAN PERUMAHAN
DAN KAWASAN PERMUKIMAN

Gotong Royong
Membangun *Rumah*
untuk Rakyat

TERIMA KASIH

